

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak pada posisi antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 7.300,50 Km². Secara administratif Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan, 245 desa definitif / persiapan dan 10 Kelurahan. Dari 20 Kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Rambang Dangku dengan luas wilayah 773,33 Km² atau mencapai 10,33 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim, kemudian diikuti Kecamatan Tanjung Agung dengan luas wilayah 710,04 Km² atau sebesar 9,49 persen dan Kecamatan Gelumbang dengan luas wilayah 705,57 Km² atau sebesar 9,43 persen. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Muara Enim per kecamatan.

KEWENANGAN TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Administrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas saat ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah memberikan jawaban yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Muara

Enim yang ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.

Pada tahun 2016 Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris, 3 Asisten, 10 Bagian.
2. Sekretariat DPRD.
3. Inspektorat.
4. Dinas Daerah, terdiri dari 24 Dinas Daerah.
5. Badan, terdiri dari 5 Badan Daerah.
6. 20 Kecamatan.
7. 10 Kelurahan.
8. 245 Desa Definitif.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mengelola potensi sumber daya alam dengan organisasi yang memadai, serta sumber daya manusia yang cukup, Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus meningkatkan kualitas SDM yang tersedia. Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2016 berjumlah 8.174 orang yang terdiri dari : 2.596 orang ANS dengan tingkat pendidikan Strata 1 sampai dengan Strata 3, 3.109 orang ANS dengan tingkat pendidikan Diploma I sampai dengan Diploma IV dan 2.469 orang ANS dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. PNS tersebar pada unit kerja,

yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan UPT.

Berdasarkan klasifikasi Golongan, Pendidikan dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	CPNS	PNS	Jumlah
1	IV		2.128	2.128
2	III		4.184	4.184
3	II		1.793	1.793
4	I		69	69
Jumlah			8.174	8.174

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

2) Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	CPNS	PNS	Jumlah
1	S-3 / Doktor		3	3
2	S-2 / Pasca Sarjana		135	135
3	S-1 / Sarjana		2.458	2.458
4	Diploma IV		40	40
5	Diploma III / Sarmud		923	923
6	Diploma II		1.853	1.853
7	Diploma I		293	293
8	SLTA		2.203	2.203
9	SLTP		151	151
10	SD		115	115
Jumlah			8.174	8.174

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

3) Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah Formasi (Orang)	Terisi (Orang)	Jumlah Eselon yang Lowong
1	Eselon II.A		1	
2	Eselon II.B		37	
3	Eselon III.A		68	
4	Eselon III.B		130	
5	Eselon IV.A		551	
6	Eselon IV.B		80	
Jumlah			867	

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

C. SISTEMATIKA LKjIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2016.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran srtategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN LAMPIRAN:

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Lain – Lain yang dianggap perlu

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 -2018, disusun suatu Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD/RKT ini merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2013-2018 yang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Program sasaran prioritas guna meningkatkan IPM melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan anak usia dini, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program jaminan kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program standarisasi pelayanan kesehatan, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru – paru/rumah sakit mata, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, dan program pembinaan pemasyarakatan olah raga.
2. Program sasaran prioritas guna menurunkan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan fakir miskin, KAT, PMKS dan lainnya, program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan

sosial budaya, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

3. Program sasaran prioritas guna meningkatkan ketahanan pangan melalui program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan ketahanan pangan, dan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
4. Program sasaran prioritas guna terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR melalui program pengembangan perumahan.
5. Program sasaran prioritas guna meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
6. Program sasaran prioritas guna meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan melalui program pengembangan wawasan kebangsaan.
7. Program sasaran prioritas guna meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat melalui program pengembangan lembaga – lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama.
8. Program sasaran prioritas guna meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama melalui program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
9. Program sasaran prioritas guna meningkatkan pelayanan publik melalui program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
10. Program sasaran prioritas guna meningkatkan transfaransi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama pembangunan dan program perencanaan pembangunan daerah.

11. Program sasaran prioritas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, program pengembangan sentra – sentra industry potensial, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dan program pengembangan destinasi pariwisata.
12. Program sasaran prioritas guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pengembangan sentra – sentra industry potensial, program pengembangan industry kecil dan menengah, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi hasil peternakan, dan program pengembangan budidaya perikanan.
13. Program sasaran prioritas guna meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
14. Program sasaran prioritas guna meningkatkan sarana prasarana pendukung perekonomian melalui program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan infrastruktur perkotaan.
15. Program sasaran prioritas guna meningkatkan pelestarian lingkungan hidup melalui program pengelolaan ruang terbuka hijau, program pengendalian pemanfaatan ruang, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah 2016 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian

aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim sepenuhnya dapat dirujukan pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah 2016 ini.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1.a	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,90
1.b	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase masyarakat miskin	11,16
1.c	Meningkatnya ketahanan pangan	a. Ketersediaan pangan utama : - Beras - Daging - Telur - Ikan b. Jumlah kelompok tani kelas utama	112,39 kg/kapita/tahun 12,54 kg/kapita/tahun 8,24 kg/kapita/tahun 33,54 kg/kapita/tahun 76 kelompok
1.d	Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR	Jumlah rumah tidak layak huni	13.886 Unit
1.e	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	a. Persentase rumah tangga pengguna air bersih b. Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,82 71,6
2.a	Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan	Persentase lembaga – lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	90
2.b	Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	a. Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikat baca Al-Quran b. Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal	3.960 anak 30 produk
2.c	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	Jumlah konflik bernuansa sara	-
2.1.a	Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik

2.1.b	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. LAKIP b. Opini BPK	B WTP
3.1.a	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	77,10 persen
1.b	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PDRB ADHK dengan migas PDRB ADHK tanpa migas	11.7 9.0
1.c	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	a. Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik b. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik c. Persentase KK teraliri listrik d. Persentase desa yang memiliki akses terhadap pasar yang memadai e. Jumlah BPR aktif f. Jumlah UKM non BPR / LKM aktif g. Persentase koperasi aktif	83,59 79,77 68,86 92 1 4.479 90
4.1.a	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes	67
1.b	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa	67
1.c	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase LPM aktif	88
1.d	Menurunnya jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	0
5.1.a	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	a. Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal b. Persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	72 58,80

Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan serta Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan melalui Sekolah Gratis dan Berobat Gratis;

3. Revitalisasi Pertanian dalam Arti Luas dan Kehutanan serta Pembangunan Pedesaan;
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Investasi dan Kesempatan Kerja serta Pemberdayaan UMKMK;
6. Optimalisasi Pemanfaatan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengembangan Pariwisata, dan Kebudayaan Daerah;
7. Peningkatan Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 2016

Secara garis besar Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016 telah berhasil melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi, dari 18 sasaran dengan 30 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kesemuanya telah dilaksanakan, namun tingkat keberhasilannya masih belum terwujud secara optimal. Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator setingkat *outcome*. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (*Key Performance indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh sasaran yang tingkat capaiannya dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu : **sangat baik** dengan tingkat capaian ≥ 91 persen sebanyak 11 sasaran (61,11 persen dari total sasaran), **baik** dengan tingkat capaian 81 persen - 90 persen sebanyak 2 sasaran (11,11 persen dari total sasaran), **cukup** dengan tingkat capaian 71 persen - 80 persen sebanyak 2 sasaran (11,11 persen dari total sasaran) dan **kurang** dengan tingkat capaian ≤ 70 persen sebanyak 3 sasaran (16,66 persen dari total sasaran).

**Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.1.a	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,90	65,82
1.b	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase masyarakat miskin	11,16	14,54
1.c	Meningkatnya ketahanan pangan	a.Ketersediaan pangan utama: - Beras - Daging - Telur - Ikan b.Jumlah kelompok tani kelas utama	112,39 kg/kapita/tahun 12,54 kg/kapita/tahun 8,24 kg/kapita/tahun 33,54 kg/kapita/tahun 76 kelompok	104,77 kg/kapita/tahun 16,89 kg/kapita/tahun 14,54 kg/kapita/tahun 41,54 kg/kapita/tahun 76 kelompok
1.d	Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR	Jumlah rumah tidak layak huni	13.886 Unit	15.811 Unit
1.e	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	a. Persentase rumah tangga pengguna air bersih b. Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,82 71,60	73,57 76,80
2.a	Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan	Persentase lembaga – lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	90	100
2.b	Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	a. Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikat baca Al-Quran b. Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal	3.960 anak 30 produk	1.109 12
2.c	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	Jumlah konflik bernuansa sara	-	-
2.1.a	Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
1.b	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. LAKIP b. Opini BPK	CC WDP	B WTP

3.1.a	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK dengan migas PDRB ADHK tanpa migas	11.7 9.0	7,62 8,87
1.b	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	77,10	50,55
1.d	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	a. Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik b. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik c. Persentase KK teraliri listrik d. Persentase desa yang memiliki akses terhadap pasar yang memadai e. Jumlah BPR aktif f. Jumlah UKM non BPR / LKM aktif g. Persentase koperasi aktif	83,59 79,77 68,86 92 1 4.479 90	68,31 71,81 81,60 95 1 4.546 68,81
4.1.a	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes	67	72,10
1.b	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa	67	100
1.c	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase LPM aktif	88	93,72
1.d	Menurunnya jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	0	1
5.1.a	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	a. Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal b. Persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	72 58,80	44,44 0,025
Rata – rata tingkat capaian sasaran				94

Analisis capaian masing-masing sasaran selama Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1.1.a : Meningkatnya IPM

Prestasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan target 72,90.

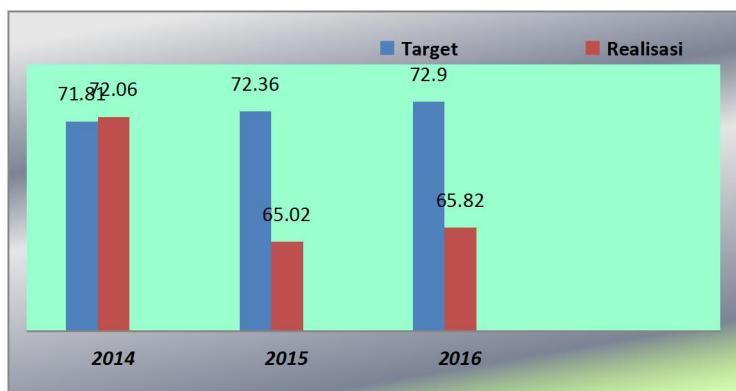
Pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016 sebesar 65,82. Dengan pencapaian IPM sebesar 65,82 maka sasaran pada tahun kedua 2016 RPJMD Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Muara Enim dengan target IPM 72,90 tidak tercapai ini dikarenakan terjadinya perubahan metode penghitungan IPM, dimana pada tahun sebelumnya metode lama penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan pada metode penghitungan baru IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penghitungan IPM metode baru ini menggunakan indikator yang lebih tepat, lebih realities dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan adanya perubahan metode perhitungan IPM maka target IPM pada RPJMD Kabupaten Muara Enim akan dilakukan perubahan.

Pencapaian angka IPM Kabupaten Muara Enim sebesar 65,82 dengan menggunakan penghitungan metode baru menempati urutan ke enam kabupaten/kota diseluruh Provinsi Sumatera Selatan dan masih dibawah angka IPM Propinsi Sumatera Selatan sebesar 66,75.

Terhadap perubahan metode penghitungan IPM tersebut pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melakukan revisi terhadap target meningkatnya Angka IPM pada RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018.

Pencapaian IPM Kabupaten Muara Enim 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 1.1.a berikut :

Grafik Sasaran 1.1.a
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



Untuk mencapai realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,82, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah diantaranya Program wajib belajar pendidikan 9 tahun dengan indikator Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A dan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Program Pendidikan Menengah dengan indikator angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan indikator Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. Program jaminan kesehatan dengan indikator Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Program Standarisasi pelayanan kesehatan dengan indikator persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan indikator rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata dengan indikator Rasio rumah sakit persatuan penduduk. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah dan Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta. Program pengembangan nilai budaya

dengan indikator Cakupan kajian budaya. Program pembinaan dan permasyarkatan olah raga dengan indikator Jumlah prestasi olah raga. SKPD penanggung jawab adalahSKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD dr. H. M. Rabain, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.

1.1.a.1. Program wajib belajar pendidikan 9 tahun

Keberhasilan program wajib belajar pendidikan 9 tahun pada tahun



2016 diukur dengan indikator kinerja meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A dengan target 106.52 persen, terrealisasi 99,74 persen dan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B dengan target 74.31 persen, terrealisasi 72,54 persen.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dihitung berdasarkan perbandingan jumlah murid usia jenjang pendidikan dasar dengan jumlah penduduk usia jenjang pendidikan dasar (usia 7 – 12 tahun). Pada tahun 2016 penduduk usia jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Muara Enim berjumlah 65.240 jiwa, sementara jumlah murid usia jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Muara Enim berjumlah 65.068 siswa sehingga Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 99,74 persen.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Muara Enim tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dikarenakan adanya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi, sehingga banyak anak usia di bawah 7 (tujuh) tahun sudah bersekolah ditingkat sekolah dasar sehingga tidak termasuk dalam perhitungan APM, hal tersebut dikarenakan dalam perhitungan APM usia lebih rendah dibanding kelompok usia sekolah standar sekolah dasar berusia 7 – 12 tahun.

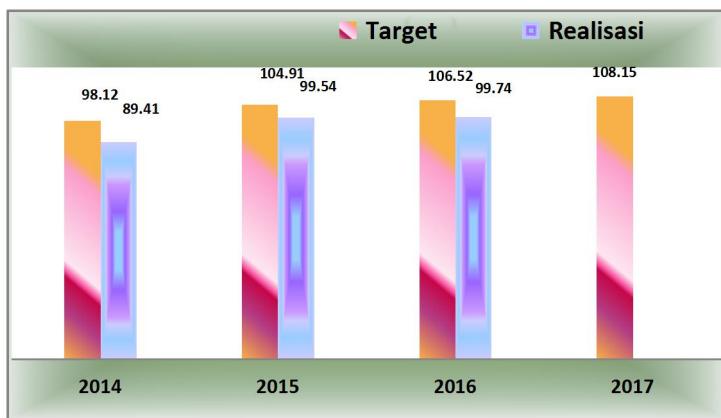
Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM)SD / MI / Paket A Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 1.1.a.1 berikut :

**Tabel.1.1.a.1
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk 7 - 12 Th.	Siswa SD + SDLB + Paket A				APM %			
			Seluruhnya		7-12 Th.					
			Termasuk Paket A + SDLB	Tdk. Termasuk Paket A dan SDLB	Termasuk Paket A dan SDLB	Tdk. Termasuk Paket A dan SDLB				
1	Semende Darat Ulu	2,341	1,979	1,979	1,703	1,703	72,75	72,75		
2	Semende Darat Tengah	1,491	1,280	1,280	1,140	1,140	76,46	76,46		
3	Semende Darat Laut	1,726	1,809	1,809	1,560	1,560	90,38	90,38		
4	Tanjung Agung	4,663	4,717	4,717	3,981	3,981	85,37	85,37		
5	Lawang Kidul	5,941	7,451	7,410	7,141	7,121	102,88	102,59		
6	Muara Enim	7,202	7,184	7,138	6,047	6,022	83,96	83,62		
7	Ujan Mas	2,878	2,423	3,423	2,091	2,091	72,65	72,65		
8	Gunung Megang	3,898	4,794	4,727	3,975	3,975	101,98	101,98		
9	Benakat	1,213	1,448	1,448	1,224	1,224	100,91	100,91		
10	Rambang Dangku	5,956	7,114	7,114	6,664	6,664	111,89	111,89		
11	Lubai	3,060	3,832	3,832	3,241	3,241	105,92	105,92		
12	Rambang	3,066	3,576	3,576	3,054	3,054	99,61	99,61		
13	Gelumbang	6,247	6,666	6,662	5,980	5,980	95,73	95,73		
14	Lembak	1,884	2,201	2,002	1,706	1,706	90,55	90,55		
15	Sungai Rotan	3,343	3,736	3,731	3,157	3,157	94,44	94,44		
16	Kelekar	1,190	882	871	695	695	58,40	5840		
17	Muara Belida	788	483	483	403	403	51,14	51,14		
18	Lubai Ulu	3,373	4,135	4,135	3,562	3,562	105,60	105,60		
19	Belimbing	2,810	3,508	3,508	2,911	2,911	103,59	103,59		
20	Belide Darat	1,170	1,264	1,264	1,033	1,033	88,29	88,29		
21	Madrasah iftidaiyah		5,789	5,789	3,800	3,800				
Jumlah Total		65,240	76,091	75,898	65,068	65,023	99.74	99,67		

Grafik pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat di lihat pada grafik 1.1.a.1 berikut :

Grafik 1.1.a.1
Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016



Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs / Paket B dihitung berdasarkan perbandingan jumlah murid usia jenjang pendidikan menengah pertama



dengan jumlah penduduk usia jenjang pendidikan menengah (usia 13 – 15 tahun). Pada tahun 2016 penduduk usia jenjang pendidikan menengah pertama berjumlah 33.147 jiwa, sementara jumlah murid usia jenjang pendidikan

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muara Enim berjumlah 24.044 siswa sehingga Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 72,54 persen.

Pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 1.1.a.1 berikut :

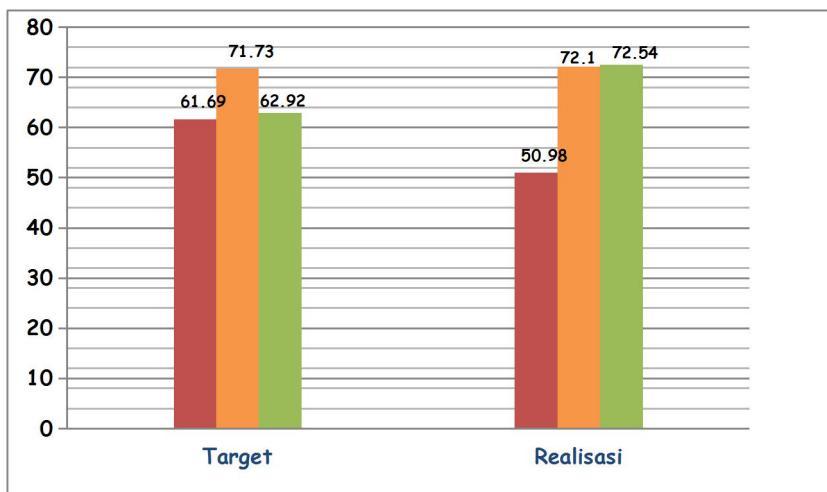
Tabel.1.1.a.1
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No	Kab. Muara Enim	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa SMP + MTs + Paket B				APM %			
			Seluruhnya		13-15 Th.					
			Termasuk Paket A + SDLB	Tdk. Termasuk Paket A dan SDLB	Termasuk Paket A dan SDLB	Tdk. Termasuk Paket A dan SDLB				
1	Kec. Semende Darat Ulu	1,095	416	416	305	305	27.85	27.85		
2	Kec. Semende Darat Tengah	675	570	538	379	379	56.15	56.15		
3	Kec. Semende Darat Laut	846	845	835	568	568	67.14	67.14		
4	Kec. Tanjung Agung	2,192	2,063	2,026	1,330	1,330	60.68	60.68		

5	Kec. Lawang Kidul	3,679	2,767	2,738	1,814	1,814	49.31	49.31
6	Kec. Muara Enim	3,386	3,880	3,801	2,634	2,634	77.79	77.14
7	Kec. Ujan Mas	1,448	918	903	639	639	44.13	44.13
8	Kec. Benakat	626	545	545	404	404	64.54	64.54
9	Kec. Gunung Megang	2,140	2,654	2,537	1,858	1,858	86.82	86.82
10	Kec. Belimbing	1,528	1,049	1,049	714	714	46.73	46.73
11	Kec. Rambang Dangku	2,857	2,516	2,480	1,735	1,735	60.73	60.73
12	Kec. Rambang	1,556	1,180	1,180	841	841	54.05	54.05
13	Kec. Lubai	1,503	1,119	1,119	809	809	53.83	53.83
14	Kec. Lubai Ulu	1,698	1,517	1,517	1,067	1,067	62.84	62.84
15	Kec. Lembak	1,120	854	748	529	529	47.23	47.23
16	Kec. Kelekar	675	346	320	192	192	28.44	28.44
17	Kec. Belida Darat	684	290	290	197	197	28.80	28.80
18	Kec. Gelumbang	3,200	2,683	2,663	1,962	1,962	61.31	61.31
19	Kec. Sungai Rotan	1,825	1,360	1,325	935	935	51.23	51.23
20	Kec. Muara Belida	414	173	173	122	122	29.47	29.47
21	Madrasah Tsanawiyah		5,210	5,210	5,010	5,010		
Total		33,147	32,955	32,413	24,044	24,022	72.54	72,47

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik 1.1.a.1 berikut :

Grafik 1.1.a.1
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



1.1.a.2. Program Pendidikan Menengah

Keberhasilan program Pendidikan Menengah tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C dengan target 48,99 persen, terrealisasi 60,41 persen.

Angka Partisipasi Murni SMA / MA / Paket C dihitung berdasarkan perbandingan jumlah murid usia jenjang pendidikan menengah atas



dengan jumlah penduduk usia jenjang pendidikan menengah(usia 16 – 18 tahun). Pada tahun 2016 penduduk usia jenjang pendidikan menengah atas di Kabupaten Muara Enim berjumlah 29.800 jiwa, sementara jumlah murid usia

jenjang pendidikan sekolah menengah atas di Kabupaten Muara Enim berjumlah 18.001 siswa sehingga Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 60,41 persen.

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/MA/Paket C Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 1.1.a.2 berikut :

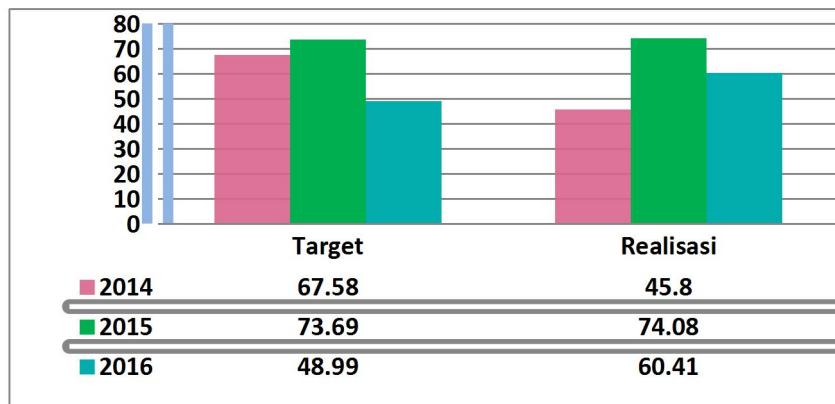
**Tabel.1.1.a.1
Angka Partisipasi MurniSMA/MA/Paket C Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

No	Kab. Muara Enim	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	Siswa SD + SDLB + Paket A				APM %			
			Seluruhnya		13-15 Th.					
			Termasuk Paket A + SDLB	Tidak Termasuk Paket A dan SDLB	Termasuk Paket A dan SDLB	Tidak Termasuk Paket A dan SDLB				
1	Kec. Semende Darat Ulu	1,135	361	361	282	282	24.85	24.85		
2	Kec. Semende Darat Tengah	711	61	0	0	0	-	-		
3	Kec. Semende Darat Laut	861	870	835	603	603	70.03	70.03		
4	Kec. Tanjung Agung	1,771	1,359	1,251	920	920	51.92	51.92		
5	Kec. Lawang Kidul	3,540	3,262	3,182	2,750	2,750	77.68	77.68		
6	Kec. Muara Enim	3,069	5,109	5,011	3,383	3,383	110.23	110.23		
7	Kec. Ujan Mas	1,263	740	677	558	558	44.18	44.18		
8	Kec. Benakat	541	305	305	241	241	44.55	44.55		
9	Kec. Gunung Megang	1,723	334	59	44	44	2.55	2.55		
10	Kec. Belimbang	1,177	790	790	567	567	48.17	48.17		
11	Kec. Rambang Dangku	2,367	1,419	1,322	1,095	1,095	46.26	46.26		
12	Kec. Rambang	1,396	349	349	280	280	20.06	20.06		
13	Kec. Lubai	1,319	612	557	447	447	33.89	33.89		
14	Kec. Lubai Ulu	1,602	1,014	1,014	827	827	51.62	51.62		
15	Kec. Lembak	965	964	779	665	665	68.91	68.91		

16	Kec. Kelekar	528	282	259	226	226	43.55	43.55
17	Kec. Belida Darat	464	48	48	30	30	4.89	4.89
18	Kec. Gelumbang	2,897	2,792	2,724	2,240	2,240	77.32	77.32
19	Kec. Sungai Rotan	1,859	670	644	509	509	27.38	27.38
20	Kec. Muara Belida	471	43	43	36	36	7.64	7.64
21	Madrasah Aliyah		2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	
Total		29,800	23,660	22,508	18.001	17,966	60.41	60.29

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/MA/Paket C Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik 1.1.a.2 berikut :

Grafik 1.1.a.2
Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/MA/Paket C Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



1.1a.3. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia



Dini (PAUD) dengan target 97,36 persen, terrealisasi 36,32 persen.

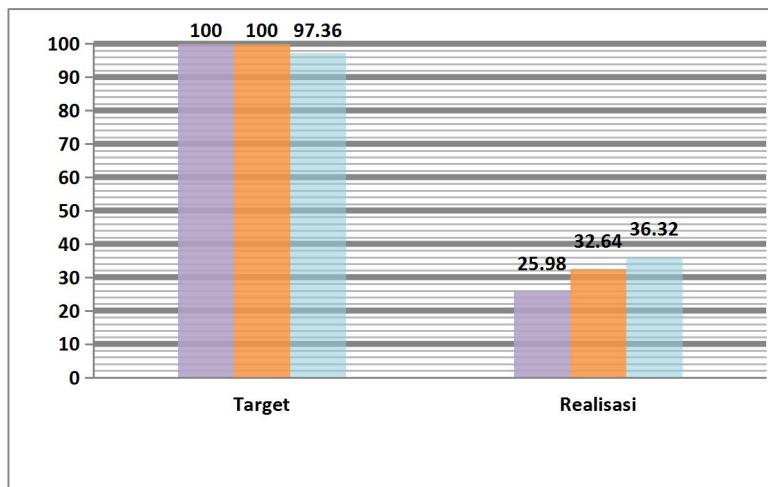
Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah siswa usia jenjang taman kanak - kanak dengan jumlah anak usia 4 –

6 tahun . Pada tahun 2016 jumlah anak usia 4 – 6 tahun berjumlah 30.838 jiwa, sementara jumlah siswa usia jenjang taman kanak - kanak di Kabupaten Muara Enim berjumlah 11.201 siswa sehingga Tingkat

partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 36.32 persen.

Pencapaian Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik 1.a.3 berikut :

Grafik 1.a.3
Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



1.1.a.4. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Keberhasilan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Muhammad Rabain Kabupaten Muara Enim merealisasikan 40 MoU, atau capaian kinerja 100 persen.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Muhammad Rabain Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 melalui program kemitraan



peningkatan pelayanan kesehatan melaksanakan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak ketiga sebanyak 40 MoU. Mou tersebut diajukan oleh pihak ketiga kepada RSUD dr. H. Muhammad Rabain terkait pelayanan kesehatan yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Daftar kerjasama atau MoU antara RSUD

dr. H. Muhammad Rabain dan Pihak ke III tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1a.3 berikut :

**Tabel.1.1.a.3
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

NO	PIHAK KE III	BIDANG KERJASAMA	TGL & NO KERJASAMA (MoU / MoA)	MASA BERLAKU (MoU / MoA)	UP DATE STATUS JAN 2017	PERSYARATAN BEROBAT	KET
1	PT. Askes	Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan bagi peserta JKN	No : 445/20/RSUD-HMR/14, 153/KTR/III.03/13	s/d 31 Des 2017	Masih berlaku	Kartu BPJS, Rujukan	
2	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	Pelayanan Kesehatan Pensiunan (Rawat jalan, Rawat inap)	No : 445/449/RSUD-HMR/2014 No : 20/PKS/14400/HK.03/II/2012	24 Februari 2014 s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar/ Jaminan	Masih dilayani dalam proses perpanjangan
3	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	Pelayanan Kesehatan Karyawan Aktif (Rawat jalan, Rawat inap)	No : 445/434/RSUD-HMR/2013	Februari 2013 s/d Januari 2015	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar/ Jaminan	Masih dilayani
4	PT. Pama Persada Nusantara COB dengan BPJS (Coordination Of Benefit)	Pelayanan Kesehatan (rawat jalan, rawat inap)	445/1101/RSUD/V/2015 MTBU/HCGS/15/95/CT ADDENDUM 445/1154/RSUD/V/2016	s/d 31 Mei 2017	Masih Berlaku	Surat pengantar/ jaminan	
5	PT. Federal International Finance	Vendor Medical Check Up	No. 445/775/RSUD-HMR/V/2014 No.003/HRD/234/2014	28 April 2014 s/d 31 Des 2017	Masih Berlaku	Surat Pengantar	
6	PT. PLN Sektor Pembangkit Tanjung Enim	Pelayanan Kesehatan (rawat jalan, rawat inap)	445/2130/RSUD/XI/2015	s/d 31 Des 16	Tidak Berlaku Lagi	Surat jaminan	Masih dilayani dalam proses perpanjangan
7	PT. Musi Hutan Persada	Pelayanan Kesehatan (rawat inap)	No. 445/412/RSUD/III/2016	s/d 28 Februari 2017	Masih Berlaku	Surat pengantar	
8	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Divre III SS	Pelayanan Kesehatan (rawat jalan, rawat inap)	No : 445/1468/RSUD/2016	s/d 31 Desember 2017	Masih Berlaku	Surat jaminan	Khusus untuk Pegawai Aktif
9	Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper (TEL)	Pelayanan kesehatan (rawat jalan, rawat inap)	No. TEL-RSUD,ME/PK/VII/06 No. 445/769/PKS-1/VII/2006 Addendum :No.005/LGD/AM D/TEL/SITE/1/08	19 Juli 2006 s/d Tak terbatas	Masih Berlaku	Surat jaminan	
10	PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Kartu yg berlogo HealthiCARe)	Pelayanan Kesehatan (rawat jalan, rawat inap)	No : 0057/PKS/CAR-RS/PLB/II/2011 No : 800/1516/RSUD-HMR/2011	s/d Tak terbatas, kecuali salah satu pihak memutuskan	Masih Berlaku	Surat jaminan	
11	PT. Jasa Raharja	Pelayanan kesehatan kecelakaan Lalulintas	D/R/181/2014 445/805/RSUD-HMR/2014	1 April 2014 s/d 1 April 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	
12	BPJS Ketenagakerjaan (Trauma Center)	Pelayanan kesehatan kecelakaan kerja / penyakit akibat kerja	445/3128/RSUD/XII/2016	s/d 31 Des 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	
13	PT. Trakindo Utama	Pelayanan kesehatan (Rawat jalan rawat inap)	445/42/RSUD/II/2016	s/d 31 Des 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	
14	PMI Unit Donor Darah Kab. Muara Enim	Pelayanan transfusi darah	445/411/RSUD/II/2016	s/d 31 Desember 2018	Masih berlaku		
15	PT. Megatama Adikarya	Medical Check Up	056/PKS/IMI-RSUR/MCU/2015	s/d 30 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar	
16	PT. Prima Sarana Gemilang	Medical Check Up	445/1300/RSUD-HMR/2014	s/d 27 Maret 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	
17	PT. United Tractors	Pelayanan Kecelakaan kerja dan MCU	445/1935/RSUD/X/2015	s/d 31 desember 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	

18	PT. Kalimantan Prima Persada	Pelayanan kesehatan (Rawat Inap) dan MCU	445/2058/RSUD/X/2015	s/d 31 desember 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	
19	PT. Banjarsari Pribumi	Medical Check Up	445/2521/RSUD/XI/2015	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar	
20	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA)	Pelayanan kesehatan (Rawat jalan rawat inap)	445/140/RSUD/I/2016	s/d 31 Desember 2017	Masih berlaku	Surat Pengantar	
21	Inhealt	Pelayanan kesehatan (Rawat jalan rawat inap)	445/1085/RSUD/VI/2016	s/d 31 Maret 2018	Masih berlaku	Surat Pengantar	
22	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Pelayanan Kesehatan (Rawat jalan, rawat inap)	445/521/RSUD/III/2016	s/d 9 Maret 2018	Masih berlaku	Surat Pengantar	
23	PT. Taspen	Perawatan peserta jaminan kecelakaan kerja (Aparatur Sipil Negara/ASN_)	445/2245/RSUD/VI/2016	s/d 31 Desember 2018	Masih berlaku	Surat jaminan	
24	Dinkes Kab Muara Enim	Pelayanan Kesehatan Jamsoskes	445/1642/RSUD/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar	Masih dilayani dalam proses perpanjangan
25	Dinkes PALI	Pelayanan Kesehatan Jamsoskes	445/1068/RSUD/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar	Masih dilayani dalam proses perpanjangan
26	Dinkes Kota Pagar Alam	Pelayanan Kesehatan Jamsoskes	800/459/kes/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar	Masih dilayani dalam proses perpanjangan
27	Dinkes Kab Empat Lawang	Pelayanan Kesehatan Jamsoskes	440022,b/KES/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi	Surat Pengantar	Masih dilayani dalam proses perpanjangan
28	Dinkes Kab. Muara Enim	Pelayanan rujukan tingkat lanjutan	445/2831/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
29	RSUD Empat lawang	Pelayanan rujukan tingkat lanjutan	445/20171/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
30	RSUD Lahat	Pelayanan rujukan tingkat lanjutan	445/2819/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
31	RSUD Basemah Pagar Alam	Pelayanan rujukan tingkat lanjutan	445/2818/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
32	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Pemeriksaan Rujukan laboratorium	445/27868/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
33	RSUP Mohamad Hoesin	Pelayanan rujukan tingkat lanjutan	445/2522/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
34	RS Siti Khadijah	Pelayanan rujukan tingkat lanjutan	445/2524/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku	Surat Rujukan	
35	Kantor Kementerian Agama Muara Enim	Bimbingan Rohani Bagi Pasien	445/2560/RSUD/XI/2016	s/d 31 Desember 2019	Masih berlaku		
36	dr. M. Iskandar, Sp. PD	Penyelenggaraan pelayanan kes dokter spesialis Penyakit Dalam	445/553/RSUD/III/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi		Dalam proses perpanjangan
37	dr. Erna Purbasari, M. K3	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dokter Kesehatan Kerja	445/1469/RSUD/VIII/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi		Dalam proses perpanjangan
38	Universitas Sriwijaya	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	445/2436/RSUD-HMR/2014	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi		Dalam proses perpanjangan
39	dr. Irene Hakim, MM	Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi	445/1376/RSUD-HMR/2015	s/d 31 Desember 2017	Masih berlaku		
40	dr.H. Muhamad Muin, Sp. PD-KVV	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dokter spesialis konsultan kardiovaskular	445/40/RSUD/II/2016	s/d 31 Desember 2016	Tidak Berlaku Lagi		Dalam proses perpanjangan

1.1.a.5. Program jaminan kesehatan

Keberhasilan program jaminan kesehatan tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan target 60 persen, terealisasi 100 persen.



RSUD dr. H. Muhammad Rabain pada tahun 2016 melalui program jaminan kesehatan telah memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada pasien keluarga miskin di Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2016 pasien keluarga miskin yang datang ke RSUD dr. H. Muhammad Rabain berjumlah 19.863 keluarga miskin, dan telah mendapat pelayanan dari RSUD dr. H. Muhammad Rabain atau 100 persen terlayani.

1.1.a.6. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Keberhasilan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dengan target 50 persen, realisasi 57,35 persen.

Pencapaian realisasi 57,35 persen cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin didapat dari jumlah kunjungan pasien



masyarakat miskin di puskesmas tahun 2016 sebanyak 42.483 yang terdiri dari rawat jalan sebanyak 35.324 kunjungan dan rawat inap sebanyak 187 kunjungan.

Keluarga miskin merupakan keluarga yang sangat rentan terhadap masalah kesehatan sebab kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan sangat terbatas terutama biaya, oleh karena itu keluarga miskin (GAKIN) perlu dan layak mendapat jaminan kesehatan.

Jamkesmas diselenggarakan pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal, efektif dan efisien. Sejak diluncurkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanggal 1 Januari 2014 dengan BPJS Kesehatan sebagai pelaksana peserta Jamkesmas bertransformasi menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran). Masyarakat miskin yang menjadi tanggungan PBI pada tahun 2016 berjumlah 202.683 jiwa penduduk miskin. Kepersertaan jamkesmas pada tahun 2016 di Kabupaten Muara Enim mengalami penambahan 9.069 jiwa atau 1,04 persen dibanding tahun 2015. Pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnose pengobatan rehabilitasi medik tingkat pertama (dasar) dan tingkat lanjut.

Pencatatan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dalam Kabupaten Muara Enim tahun 2016 berjumlah 42.483 pasien rawat jalan dan 187 jiwa tercatat sebagai pasien rawat inap di puskesmas. Jumlah ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 35.324 untuk rawat jalan dan 161 untuk rawat inap

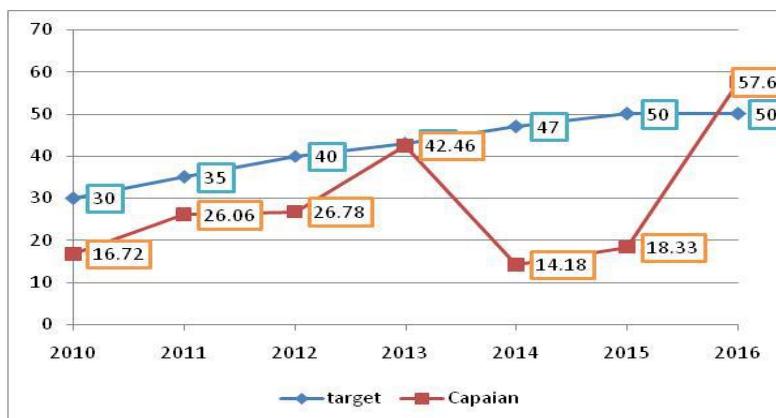
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.a.6 berikut :

Tabel.1.a.6
Pelayanan Dasar bagi Pasien Masyarakat Miskin
di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010 - 2016

No.	Tahun	Jumlah Maskin	Pelayanan Dasar Maskin	
			Rawat Jalan	Rawat Inap
1.	2010	197.686	32.939	105
2.	2011	219.651	57.088	159
3.	2012	225.611	60.345	83
4.	2013	256.174	92.895	181
5.	2014	191.101	26.959	148
6.	2015	193..614	35.324	161
7.	2016	74.081	42.483	187

Data pada Tabel 1.1.a.6 diatas memperlihatkan adanya penyusutan jumlah masyarakat miskin yang menjadi PBI. Tabel yang sama juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat miskin tahun 2016 baru 57,60 persen dari total jumlah masyarakat miskin yang ada di kabupaten Muara Enim. Secara umum, sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 pemanfaatan program jamkesmas di kabupaten Muara Enim masih di bawah 50 persen, namun pada tahun 2016 pemanfaatan program jamkesmas telah melebihi angka 50 persen. Cakupan pelayanan dasar bagi pasien masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.1.a.6 berikut :

Grafik 1.1.a.6
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin
Di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010-2016



1.1.a.7. Program Standarisasi pelayanan kesehatan

Keberhasilan program Standarisasi pelayanan kesehatan tahun 2015 diukur dengan Indikator kinerja Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar dengan target 80 persen, terealisasi 82,65 persen.

RSUD dr. H. Muhammad Rabain tahun 2015 melalui program standarisasi pelayanan kesehatan telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan memberikan perawatan kepada pasien yang dirawat selama 66.367 hari perawatan melampaui target hari perawatan yang ditetapkan RSUD dr. H. Muhammad Rabain selama 64.240 hari perawatan.

1.1.a.8. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Keberhasilan program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dengan target 4: 100.000, terealisasi 3,74 : 100.000.

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu dari komponen sumber daya kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan di masyarakat. Fasilitas kesehatan yang secara langsung menjadi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di masyarakat adalah puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.

a. Puskesmas

Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi sebagai (1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; (2) pusat pemberdayaan masyarakat; (3) pusat pelayanan masyarakat primer (strata satu); (4) pusat pelayanan perorangan primer.

Wilayah kerja puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu kecamatan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan.



Sasaran penduduk yang dapat dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 25.000 - 30.000 penduduk. Namun, faktor luas wilayah, kondisi geografis, kepadatan penduduk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Jumlah puskesmas

dalam kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2016 tercatat 21 puskesmas. Perkembangan jumlah puskesmas di Kabupaten Muara Enim dalam 8 (delapan) tahun terakhir dijelaskan pada Tabel 1.1.a.8 berikut :

Tabel 1.1.a.8
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 – 2016

NO	Kecamatan	Puskesmas	Status		Tahun								
			P	NP	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	SEMENDE DARAT ULU	PAJAR BULAN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	SEMENDE DARAT TENGAH	TANJUNG RAYA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	SEMENDE DARAT LAUT	PULAU PANGGUNG	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	TANJUNG AGUNG	TANJUNG AGUNG	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	MUARA ENIM	MUARA ENIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	UJAN MAS	UJAN MAS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	GUNUNG MEGANG	GUNUNG MEGANG	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		SUMAJA MAKMUR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BELIMBING	TELUK LUBUK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	BENAKAT	BENAKAT		✓								✓	✓
11	RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MUARA EMBURUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	RAMBANG	SUGIH WARAS	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	LUBAI	BERINGIN	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	LUBAI ULU	SUMBER MULIA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	LEMBAK	LEMBAK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	BELIDA DARAT	BELIDA DARAT		✓									✓
17	GELUMBANG	GELUMBANG	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	KELEKAR	Kelekar		✓					✓	✓	✓	✓	✓
19	SUNGAI ROTAN	SUKARAMI	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	MUARA BELIDA	MUARA BELIDA		✓								✓	✓
JUMLAH			7	14	22	22	23	24	25	25	19	21	21

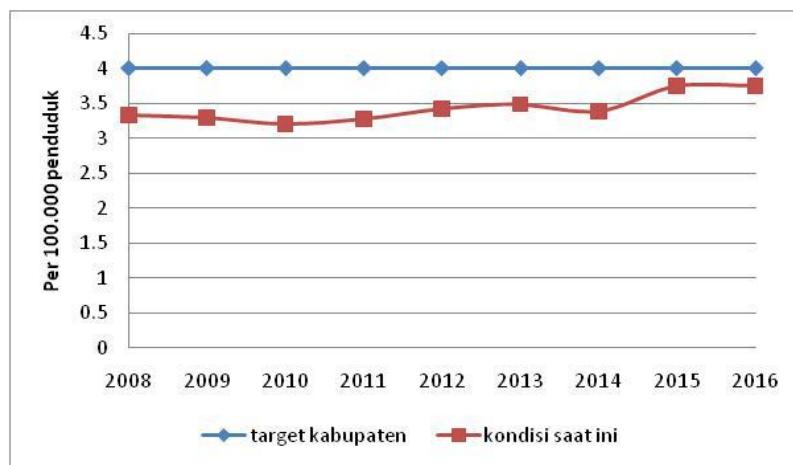
*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2016
P : Perawatan; NP : Non Perawatan*

Jumlah puskesmas di kabupaten Muara Enim berdasarkan data pada Tabel 1.1.a.8 diatas menunjukkan peningkatan mulai tahun 2010. Operasional seluruh puskesmas telah berjalan sepenuhnya namun yang terregistrasi di Kementerian Kesehatan RI baru tercatat 19 puskesmas. 2 (dua) puskesmas yang baru dibangun 2015 baru akan beroperasi pada tahun 2016 namun registrasi puskesmas belum keluar dari Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas

per 100.000 penduduk. Terkait faktor kondisi geografis dan luas wilayah, target rasio puskemas di kabupaten Muara Enim adalah 4 per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2008 - 2016 terjadi peningkatan rasio puskesmas. Rasio puskesmas pada tahun 2008 sebesar 3.33 meningkat menjadi 3,74 pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan upaya pemerataan puskesmas dalam menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya, seperti terlihat pada grafik 1.1.a.8a berikut:

Grafik 1.1.a.8a
Perkembangan Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk
Di kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 - 2016



Data perkembangan rasio berdasarkan Grafik 1.1.a.8a diatas menunjukkan bahwa sampai tahun 2016 satu unit puskesmas di kabupaten Muara Enim menjangkau 26.725 sasaran penduduk dalam wilayah kerjanya.

b. Puskesmas Pembantu (pustu)

Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan yang lebih sederhana yang disebut puskesmas pembantu (pustu). Pustu merupakan unit penunjang dengan ruang lingkup wilayah kerja yang lebih kecil. Wilayah kerja pustu diperkirakan 2 sampai 3 desa dengan sasaran penduduk antara 2.500 jiwa (luar Jawa Bali) sampai 10.000 jiwa (diperkotaan Jawa Bali).

Seperti halnya puskesmas, faktor luas wilayah, kondisi geografis, kepadatan penduduk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja pustu. Sampai dengan tahun 2016, pustu yang ada di

kabupaten Muara Enim tercatat 90 unit, jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 ini dikarenakan tidak adanya pembangunan puskesmas pembantu selama tahun 2016.

Gambaran jumlah dan kondisi Pustu yang ada di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1.a.8b berikut:

Tabel 1.1.a.8b
Kondisi Pustu di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH PUSTU	KONDISI PUSTU			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Total
1	Pajar Bulan	4	2	1	1	
2	Tanjung Raya	3		1		2
3	Pulau Panggung	5		2	3	
4	Tanjung Agung	9	3	3	3	
5	Tanjung Enim	3	3			
6	Muara Enim	9	3	4	2	
7	Ujan Mas	4	1	3		
8	Gunung Megang	3	1	1		
9	Benakat	1		1		
10	Teluk Lubuk	3	2		1	
11	Sumaja Makmur	5		2	2	1
12	Tebat Agung	4	1	2	1	
13	Muara Emburung	6	1	1	3	1
14	Beringin	1		1		
15	Sugih Waras	5	2		3	
16	Sumber Mulya	9	2	5	2	
17	Gelumbang	7		4	3	
18	Lembak	3			2	1
19	Suka Rami	4		1	1	2
20	Kelekar	1			1	
21	Muara Belida	2	1		1	
	Jumlah	90	22	32	29	7

Sumber: Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2016

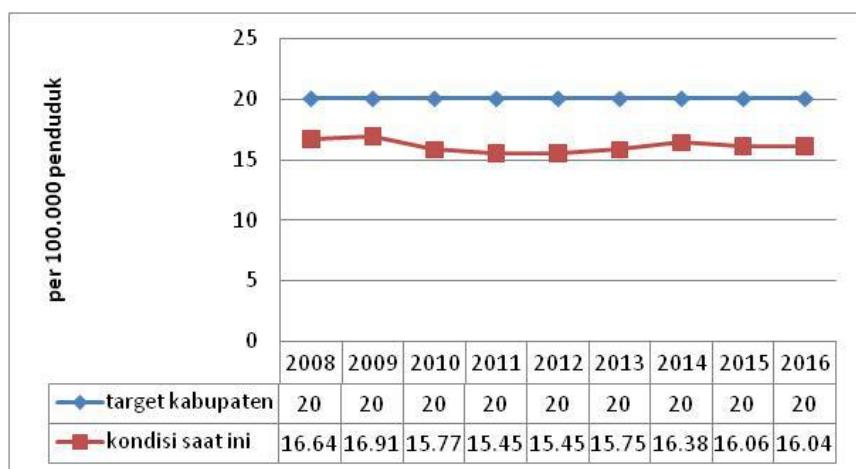
Kondisi pustu sampai dengan akhir tahun 2016 berdasarkan data pada Tabel 1.1.a.8b diatas memperlihatkan bahwa 24,44 persen dalam kondisi baik dan 75,56 persen dalam kondisi rusak. Sebanyak 7,78 persen kondisi pustu dalam keadaan rusak total. Kerusakan ini merupakan kerusakan yang perlu penanganan pada lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan. Penyebab rusaknya bangunan adalah faktor alam, umur bangunan atau karena keperluan desain untuk mengoptimalkan fungsi jaringan, baik saluran maupun bangunan.

Kerusakan ini menyebabkan penurunan fungsi saluran dan bangunan serta menyebabkan sistem hampir tidak berfungsi.

Keterjangkauan pustu dengan sasaran penduduk dapat diketahui dengan indikator rasio pustu terhadap 100.000 penduduk. Dengan faktor pengaruh yang sama pada puskesmas, target rasio pustu di kabupaten Muara Enim adalah 20 unit per 100.000 penduduk. Rasio pustu pada tahun 2008 adalah 16,64 per 100.000 penduduk menjadi 16,04 per 100.000 penduduk pada tahun 2016.

Perkembangan rasio keterjangkauan pustu di Kabupaten Muara Enim dalam 8 (delapan) tahun terakhir dipaparkan pada Grafik 1.1.a.8b berikut :

Grafik 1.1.a.8b
Perkembangan Rasio Pustu di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 - 2016



Perkembangan keterjangkauan pustu terhadap sasaran penduduk sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Grafik 1.1.a.8a belum menunjukkan kemajuan sesuai dengan target yang hendak dicapai. Kondisi pustu yang lebih dari 50 persen dalam keadaan rusak menyebabkan pembangunan pustu difokuskan pada rehabilitasi dan revitalisasi pustu yang ada. Keterjangkauan sasaran pelayanan kesehatan penduduk yang berada di luar jangkauan pustu dilakukan usaha kesehatan bersama di setiap desa/kelurahan dengan poskesdes sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan.

1.1.a.9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru – paru/rumah sakit mata

Keberhasilan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru – paru/rumah sakit mata tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja rasio rumah sakit persatuan penduduk dengan target 1 : 500.000, realisasi 2 : 500.000 penduduk.

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat memerlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain promotif dan preventif. Upaya tersebut diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk persero atau perseroan terbatas.

Rumah sakit publik di Kabupaten Muara Enim dikelola pemerintah kabupaten Muara Enim. Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat di kabupaten Muara Enim dikelola oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam. Jenis pelayanan di rumah sakit dalam kabupaten Muara Enim bersifat melayani semua bidang dan jenis penyakit. Perkembangan Jumlah rumah sakit di kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam Tabel 1.1.a.9 berikut :

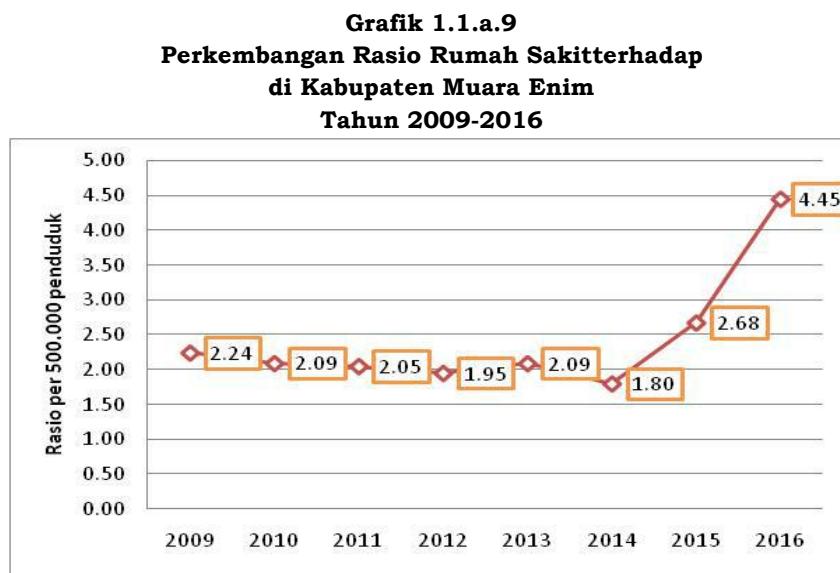
Tabel 1.1.a.9
Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Menurut Kepemilikan dan Jenis Layanan
di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No.	Pengelola/Kepemilikan	Jenis Pelayanan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Publik						
	Pemkab Muara Enim	Umum	2	2	1	2	4
	Jumlah Publik		2	2	1	2	4
2	Privat						
	Bukit Asam	Umum	1	1	1	1	1
	Jumlah Privat		1	1	1	1	1
	Jumlah		3	3	2	3	5

Berdasarkan data pada Tabel 1.1.a.9 diatas terjadi peningkatan jumlah rumah sakit publik di kabupaten Muara Enim. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 telah dibangun 1 (satu) unit rumah sakit pratama di desa Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan pada tahun 2016 juga telah dibangun kembali 2 (dua) unit rumah sakit pratama di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Semende Darat Tengah tetapi rumah sakit pratama tersebut baru berupa bangunan fisik sehingga belum dapat dioperasikan untuk pelayanan kesehatan.

Keterjangkauan pelayanan rumah sakit jika dilihat dari faktor kependudukan diketahui melalui indikator rasio satu rumah sakit terhadap 500.000 penduduk.

Perkembangan rumah sakit di Kabupaten Muara Enim menurut rasio terhadap jumlah penduduk dalam 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat melalui Grafik 1.1.a.9 berikut:



Data pada grafik 1.1.a.9 diatas mengilustrasikan bahwa setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Muara Enim melayani sedikitnya 112.245 penduduk. Angka ini sudah berada di atas angka ideal rasio rumah sakit terhadap penduduk. Namun, masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga kesehatan di rumah sakit mengakibatkan pelayanan menjadi tidak prima. Di masa mendatang dengan adanya optimisasi sarana, prasarana dan jumlah

tenaga kesehatan yang berkompetensi diharapkan rumah sakit dapat melakukan pelayanan prima.

1.1.a.10. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Keberhasilan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja



Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dengan target 57 persen, terealisasi 56,84 persen dan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan target 42 persen, terealisasi 43,15 persen.

Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 sebanyak 8.564 orang. Dari 8.564 orang tersebut sebanyak 4.868 orang berpartisipasi di lembaga pemerintah (Pegawai Negeri Sipil), atau 56,84 persen, dan 3.696 orang berpartisipasi di lembaga swasta, atau 43,15 persen. Partisipasi perempuan di Kabupaten Muara Enim dapat di lihat dari table 1.1.a.10 berikut:

**Tabel 1.1.a.10
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

Partisipasi Perempuan	Jumlah	%
Lembaga Pemerintah	4.868 orang	56,84
Lembaga Swasta	3.696 orang	43,15

1.1.a..10. Program pembinaan dan permasyarkatan olahraga

Keberhasilan program pembinaan dan permasyarkatan olah raga tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja jumlah prestasi olah raga



dengan target 65 prestasi. Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada tahun 2016 melalui program pembinaan dan permasyarakatan olah raga telah memperoleh 70 prestasi di bidang olahraga di

berbagai cabang olah raga yang dikuti yaitu cabang sepak takraw, taekwondo, bola basket, wushu, balap sepeda, karate, renang, dan pencak silat, bulutangkis. Pencapaian 70 prestasi olah raga yang didapat Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 65 prestasi olah raga atau 107 persen.

Prestasi olah raga yang didapat Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat dari table 1.1.a.14 di bawah ini:

Tabel 1.1.a.10
Jumlah Prestasi Olah Raga di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No	Nama Atlet	P/L	Prestasi / Juara	Juara Kegiatan/Tanggal/Tempat	Ket/Cabor
1	Arya Sutawijaya	L	3 Emas, 4 Perak	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
2	Krismanian PDH	L	1 Emas, 1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
3	Fadil Zam	L	1 Emas, 1 Perak	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
4	Salsabilah Fahira	P	2 Perak	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
5	Dio Zaldi Islah	L	1 Perak, 1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
6	M. Adietya Rindu Wijaya	L	1 Emas, 1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
7	Tesya Anggraini	P	1 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
8	Novi Ariska	P	1 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
9	Andi Prasetyo	L	1 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
10	Artsy	L	1 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
11	Tia Bonita	P	1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
12	Rajab	L	1 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
13	Nizar Fahmi	L	1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
14	Tina	P	1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
15	Carisma	P	1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
16	Bima	L	1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
17	Aufar	L	1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
18	Firand Andisa	L	1 Perak	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
19	Firand Stevando	L	1 Perak, 1 Perunggu	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
20	M. Dennis Reyes	L	1 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
21	Almen Rosid	L	1 Perak	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU

22	M. Hafis	L	1 Perak	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
23	Nabila	P	2 Emas	Open Turnamen Wushu Nasional Bupati Cup	WUSHU
24	Abi	L	1 Perunggu	Kejuaraan Pospenas Bantol	Pencak Silat
25	Joko Purnomo	L	1 Perunggu	Kejuaraan Porwil Jakarta	Pencak Silat
26	Aulia Sepriatina Salaswati	P	1 Perak	Kejuaraan o2SN Propinsi	Pencak Silat
27	David	L	1 Perunggu	Kejuaraan Pospenas	Pencak Silat
28	M. Jonatan Ski Bisma	L	1 Perunggu		Pencak Silat
29	M. Sutrisno	L	1 Emas (Beregu Putra Muara Enim A)	Kejuaraan Bupati Cup Lahat Bulan Februari 2016	Sepak Takraw
30	Sangkut E. Saputra	L	1 Emas (Beregu Putra Muara Enim A)	Kejuaraan Bupati Cup Lahat Bulan Februari 2016	Sepak Takraw
31	Bonni	L			
32	Yudha Pratama	L			
33	M. Ikbal	L			
34	Kamrullah	L	1 Perunggu (Beregu Putra Muara Enim B)	Kejuaraan Bupati Cup Lahat Bulan Februari 2016	Sepak Takraw
35	Arif Sandi	L			
36	Tommy Fahrorozy	L			
37	Dimas Pratama	L			
38	Rico	L	1 Emas (Beregu Putri Muara Enim)	Kejuaraan Bupati Cup Lahat Bulan Februari 2016	Sepak Takraw
39	Sri Rahmayanti	P			
40	Mutiara				
41	Ramiza Muliana	P			
42	Yolanda	P	1 Emas 2 Perak 2 Perunggu	Olimpiade Siswa Nasional Wakil Sumsel dan KEJURPROP Palembang	Bulu Tangkis
43	Ida Mawaddah	P			
44	Riski Maulana	L			
45	Sandi Rivan	L			
46	Velincia / Gint Salilec	P	3 Perak 1 Perunggu	POPDA SUM-SEL	Renang
47	Sandi / Duas Tio	L			
48	M. Azis	L	2 Perunggu	O2SN SD	Renang
49	Danang SW	L	O2SN SMP		
50	Nabila	P	1 Perak 3 Perunggu	O2SN SMP	Renang
51	Randi Noperli	L	1 Emas 3 Perak 1 Perunggu	KEJURDA PUALA PUSRI PUTRA-PUTRI	Tinju
52	Hanif	L			
53	Eilin Vivia	P			
54	Tria Puja Rahayu	P			
55	Taufik	L	2 Perak	Kejuaraan Adventure di Rejang Lebong	ISSI (Sepeda)
56	Elsi	P			
57	Budi	L			
58	Robin Suminto	L	Juara 1 (emas)		
59	Kardiyantoyo	L	Peringkat 1 (Umum)	KEJURNAS di Surabaya	Taekwondo
60	Tri Puspo Aji	L	Juara 3 (Perunggu)		
61	Damas	L	Peringkat 5		
62	Al Rizki Habibillah Dini	L	Peringkat 7 (Pelajar)		
63	Yessyka Febyola	P	1 Perak	Open Turnamen Nineball	Taekwondo
64	Intan Avrikasari	P	1 Perak		Taekwondo
65	Rico Puwiciang	L	Juara 2 (Perak)	Billiard	

			1 Perunggu	se SUMBAGSEL di Palembang	(POBSI)
66	Julianto Dw Purnomo	L	Juara I Pemula Pelajar Putra	Universitas PGRI Climbing Open Tournament Nasional	Panjat Tebing
67	Winda Oktarina	P	Juara II Speed Clasic Putri	Serasan Sekundang Climbing Competition Nasional	Panjat Tebing
68	Parlan Antoni	L	Juara I Pemula Pelajar Putra	Muara Enim Open Climbing	Panjat Tebing
69	Desy Robiansyah	P	Juara III Pemula Pelajar Putra	Muara Enim Open Climbing	Panjat Tebing
70	Mahendra	L	Juara II Pemula Pelajar Putra	Muara Enim Open Climbing	Panjat Tebing

Pencapaian prestasi olahraga Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebanyak 70 prestasi olahraga, menurun di bandingkan pencapaian prestasi olahraga tahun 2015 sebanyak 191 prestasi olahraga, ini dikarenakan adanya penundaan beberapa tournament olahraga.

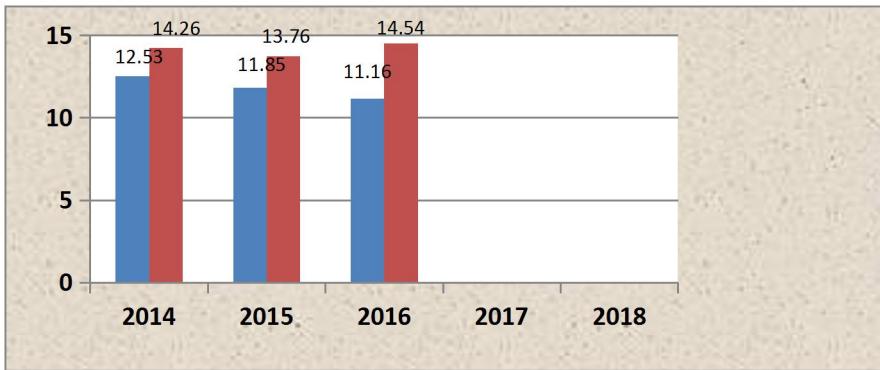
Sasaran 1.b : Menurunnya Angka Kemiskinan

Prestasi capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu persentase masyarakat miskin dengan target 11,16 persen, terealisasi 14,54 persen.

Masyarakat miskin Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016 sebesar 14,54 persen dengan penduduk miskin berjumlah 86,950 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan tahun 2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 13,76 persen. Dengan pencapaian masyarakat miskin sebesar 14,54 persen, maka target indikator menurunnya masyarakat miskin 2016 dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Muara Enim dengan target persentase masyarakat miskin 11,16 persen tidak tercapai, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti inflasi secara nasional dan jatuhnya harga jual karet.

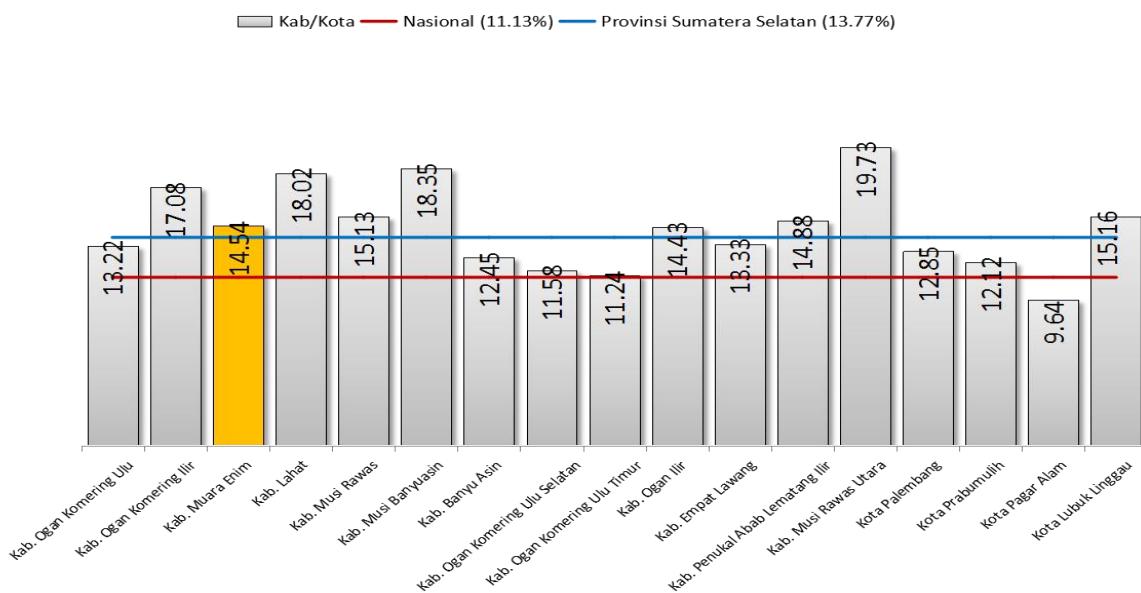
Pencapaian persentase masyarakat miskin tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 1.b dibawah ini :

Grafik 1.b
Sasaran II Menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014-2016



Tingkat penurunan masyarakat miskin tahun 2016 Kabupaten Muara Enim sebesar 14,54 masih dibawah Capaian Propinsi Sumatera Selatan sebesar 13,77 persen dan Capaian masyarakat miskin Nasional sebesar 11,13 persen. Posisi relative persentase penduduk miskin tahun 2016 Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan dan Nasional dapat dilihat pada Grafik 1.b1 dibawah ini:

Grafik 1.b1
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional 2016



Untuk mencapai target masyarakat miskin 14,54 persen tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah diantaranya Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, PMKS dan lainnya dengan indikator Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan indikator Persentase kajian perencanaan pembangunan

ekonomi yang ditindaklanjuti. Program perencanaan sosial budaya dengan indikator Persentase kajian perencanaan sosial dan budaya yang ditindaklanjuti. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator Persentase koperasi aktif. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Koperasi dan UKM.

1.b.1. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Keberhasilan program pengelolaan keragaman budaya tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan target 95 persen, terealisasi 95,29 persen atau 100,30 persen.

Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui



program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya memberikan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

sebanyak 43.540 jiwa dari jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Muara Enim sebanyak 45.690 jiwa, atau 95,49 persen. Pemberian bantuan kepada PMKS di Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 1.b.1.a berikut:

**Tabel 1.b.1.a
PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

No.	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Beras Miskin	32.241 jiwa
2.	KAT	97 KAT
3.	Bencana	1.990 jiwa
4.	Lanjut Usia	400 jiwa
5.	KUBE	200 KUBE
6.	Rumah Tidak Layak Huni	350 jiwa
7.	Orang Terlantar	48 jiwa
8.	Unit pelayanan sosial keliling	300 jiwa

9.	Program Keluarga Harapan	7.683 jiwa
10.	Sunat Massal	20 Jiwa
11.	Cacat dan Eks Trauma	211 Jiwa

Pencapaian PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.b.1.b di bawah ini :

Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian	
				2014	2015
Percentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	95%	95,29%	100,30%	94,69%	95,49%

1.b.2. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Keberhasilan program perencanaan pembangunan ekonomi tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja Jumlah kajian perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target 4 kajian, terealisasi 4 kajian atau 100 persen.

Pemerintah Kabupaten Muara tahun 2016 melalui program perencanaan pembangunan ekonomi telah melaksanakan 4 (empat) kajian perencanaan pembangunan ekonomi yaitu :

1. Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah;

Maksud Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah dengan partisipasi masyarakatnya dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukannya kegiatan Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan tujuan untuk memberikan arahan/landasan untuk pengambilan kebijakan dalam penetapan program/kegiatan sebagai upaya mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim.

Hasil kajian Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai bahan penyusunan program/kegiatan kedepan.

2. *Koordinasi Pengendalian Implemetasi Program Gerbang Serasan;*

Tujuan Koordinasi Pengendalian Implemetasi Program Gerbang Serasan tahun 2016 yaitu untuk mendapatkan informasi tentang dampak dari Program Gerbang Serasan terhadap kondisi ekonomi masyarakat peserta dengan indikator:

- Peningkatan pendapatan masyarakat Program Gerbang Serasan;
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan adanya Program Gerbang Serasan;
- Jumlah penerima manfaat khususnya pelaku usaha dalam rantai nilai (*value chain*) dari kegiatan UMKM pada Program Gerbang Serasan.

Hasil Koordinasi Pengendalian Implemetasi Program Gerbang Serasan akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai bahan penyusunan program/kegiatan kedepan

3. *Penyusunan Inflasi Kabupaten Muara Enim*

Tujuan Penyusunan Inflasi Kabupaten Muara Enim tahun 2016 adalah:

- a. Memperoleh paket komoditas (pakom) Kabupaten Muara Enim;
- b. Memperoleh Diagram Timbang Kabupaten Muara Enim;
- c. Memperoleh Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di Kabupaten Muara Enim.

Hasil Penyusunan Inflasi Kabupaten Muara Enim akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai bahan penyusunan program/kegiatan kedepan.

4. *Koordinasi Penyelenggaraan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim.*

Tujuan Koordinasi Penyelenggaraan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim tahun 2016 adalah untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin pendirian dari Otoritas Jasa Keuangan. Pendirian Bank Perkreditan

Rakyat ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearahpeningkatan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2016 telah di operasikannya Bank Perkereditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.

5. *Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi*

Tujuan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi adalah untuk mencapai terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai bahan penyusunan program/kegiatan kedepan.

1.b.3. Program perencanaan sosial budaya

Keberhasilan program perencanaan sosial budaya tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja Jumlah kajian perencanaan sosial dan budaya yang ditindaklanjuti dengan target 7 kajian, terrealisasi 7 kajian atau 100 persen.

Untuk mencapai atau mewujudkan sasaran menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui program perencanaan sosial budaya telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan di pedesaan, koordinasi/evaluasi pencapaian MDG's Kabupaten Muara Enim, penyusunan indikator kesejahteraan rakyat kabupaten muara enim, kajian peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan daerah, penyusunan perencanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga, penyusunan perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan monitoring pembangunan bidang sosial budaya.

Tujuan dari kegiatan program perencanaan sosial budaya tahun 2016 adalah:

- Untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan sektor dan kewilayaan, sehingga pembangunan yang ada bisa tepat sasaran dan tepat guna;

- Untuk bahan evaluasi penyusunan program/kegiatan bidang sosial budaya khusunya program yang terkait dengan pencapaian target MDG's;
- Untuk mengetahui nilai indeks kesejahteraan rakyat yang ada di kabupaten muara enim;
- Untuk mengetahui kondisi saat ini mengenai kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan dan upaya – upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatannya;
- Untuk menyusun pedoman perencanaan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2017;
- Untuk mengetahui kondisi saat ini dan upaya – upaya yang harus dilakukan dalam percepatan pembangunan dipedesaan khususnya terkait dengan pelaksanaan, perencanaan dan pemantauan alokasi dana desa dan dana desa;
- Untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan pembangunan bidang sosial budaya ditingkat kecamatan.

1.b.4. Program peningkatan pengetahuan pengelola koperasi dan pelaku UMKM

Pencapaian Program peningkatan pengetahuan pengelola koperasi dan pelaku UMKM tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen dengan target 71 persen, dan persentase UMKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen dengan target 72 persen.

1. Koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen.

Berbagai usaha dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim guna meningkatkan kemampuan para stakeholder koperasi agar dapat menjalankan usaha koperasi sesuai dengan kaidah manajemen

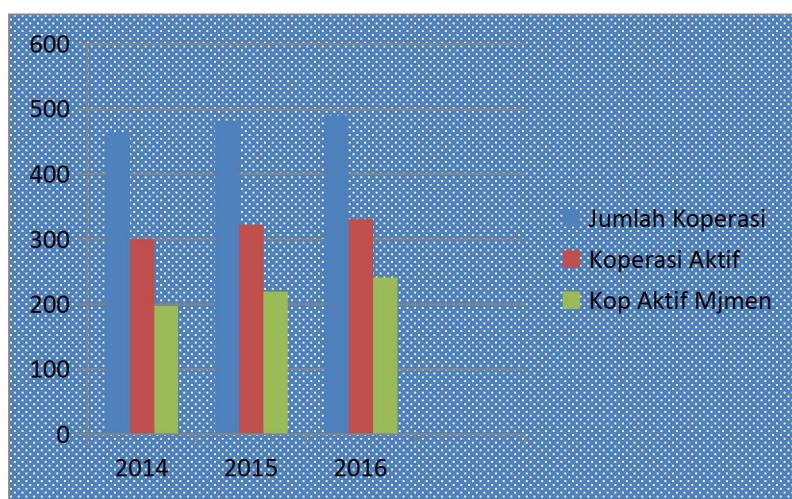


antara lain melalui berbagai pelatihan yang diperuntukan bagi pengurus, anggota dan badan pengawas Koperasi, melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi.

Tanpa adanya tatakelola usaha koperasi yang baik, maka dapat dipastikan lembaga koperasi akan mengalami berbagai permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal bahkan pada akhirnya akan berujung pada matinya lembaga/usaha koperasi tersebut. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah koperasi yang mengelola usaha sesuai dengan kaidah manajemen yaitu meningkat sebesar 74,79 persen atau berjumlah 241 koperasi, hal tersebut timbul karena adanya penambahan jumlah koperasi yang baru didirikan sebanyak 9 (sembilan) koperasi. Peningkatan koperasi yang mengelola usaha sesuai dengan kaidah manajemen sebesar 74,79 persen tersebut melebihi target yang diharapkan yaitu 71 persen atau 228 koperasi atau tercapai 103,87 persen. Peningkatan koperasi yang mengelola usaha sesuai dengan kaidah manajemen tahun 2016 meningkat dari pencapaian pada tahun 2015, ini dapat dilihat pada tabel dan Grafik 1.b.4.1 di bawah ini :

No	Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi Aktif Yang Mampu Mengelola Usaha Sesuai Kaidah Manajemen		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2015	322	218 (68%)	219 (68,01%)	100
2	2016	331	228 (71%)	241 (74,79%)	103,88

Grafik 1.b.4.1
Peningkatan koperasi yang mengelola usaha sesuai dengan kaidah manajemen di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 - 2016



2. UMKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia memiliki slogan “UKM Kuat Negara Sejahtera”, slogan ini merupakan suatu misi yang harus dicapai guna mensejahterahkan kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan UKM. Mengingat selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga memiliki andil yang sangat besar terhadap kemajuan perekonomian bangsa.

UMK adalah salah satu dari sekian banyak faktor pendukung bergeraknya roda perekonomian bangsa Indonesia. Tentu saja setiap hari diharapkan pertumbuhan UKM akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan/kegagalan usaha ini. Tanpa mengetahui manajemen di dalam mengelola usaha, tentu saja mengakibatkan usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik (stagnasi) atau jalan ditempat bahkan cenderung mengalami kegagalan usaha. Untuk itu perlu adanya pemberian pengetahuan tentang mengelola usaha yang sesuai dengan kaidah manajemen. Pada tahun 2015 jumlah UKM binaan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4.123 UMKM, dari jumlah tersebut ditargetkan sebanyak 2.856 UMKM atau 69.28 persen telah menjalankan usaha sesuai dengan kaidah manajemen, sedangkan pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Muara Enim menargetkan peningkatan jumlah pelaku UMKM yang mengelola usaha sesuai kaidah manajemen sebesar 2.968 UMKM atau 72 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan UKM di Kabupaten Muara Enim meningkat cukup tinggi dari 4.123 UMKM menjadi 4.546 UMKM. Dari 4.546 UMKM tersebut sebanyak 3.013 UMKM atau 73.09 persen yang telah menjalankan usahanya menggunakan manajemen yang rapi.

Peningkatan UMKM yang mengelola usaha sesuai dengan kaidah manajemen tahun 2016 meningkat dari pencapaian pada tahun 2015, ini dapat dilihat pada tabel dan Grafik 1.b.4.2 di bawah ini :

No	Tahun	Jumlah UMKM Aktif	UMKM Aktif Yang Mampu Mengelola Usaha Sesuai Kaidah Manajemen		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2015	4.123	2.803 (68%)	2.856 (69,28%)	101,88
2	2016	4.546	2.968 (72%)	3.013 (73,09%)	101,51

Sasaran 1.c : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Prestasi capaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu ketersedian pangan utama beras 112,00 kg/kapita/tahun, daging 12,60 kg/kapita/tahun, telur 8,24 kg/kapita/tahun, ikan 33,70 kg/kapita/tahun, dan jumlah kelompok tani kelas utama dengan target 78 kelompok.

Pencapaian indikator kinerja ketersedian pangan utama tahun 2016 beras 104,77 kg/kapita/tahun atau dengan capaian 93,4 persen, daging 16,89 kg/kapita/tahun atau dengan capaian 134,04 persen, telur 14,54 kg/kapita/tahun atau dengan capaian 176,45 persen, ikan 41,54 kg/kapita/tahun atau dengan capaian 123 persen, kelompok tani kelas utama berjumlah 76 kelompok atau tercapai 97,43 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah diantaranya Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan, dan Program peningkatan ketahanan pangan. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (BP4K), dan Kantor Ketahanan pangan.

1.c.1 Program peningkatan ketahanan pangan

Pencapaian indikator kinerja ketersediaan pangan tahun 2016 adalah Pangan utama beras 104,77 kg/kapita/tahun atau tercapai 93,4 persen, Daging 16,89 kg/kapita/tahun atau tercapai 134,04 persen, telur 14,54 kg/kapita/tahun atau tercapai 176,45 persen, ikan 41,54 kg/kapita/tahun atau tercapai 123 persen.

Ketersediaaan pangan perkapita dihitung berdasarkan perbandingan antara ketersediaan pangan utama dengan jumlah penduduk/kapita. Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi ditambah perubahan cadangan dan impor dikurangi dengan ekspor.

a. Ketersediaan pangan utama beras.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 untuk ketersediaan pangan utama beras menargetkan 112,00 kg/kapita/tahun, terealisasi 104,77 kg/kapita/tahun atau 93,4 persen.

Pada tahun 2016 penyediaan beras di Kabupaten Muara Enim



bersumber dari produksi sebesar 62,303 ton, terjadi penurunan produksi beras dari tahun 2015 sebesar 63,569 ton, maka beras yang tersedia untuk konsumsi penduduk sebesar 62,303 ton atau setara dengan 104,77

kg/kapita/tahun. Menurunnya produksi padi pada tahun 2016 dikarenakan musim panas yang panjang yang mengakibatkan terjadinya kegagalan panen.

b. Ketersediaan pangan utama daging.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 untuk ketersediaan pangan utama daging menargetkan 12,60 kg/kapita/tahun, terealisasi 16,89 kg/kapita/tahun atau 134,04 persen.

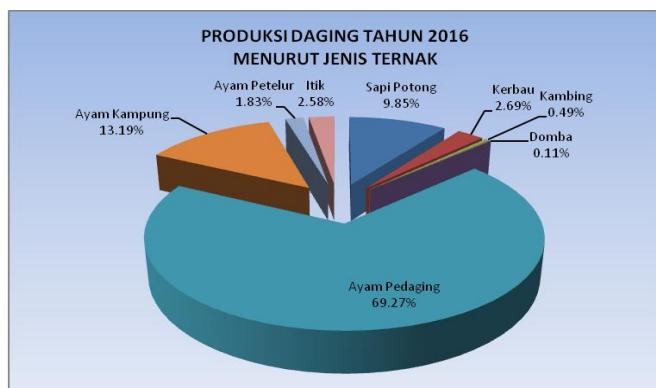
Pada tahun 2016 penyediaan daging sapi di Kabupaten Muara Enim yaitu sebesar 8.377 ton di tambah impor sebesar 2.300 ton meningkat dari tahun 2015 sebesar 7.339 ton dan impor sebesar 1.649 ton, dengan tingkat ketersediaan sebesar 3,67 gram/kapita/hari.



Penyediaan daging kerbau di Kabupaten Muara Enim sebesar 224 ton, dengan tingkat ketersediaan gram/kapita/hari yaitu sebesar 1,01 gram. Sedangkan penyediaan daging ayam ras sebesar 5,096 ton dengan

tingkat ketersediaan per gram/kapita/hari sebesar 19,27 gram.

Produksi daging tahun 2016 di Kabupaten Muara Enim sebesar 9.242,78 ton, mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 7,62 persen atau terjadi peningkatan sebesar 654,23 ton. Produksi daging di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 terdiri dari daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam pedaging, ayam kampong, ayam petelur dan itik, produksi daging terbesar berasal dari ayam ras pedaging sebesar 69,27 persen dari total produksi daging, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Capaian kinerja jumlah produksi daging di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 1.c.4
Jumlah Produksi Daging Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 – 2016



c. Ketersediaan pangan utama telur.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 untuk ketersediaan pangan utama telur menargetkan 8,24 kg/kapita/tahun, terrealisasi 14,54 kg/kapita/tahun atau 176,45 persen.

Pada tahun 2016 penyediaan telur untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari produksi sebesar 4.035 ton dan impor 1.300 ton sehingga total tersedia sebesar 5.335 ton atau setara dengan 26,54 gram perkapita perhari.

Produksi telur tahun 2016 sebesar 3.951,56 ton dari target yang ditetapkan sebesar 2.425,64 ton atau terealisasi 162,91 persen, namun dibandingkan dengan produksi telur pada tahun 2015 sebesar 4.293,92 ton, maka produksi telur pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 7,978 persen. Perkembangan produksi telur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.c.4
Produksi Telur Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 - 2016



d. Ketersediaan pangan utama ikan.

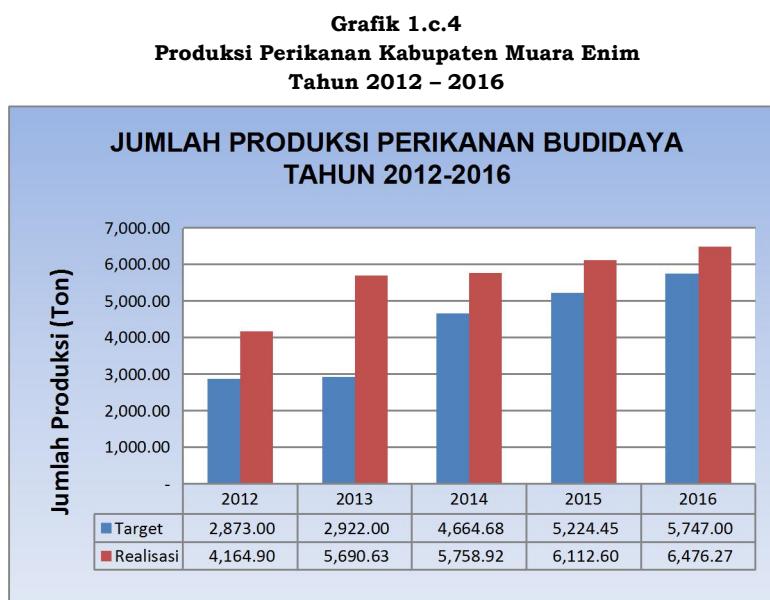
Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 untuk ketersediaan pangan utama ikan menargetkan 33,70 kg/kapita/tahun, terealisasi 41,54 kg/kapita/tahun atau 123 persen.

Pada tahun 2016 produksi perikanan di Kabupaten Muara Enim sebesar 6.476,27 ton dan impor ikan (ikan tuna, ikan kakap, ikan bawal, ikan teri, ikan kembung, ikan tenggiri dan ikan bandeng) sebesar 17.146 ton, dengan tingkat ketersedian sebesar 24.222,27 ton atau setara dengan 137,97 gram per



kapita per hari.

Produksi perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan rata - rata 12,48 persen atau 577,84 ton, Perkembangan produksi perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Pencapaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.c.1 berikut :

Tabel 1.c.1
Ketersediaan pangan utama Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No	Ketersediaan Pangan Utama	Target	Realisasi
1.	Beras (kg/kapita/tahun)	112,00	104,77
2.	Daging (kg/kapita/tahun)	12,60	16,89
3.	Telur (kg/kapita/tahun)	8,24	14,54
4.	Ikan	33,70	41,54

1.c.2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Keberhasilan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja Jumlah kelompok tani kelas utama dengan target 76 kelompok, terealisasi 76 kelompok atau 100 persen.

Kelompok tani di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 berjumlah 2.080 kelompok tani, dari 2.080 kelompok tani tersebut dibagi kedalam 4 (empat) kelas kemampuan kelompok tani yaitu kelompok tani kelas pemula berjumlah 994 kelompok tani, kelompok tani kelas lanjut berjumlah 920 kelompok tani, kelompok tani kelas madya berjumlah 92 kelompok tani, dan kelompok tani kelas utama berjumlah 76 kelompok tani. Kelas kemampuan kelompok tani di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.c.2 berikut :

Tabel 1.c.2
Kelas Kemampuan Kelompok Tani Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Kelas Kemampuan Kelompok			
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1.	Semende Darat Ulu	41	16	3	5
2.	Semende Darat Tengah	29	25	7	3
3.	Semende Darat Laut	27	26	11	8
4.	Tanjung Agung	101	45	0	8
5.	Lawang Kidul	12	1	0	0
6.	Muara Enim	85	25	5	4
7.	Ujan Mas	52	17	4	4
8.	Benakat	21	13	4	1
9.	Gunung Megang	33	75	22	2
10.	Belimbing	38	26	7	5
11.	Rambang Dangku	105	104	0	8
12.	Lubai	9	56	10	4
13.	Lubai Ulu	17	59	11	6
14.	Rambang	118	48	0	0
15.	Gelumbang	94	104	0	10
16.	Kelekar	37	21	0	0
17.	Lembak	41	38	0	0
18.	Belide Darat	41	34	0	0
19.	Sungai Rotan	47	118	0	1
20.	Muara Belida	46	65	6	5
JUMLAH		994	920	92	76

Sasaran 1.d : Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi MBR

Prestasi capaian sasaran terpenuhinya rumah layak huni tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu jumlah rumah tidak layak huni dengan target indikator 13.886 unit, terealisasi 15.811 unit.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program pembangunan daerah yaitu pengembangan perumahan. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

1.d. Program pengembangan perumahan

Keberhasilan program pengembangan perumahan tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja jumlah rumah tidak layak huni dengan target 13.886 unit, terealisasi 15.811 unit atau 11,72 persen.

Pencapaian target 15.811 unit diatas didapat dari pengurangan jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 19.886 unit dikurangi jumlah rumah tidak layak yang telah dibangun berjumlah 4.075 unit, sehingga total rumah tidak layak huni di Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2016 berjumlah 15.811 unit.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim mulai tahun 2015 melalui program pembangunan perumahan memberikan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan fasilitasi dan stimulasi



pembangunan perumahan kepada masyarakat kurang mampu yang berada di kecamatan – kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim sebanyak 1.131 unit perumahan yang terdiri dari 431 unit yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan 700 unit dibangun secara swadaya. Pembangunan rumah tidak layak huni pada tahun 2016 lebih sedikit dari tahun 2015, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 1.d berikut :

Tabel 1.d
Rumah tidak layak huni di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

DESA	JUMLAH RUMAH	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RUMAH LAYAK HUNI
SEMENDE DARAT LAUT			
Penindaian	279	180	99
babatan	359	14	345

Muara Dua	264	59	205
Muara Danau	219	45	174
Penyandingan	267	23	244
Tanah Abang	301	39	262
Pagar Agung	171	37	134
Pulau Panggung	868	140	728
Karya Nyata	227	64	163
Perapau	133	26	107
TOTAL	3,088	627	2,461
SEMENDE DARAT TENGAH			
Tenam Bungkuk	289	30	259
Kota Padang	142	51	91
Gunung Agung	401	126	275
Seri Tanjung	91	27	64
Tebing Abang	163	18	145
Batu Surau	131	26	105
Tanjung Raya	270	34	236
Muara Tenang	203	19	184
Rekimai Jaya	199	21	178
Palak Tanah	265	15	250
Kota Agung	257	19	238
Swarna Dwipa	142	25	117
TOTAL	2,554	411	2,143
SEMENDE DARAT ULU			
Tanjung Tiga	342	25	317
Cahaya Alam	481	33	448
Datar Lebar	228	14	214
Segamit	702	55	647
Siring Agung	140	3	137
Aremantai	667	37	630
Tanjung Agung	331	241	90
Pajar Bulan	668	30	638
Danau Gerak	178	12	166
Pelakat	165	145	20
TOTAL	3,902	595	3,307
UJAN MAS			
Pinak Belarik	626	53	573
Ujan Mas Lama	1,716	43	1,673
Ujan Mas Baru	1,625	120	1,505
Tanjung Raman	478	30	448
Muara Gula Baru	255	18	237
Muara Gula Lama	435	35	400
Guci	271	56	215

Ulak Bandung	754	80	674
TOTAL	6,161	435	5,726
TANJUNG AGUNG			-
Padang Bindu	406	28	378
Bedegung	323	70	253
Indramayu	244	42	202
Muara Meo	286	18	268
Lubuk Nipis	559	66	493
Pandan Dulang	96	36	60
Sukaraja	156	21	135
Tanjung Baru	211	30	181
Lambur	235	35	200
Lebak Budi	605	65	540
Embowang	279	77	202
Pagar Dewa	363	21	342
Tanjung Bulan	261	13	248
Lesung Batu	144	8	136
Pandan Enim	549	63	486
Paduraksa	468	23	445
Matas	310	22	288
Tanjung Agung	1,381	27	1,354
Muara Emil	520	21	499
Tanjung Karangan	497	28	469
Seleman	552	14	538
Penyandingan	332	21	311
Tanjung Lalang	317	15	302
Pulau Panggung	614	18	596
Sugih Waras	130	28	102
Pagar Jati	102	13	89
TOTAL	9,939	823	9,116
MUARA ENIM			
Tungkal	1,133	20	1,113
Pasar II	1,783	18	1,765
Pasar III	1,718	8	1,710
Pasar I	1,334	25	1,309
Muara Enim	2,583	207	2,376
Air Lintang	1,609	52	1,557
Tanjung Raja	537	76	461
Karang Raja	1,330	40	1,290
Muara Lawai	702	57	645
Tanjung Jati	412	50	362
Lubuk Ampelas	536	39	497
Kepur	769	68	701

Tanjung Serian	402	39	363
Muara Harapan	408	87	321
Saka Jaya	328	166	162
Harapan Jaya	392	127	265
TOTAL	15,973	1,079	14,894
RAMBANG DANGKU			
gemawang	436	84	352
Lubuk Raman	966	120	846
Jemenang	803	75	728
Tanjung Menang	246	90	156
Tebat Agung	1,034	90	944
Gerinam	167	67	100
Muara Niru	373	62	311
Banuayu	1,253	105	1,148
Kuripan	431	67	364
Batu Raja	422	43	379
Dangku	567	78	489
Siku	561	45	516
Gunung Raja	706	86	620
Suban Jeriji	923	76	847
Air Limau	528	56	472
Manunggal Jaya	528	57	471
Muara Emburung	307	83	224
Air Talas	254	56	198
Air Enau UPT XI	317	62	255
Manunggal Makmur	365	81	284
Aur Duri	543	95	448
Pangkalan Babat	136	25	111
Kasih Dewa	147	76	71
Air Cekdam	295	35	260
kahuripan Baru	228	70	158
Kuripan Selatan	143	54	89
TOTAL	12,677	1,838	10,839
GUNUNG MEGANG			
Penanggiran	874	29	845
Gunung Megang Luar	767	45	722
Gunung Megang Dalam	1,112	55	1,057
Lubuk Mumpo	632	60	572
Perjito	460	47	413
Tanjung Muning	418	55	363
tanjung Terang	589	86	503
Bangun sari	612	145	467
Sumaja Makmur	774	55	719

Sidomulyo	244	54	190
Fajar Indah	342	20	322
Karu ara Sakti	245	19	226
Panang Jaya	1,160	13	1,147
TOTAL	8,229	683	7,546
BELIMBING			
Cinta kasih	980	68	912
Darmo Kasih	243	46	197
Bulang	517	22	495
Dalam	917	18	899
tanjung	395	48	347
Berugo	189	60	129
teluk Lubuk	1,149	34	1,115
Belimbing	525	37	488
Belimbing Jaya	250	12	238
Simpang Tanjung	542	64	478
TOTAL	5,706	409	5,297
GELUMBANG			
Gelumbang	1,595	17	1,578
Gaung Telang	330	80	250
Pinang Banjar	317	69	248
Segayam	1,030	89	941
Tambangan Kelekar	796	30	766
Sukamenang	783	150	633
Karang Endah	1,252	189	1,063
Jambu	335	34	301
Midar	394	45	349
Melilian	394	60	334
Pedaratan	373	79	294
Teluk Limau	383	75	308
Karta Mulya	416	102	314
Sebau	771	59	712
Sigam	756	76	680
Paya Bakal	379	43	336
Bitis	415	46	369
Gumai	652	110	542
Putak	751	41	710
Talang taling	963	63	900
Suka Jaya	234	32	202
Karang endah Selatan	769	250	519
Betung	107	50	57
TOTAL	14,193	1,789	12,404
LAWANG KIDUL			

tanjung Enim	3,272	28	3,244
Pasar Tanjung Enim	2,701	-	2,701
Tanjung enim Selatan	2,137	-	2,137
Tegal rejo	3,351	218	3,133
Lingga	2,036	10	2,026
Keban Agung	2,145	44	2,101
Darmo	916	4	912
TOTAL	16,557	304	16,253
LUBAI			
Aur	658	176	482
Beringin	973	246	727
Kota baru	541	65	476
Pagar Gunung	484	45	439
gunung raja	685	67	618
Tanjung Kemala	623	78	545
Suka merindu	666	19	647
Jiwa Baru	719	145	574
Menanti	269	41	228
air Asam	383	251	132
TOTAL	6,002	1,133	4,869
LUBAI ULU			
Lecah	329	45	284
Prabu menang	469	67	402
Pagar Dewa	710	89	621
Karang agung	1,402	66	1,336
sumber mulya	1,456	81	1,375
karang mulya	690	76	614
Lubai Persada	312	230	82
Mekar jaya	276	50	226
Lubai Makmur	230	156	74
Sumber Asri	364	108	256
karang sari	570	88	482
TOTAL	6,808	1,056	5,752
RAMBANG			
Baru Rambang	310	10	300
sugihan	671	105	566
Tanjung Raja	449	121	328
tanjung Dalam	220	61	159
Sukarami	277	92	185
Pagar Agung	804	79	725
Sugiwaras	629	52	577
Sumber rahayu	889	100	789
Marga Mulya	636	79	557

Kecana Mulya	381	80	301
Negeri agung	244	110	134
Air Keruh	84	40	44
Sugihwaras barat	619	29	590
TOTAL	6,215	958	5,257
SUNGAI ROTAN			
tanjung Miring	282	174	108
Danau tampang	329	76	253
Kasai	383	12	371
Sungai Rotan	454	23	431
Suka merindu	793	44	749
tanding Marga	398	20	378
Muara Lematang	309	41	268
Sukadana	304	17	287
Modong	550	105	445
Suka Cinta	460	86	374
Penandingan	417	48	369
danau Rata	689	124	565
Paya Angus	307	60	247
Sukarame	549	180	369
Petar dalam	361	93	268
Sukajadi	405	40	365
Sukamaju	180	43	137
Danau Baru	126	41	85
Petar Luar	308	37	271
TOTAL	7,602	1,264	6,338
LEMBAK			
Petanang	472	48	424
Talang Nangka	500	146	354
Alai	694	53	641
Sungai Duren	198	32	166
tapus	387	69	318
Lembak	709	35	674
Kemang	590	67	523
Alai Selatan	222	33	189
Lubuk Enau	182	37	145
Tanjung Baru	359	51	308
TOTAL	4,313	571	3,742
BELIDE DARAT			
Talang balai	384	16	368
babat	271	71	200
Sialingan	375	9	366
Tanjung Bunut	347	33	314

Ibul	253	71	182
gaung Asam	515	36	479
Lubuk Semantung	175	29	146
Lubuk Getam	227	16	211
Tanjung baru	211	40	171
Tanjung Tiga	150	11	139
Talang Beliung	109	7	102
TOTAL	3,016	339	2,677
BENAKAT			
Padang Bindu	675	130	545
Betung	280	14	266
Pagar Dewa	467	88	379
Pagar Jati	364	14	350
Hidup Baru	305	90	215
Rami Pasai	196	98	98
TOTAL	2,287	434	1,853
KELEKAR			
Embacang Kelekar	422	35	387
Menanti	630	22	608
Menanti Selatan	84	70	14
Suban baru	300	15	285
Pelempang	359	25	334
Teluk Jaya	322	25	297
Tanjung Medang	314	59	255
TOTAL	2,430	251	2,179
MUARA BELIDA			
Gedung Buruk	207	153	54
Arisan Musi	258	119	139
Harapan Mulya	176	122	54
Mulya Abadi	328	122	206
Arisan Musi Timur	225	72	153
Patra tani	183	62	121
tanjung Baru	354	51	303
Kayu Ara Batu	247	111	136
TOTAL	1,978	812	1,166
JUMLAH SELURUH	139,630	15,811	123,819

Sasaran 1.e : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih dan Sanitasi

Prestasi capaian sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama

yaitu persentase rumah tangga pengguna air bersih dengan target indikator 71,82 persen, dan persentase rumah tinggal bersanitasi dengan target 71,6 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan dan program pemberdayaan komunitas perumahan. SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

1.e.1 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Keberhasilan program pembangunan infrastruktur perdesaan tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih dengan target 71,82 persen terrealisasi 73,57 persen dan Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan target 67,39 persen terrealisasi 76,8 persen.

Pencapaian persentase rumah tangga yang (RT) yang menggunakan air bersih di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 adalah 73,57 persen,

didapat dari hasil pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, WISLIC, PDAM dan PAMSIMAS.



Pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 73,57 persen didapat dari perhitungan jumlah rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 118.289 Kepala Keluarga di bagi dengan jumlah rumah tangga berjumlah 160.790 Kepala Keluarga.

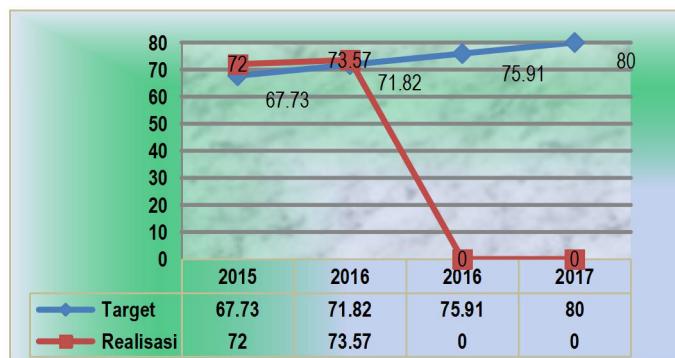
Pelayanan sarana air bersih / air minum dalam Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.e.1a berikut :

Tabel 1.e.1a
Pelayanan sarana air bersih/air minum dalam Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)	JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH (JIWA)	PERSENTASE (%) PENDUDUK AKSES AIR BERSIH	JUMLAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKA N AKSES AIR BERSIH (KK)	PERSENTAS E (%) RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Semende Darat Ulu (SDU)	16,932	4,729	15,172	89.61	3,793	80.21
2	Semende Darat Tengah (SDT)	10,419	3,183	9,322	89.47	2,331	73.22
3	Semende Darat Laut (SDL)	13,683	4,187	12,990	94.93	3,248	77.56
4	Tanjung Agung	39,931	11,137	35,396	88.64	8,849	79.46
5	Lawang Kidul	67,935	18,779	65,899	97.00	16,475	87.73
6	Muara Enim	70,258	17,370	65,108	92.67	16,277	93.71
7	Ujan Mas	25,249	7,218	22,688	89.86	5,672	78.58
8	Benakat	9,310	2,635	5,468	58.74	1,367	51.88
9	Gunung Megang	36,422	9,423	21,854	60.00	5,464	57.98
10	Belimbing	25,691	5,849	19,564	76.15	4,891	83.62
11	Rambang Dangku	53,514	14,035	29,425	54.99	7,356	52.41
12	Rambang	30,800	7,164	23,070	74.90	5,768	80.51
13	Lubai	28,886	6,931	22,270	77.10	5,568	80.33
14	Lubai Ulu	33,785	7,815	15,703	46.48	3,926	50.23
15	Belide Darat	13,639	3,678	11,813	86.61	2,953	80.29
16	Lembak	21,101	5,654	18,606	88.17	4,652	82.27
17	Kelekar	10,606	3,120	9,027	85.11	2,257	72.33
18	Sungai Rotan	31,428	8,396	24,982	79.49	6,246	74.39
19	Gelumbang	62,460	17,031	39,014	62.46	9,754	57.27
20	Muara Belida	7,989	2,456	5,786	72.43	1,447	58.90
	JUMLAH	610,036	160,790	473,157	77.56	118,289	73.57

Pencapaian rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 berjumlah 118.289 KK atau 73,57 persen, meningkat dari pencapaian tahun 2015 berjumlah 109.077 KK atau 72 persen. Pencapaian rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muara Enim dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik 1.e.1a di bawah ini :

Grafik 1.e.1a
Pencapaian rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muara Enim dalam 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2015 – 2016



Untuk pencapaian persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 76,8 persen. perhitungan rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 persen.

Pencapaian indikator kinerja rumah tinggal bersanitasi 76,8 persen didapat dari perhitungan jumlah rumah tangga sanitasi 123.486 Kepala Keluarga dibagi dengan jumlah rumah tangga 160.790 Kepala Keluarga.

Pencapaian rumah tangga bersanitasi dalam Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel 1.e.1b berikut :

Tabel 1.e.1b
Rumah Tangga berSanitasi dalam Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Identitas Data (Data aktual ter-entry /Data di BPS)		Kemajuan								
		Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSS P	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses Progres	
1	BELIDA DARAT	3590 / 3495	2667	74.29	429	11.95	494	13.76	0	0	100.00	
2	LEMBAK	5518 / 4519	2970	53.82	1957	35.47	591	10.71	0	0	100.00	
3	MUARA ENIM	26314 / 15758	22439	85.27	3430	13.03	347	1.32	98	0.82	99.63	
4	LAWANG KIDUL	17457 / 15427	15537	89.00	1048	6.00	181	1.04	691	5.14	96.04	
5	SUNGAI ROTAN	8763 / 8153	7616	86.91	377	4.30	155	1.77	615	7.13	92.98	
6	BELIMBING	4310 / 5634	3308	76.75	419	9.72	268	6.22	315	8.23	92.69	
7	BENAKAT	2429 / 2352	1184	48.74	600	24.70	427	17.58	218	13.48	91.03	

8	RAMBANG	6457 / 6978	3974	61.55	306	4.74	1068	16.54	1109	17.54	82.82
9	GUNUNG MEGANG	8594 / 8743	4414	51.36	928	10.80	1155	13.44	2097	20.4	75.60
10	GELUMBANG	15201 / 14951	6271	41.25	3895	25.62	2241	14.74	2794	20.61	81.62
11	SEMENDO DARAT TENGAH	2698 / 2593	514	19.05	46	1.70	1566	58.04	572	21.33	78.80
12	SEMENDO DARAT LAUT	3522 / 3589	1682	47.76	345	9.80	762	21.64	733	22.69	79.19
13	LUBAI ULU	8594 / 7505	5464	63.58	0	0.00	1181	13.74	1949	24.19	77.32
14	LUBAI	7473 / 6434	3590	48.04	1447	19.36	368	4.92	2068	25.26	72.33
15	SEMENDO DARAT ULU	3993 / 4196	1818	45.53	482	12.07	676	16.93	1017	27.74	74.53
16	RAMBANG DANGKU	13938 / 13597	8549	61.34	614	4.41	609	4.37	4166	30.41	70.11
17	UJAN MAS	6179 / 5883	3042	49.23	0	0.00	532	8.61	2605	44.23	57.84
18	KELEKAR	2628 / 2505	919	34.97	66	2.51	40	1.52	1603	54.26	39.00
19	TANJUNG AGUNG	10360 / 10177	4052	39.11	6	0.06	599	5.78	5703	54.94	44.95
20	MUARA BELIDA	2472 / 2148	18	0.73	106	4.29	31	1.25	2317	93.5	6.27
21	(Enam Titik IPAL Komunal)	300 / 300	300	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0	100.00
		160790 / 144937	100328	56.11	16501	9.55	13291	11.14	30670	23.42	76.80

Perhitungan :

Persentase 76.80

Jml Penduduk th.2016 610.036 Jiwa

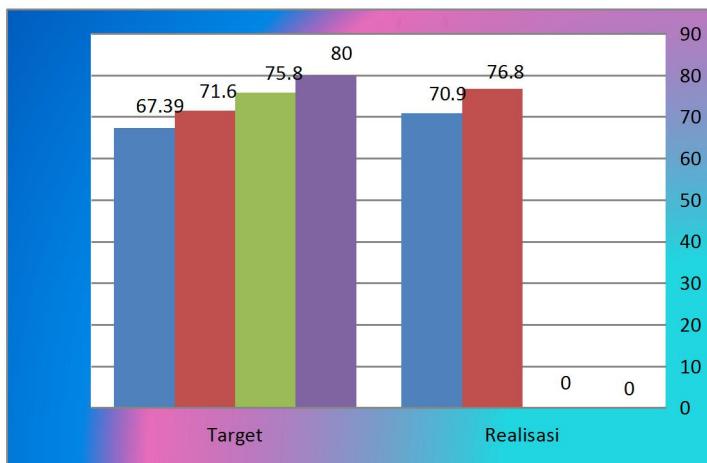
Jumlah KK th 2016 160.79 KK

Jml KK Bersanitasi 76.8 / 100 x 160.790 = 123.486 KK

Jml Jiwa Bersanitasi 76.8 / 100 x 610.036 = 468.510 Jiwa

Pencapaian rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 berjumlah 123.486 KK atau 76.80 persen, meningkat dari pencapaian tahun 2015 berjumlah 107.451 KK atau 70,9 persen. Pencapaian rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Muara Enim dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik 1.e.1b di bawah ini :

Grafik 1.e1b
Rumah Tangga berSanitasi dalam Kabupaten Muara Enim
Tahun 2015 – 2016



Sasaran 2.a : Meningkatnya Kemudahan, Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat dalam Melaksanakan kegiatan Peribadatan

Prestasi capaian sasaran meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu persentase lembaga – lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan dengan target 99 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program pembangunan daerah yaitu program pengembangan lembaga – lembaga sosial keagamaan. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Sekretariat Daerah.

2.a. Program pengembangan lembaga – lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama

Keberhasilan program pengembangan lembaga – lembaga sosial



keagamaan dan lembaga pendidikan agama tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja persentase lembaga – lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan dengan target 90 persen, terrealisasi

100 persen.

Pencapaian indikator persentase lembaga – lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Kelembagaan Sosial Keagamaan / Pendidikan Keagamaan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembinaan kelembagaan sosial keagamaan/pendidikan keagamaan dengan memberikan bantuan kepada lembaga – lembaga keagamaan, bantuan kepada lembaga – lembaga keagamaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati hari raya / hari besar keagamaan, meliputi hari raya agama islam, hari raya agama kristen, hari raya agama budha, dan hari raya agama hindu. Peringatan hari raya tersebut diantaranya hari raya idul adha, hari raya idul fitri, hari raya natal, hari raya waisak, hari raya paska, dan hari raya nyepi.

Sasaran 2.b : Meningkatnya Penerapan Ajaran Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Prestasi capaian sasaran meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca Al – Quran dengan target 3.960 orang, dan Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal dengan target 30 produk.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program pembangunan daerah yaitu Program pengembangan lembaga – lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Sekretariat Daerah.

2.b.1. Program pengembangan lembaga – lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama

Keberhasilan program pengembangan lembaga – lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama diukur dengan indikator kinerja jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca Al – Quran dengan target 3.960 orang, terealisasi 35.109 orang atau 100 persen dan Produk makanan dan minuman bersertifikat halal dengan target 30 produk, terealisasi 12 produk atau 40 persen.

Pada tahun 2016 jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca al - Quran di Kabupaten Muara Enim berjumlah 1.109 anak, sehingga total anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca al - Quran sampai dengan tahun 2016 berjumlah 35.109 lebih tinggi dari

target yang ditetapkan berjumlah 3.960 anak atau terealisasi 100 persen. Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 menyelenggarakan pelatihan dan evaluasi manajemen TPQ/TPA kepada guru - guru TPQ/TPA di



Kabupaten Muara Enim. Pelatihan dan evaluasi TPQ/TPA bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru TPQ/TPA dalam memanajemen dan mengoperasional TPQ/TPA. Pada tahun 2016 TPQ/TPA yang ada di Kabupaten Muara Enim telah berhasil mewisuda santri sebanyak 1.109 orang. Rata - rata santri yang di wisuda setiap tahunnya di kabupaten muara enim berjumlah 1.500 anak.

Produk makanan dan minuman bersertifikat halal di Kabupaten berjumlah 12 produk dari 30 produk yang ditargetkan, atau terealisasi 40 persen. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan 12 produk makanan dan minuman lokal berlabel halal yaitu Kopi Bintang, Eva Catering, Balqis Catering dan Nata Catering, Pabrik Tahu, Kerupuk Ikan Tiga Putra, Perusahaan Roti PW Roti, Pabrik Keripik Istimewa, Keripik Pangsit Ibu Eko, Pabrik Roti Istana, Pembuatan Roti David, Pabrik Roti Sari Enak.

Sasaran 2.c : Meningkatnya Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama

Prestasi capaian sasaran meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utamayaitu Jumlah konflik bernuansa SARA dengan target 0 kejadian.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program pembangunan daerah yaitu Program

kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. SKPD penanggung jawab SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.c.1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Keberhasilan Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaandiukur dengan indikator kinerja jumlah konflik yang terjadi antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2016, sama seperti tahun 2015 selama kurun waktu tersebut tidak pernah terjadi konflik (0 konflik) antar umat beragama artinya tingkat capaian sasaran mencapai 100 persen, seperti terlihat dalam Tabel 2.c.1 berikut :

Tabel 2..c.1
Indikator dan tingkat capaian sasaran
meningkatnya kerukunan intra & antar umat beragama

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1		3	4	5
- Konflik yang terjadi antar umat beragama.	%	0	0	100 %

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016

Sasaran 2.1.a : Meningkatnya Pelayanan Publik dan Capaian Kinerja

Prestasi capaian sasaran pelayanan publik dan capaian kinerja tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utamayaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target Baik, terealisasi Baik atau 100 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program pembangunan daerah yaitu Program penataan peraturan perundang – undangan. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Sekretariat Daerah.

2.1.a.1. Program penataan peraturan perundang – undangan

Keberhasilan program penataan peraturan perundang – undangan tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target Baik, terealisasi Baik.

Pencapaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui program penataan peraturan perundang – undangan dan kegiatan penyusunan / sosialisasi standar pelayanan publik. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan SKM, pada 9 Unit Pelayanan Publik yaitu :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabain;
- c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- f. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Unggulan Muara Enim;
- g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Enim;
- h. Sekolah Dasar Negeri 18 Muara Enim;
- i. Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- j. Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Terdapat 9 variabel yang wajib dinilai pada unit pelayanan publik, yakni meliputi:

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
10. Sarana dan Prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) terhadap 9 unit pelayanan publik.

Hasil survey tersebut dapat dilihat pada table 2.1.a.1 berikut:

Tabel 2.1.a.1
Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

Nomor	SKPD	Nilai IKM
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	4
2	Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabain	3
3	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	4
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
5	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Unggulan Muara Enim	4
6	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	3
7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Enim	3
8	Kantor PDAM Lematang Enim	4
9	Pelanggan PDAM Lematang Enim	3
10	Sekolah Dasar Negeri 18 Muara Enim	4

Rumusan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Nilai SKM SKPD yang tercantum pada tabel 2.1.a.1 berada pada kategori **Baik / Memuaskan** karena berada pada range 3 dan 4. Meskipun hasil survey tersebut berada pada katagori Baik, Tetapi beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh unit pelayanan, diantaranya :

1. SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Melakukan desain ulang terhadap tata letak pada papan informasi pelayanan;
- Perlu penyusunan maklumat pelayanan dan SOP;
- Menambahkan informasi persyaratan pembuatan KTP;
- Mempersingkat waktu penyelesaian layanan melalui penyederhanaan prosedur maupun peningkatan kompetensi pemberi layanan;
- Menggunakan nomor antri berikut display yang dapat memberikan informasi mengenai urutan pemanggilan;
- Melakukan pemeliharaan toilet secara rutin;

2. Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Rabbain

- terlihat penumpukan dokumen RM diruangan dan perparah lagi dengan sempitnya ruangan sehingga menjadi semakin sesak dengan tumpukan dokumen RM pasien;
- kurangnya kebersihan dan kerapian ruang RSUD;
- kondisi kamar mandi dan toilet sangat memprihatinkan, karena banyak yang rusak, tidak dapat dipakai dan bocor sehingga menambah kotor dan bau tak sedap.

3. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

- Belum maksimalnya kepercayaan diri masyarakat untuk perlunya atau pentingnya perijinan, kerena stigma pelayanan yang terbangun di masyarakat adalah citra buruk;
- Belum tersedianya sarana prasarana pelayanan secara memadai, terutama fasilitas gedung yang dirasakan sudah tidak memadai untuk menampung pelayanan yang semakin berkembang karena ruangan – ruangan yang tersedia terlalu sempit, termasuk fasilitas parkir, kamar mandi dan toilet untuk masyarakat belum tersedia;

4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- Pengumuman atau informasi terkait layanan tidak tertera secara spesifik di ruang layanan;
- Papan pengumuman informasi terletak di tempat yang kurang strategis;
- Pada meja loket pelayanan tidak terdapat informasi yang memadai;
- Petugas diloket layanan tidak secara cepat tanggap terhadap masyarakat yang datang;

5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Unggulan Muara Enim

- Siswa mengeluhkan adanya guru yang kurang tepat waktu dalam mengajar;
- Kondisi air di asrama kadang – kadang keruh;
- Jam istirahat sekolah (pukul 9.30 dan pukul 13.00 WIB) dianggap belum akomodatif terhadap siswa;

6. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

- Letak Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi masih menggunakan lahan milik PT. KAI;
- Kondisi gedung kantor yang sudah tua dan terkesan kumuh dengan barang – barang inventaris tidak tertata;
- Kondisi dibeberapa ruang kantor sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena kondisi fidik ruangan yang telah rusak;
- Tempat penyimpanan buku – buku yang ada dikantor tidak teratur rapid an terkesan semerawut;
- Didalam plafon atap lantai 2 (dua) yang menjadi ruangan koleksi perpustakaan dan ruang baca menjadi sarang kelelawar yang menimbulkan bau yang menyengat;
- Tidak ada ruang khusus untuk membaca dan berdiskusi di gedung perpustakaan;

7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Enim

- Infrastruktur bangunan sekolah yang sudah terlihat sangat tua dan rapuh;
- Ruang untuk kegiatan UKS tidak memenuhi standar kelayakan, dimana perlengkapan tidur hingga kondisi ruangan tidak memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- Fasilitas kantin terlihat sempit dan kurang tertata;
- Toilet terlihat kotor dan kurang terawat;

8. SD Negeri 18 Muara Enim

- Ruang guru dan UKS belum representative. Ruang dalam satu ruangan terdapat ruang guru, ruang UKS dan juga dapur untuk guru. Hal ini akan menyusahkan apabila terdapat suatu kondisi darurat dimana ruang masuk ke dalam UKS berdampingan dengan tempat duduk guru;
- Ruang ibadah belum representative. Dimana ruangan ibadah ditempatkan dibelakang dan hanya bisa digunakan oleh guru.

- Sedangkan untuk murid-murid, ibadah dilakukan di masjid terdekat diluar kompleks sekolah;
- Kompetensi teknis pelaksana UKS dan Perpustakaan masih terbatas. Hal ini dikarenakan fungsi UKS dan Perpustakaan masih ditempatkan sebagai penunjang, sehingga fungsi UKS dan Perpustakaan masih dilakukan oleh satu orang;
 - Siswa belum ada fasilitas pengenalan komputer dan internet. Hal ini dikarenakan fasilitas komputer yang dimiliki oleh SDN 18 Muara Enim masih terbatas;
 - Perlu adanya pemberahan kecil bagian-bagian bangunan yang sudah rusak. Salah satunya yaitu atap di Perpustakaan. Atap diperpustakaan terlihat sudah agak rusak sering terkena air hujan;
 - Fasilitas kecil seperti ketersediaan air belum tersedia di masing-masing kelas. Tempat air sering dibiarkan kosong sehingga tidak sesuai dengan fungsi dari tempat ait tersebut.

9. Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

- Informasi mengenai isyarat pembuatan saluran untuk pelanggan baru diperoleh dari Petugas PDAM dan pelanggan harus mendatangi Kantor PDAM terlebih dahulu, kemudian kembali ke rumah untuk memenuhi persyaratan dan kembali lagi untuk memberikan syarat-syarat yang diminta. Hal tersebut akan menghabiskan waktu;
- Sikap petugas Kantor PDAM dalam memberikan penjelasan kepada pelanggan baru kurang ramah.

Sasaran 2.1.b : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Prestasi capaian sasaran meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu SAKIP dengan Predikat B, dan Opini BPK dengan target WTP.

Pencapaian indikator kinerja SAKIP tahun 2016 Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 65,58 dengan predikat “B” atau tercapai 100 persen, dan indikator kinerja opini BPK tahun 2016 Kabupaten Muara Enim mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.b.1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Keberhasilan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik dan tepat waktu dengan target 56 SKPD, terrealisasi 56 SKPD atau 100 persen.

Melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Pada Tahun 2016 SKPD yang menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Bupati Muara Enim dengan tepat waktu sebanyak 56 SKPD dari 56 SKPD atau tercapai 100 persen, SKPD tersebut terdiri dari 19 dinas, 17 Lembaga Teknis Daerah dan 20 Kecamatan.

Terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut, telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim sebagaimana amanat Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, secara rata – rata memperoleh nilai sebesar 57,822 meningkat 1,28 angka disbanding hasil evaluasi tahun 2015, hal tersebut dapat dilihat dengan

meningkatnya SKPD yang mendapatkan predikat B ke atas. Pada tahun 2015 persentase SKPD yang memperoleh nilai B ke atas sebesar 24,63 persen, meningkat di tahun 2016 sebesar 43,63 persen hal ini menunjukan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja di SKPD sudah berada di jalur yang benar.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan diatas, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Muara Enim tahun 2015 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 65,58 atau dengan predikat B, Pencapaian hasil tersebut meningkat dari pencapaian tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari tabel 1.b.1 berikut :

Tabel 1.b.1
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 – 2016

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2012	Nilai 2013	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016
a.	Perencanaan Kinerja	35	17,03	19,97	24,17	22,84	23,28
b.	Pengukuran Kinerja	20	10,08	11,19	12,80	11,00	13,23
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,35	8,17	10,39	11,50	11,06
d.	Evaluasi Kinerja	10	4,03	5,49	5,88	6,61	6,35
e.	Capaian Kinerja	20	11,62	11,77	11,78	13,51	11,66
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,11	56,59	65,02	65,10	65,58
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	B	B	B	B

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Muara Enim tahun 2016 diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten muara enim agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

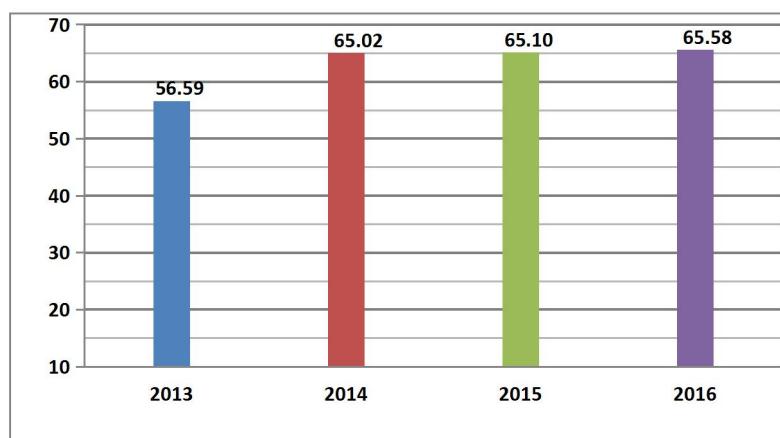
- Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta

- keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja dari level kabupaten sampai ke individu pegawai;
- b. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada butir 1 diatas. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
 - c. Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat kinerja;
 - d. Memerintahkan kepada inspektorat untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar SKPD, serta kepada Bappeda dan para penanggungjawab program untuk meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan efisiensi;
 - e. Kepada inspektorat agar meningkatkan kompetensi APIP dalam upaya memberikan rekomendasi perbaikan penerapan menejemen kinerja masa yang akan datang dan mendorong terwujudnya unit kerja yang berbudaya kinerja;
 - f. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, menginformasikan keterkaitan

anggaran yang terserap dengan outcome yang berhasil dicapai.

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 1.b.1 berikut :

Grafik 1.b.1
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2013 – 2016



2.b.2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

Keberhasilan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah tahun 2016 diukur dengan indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan target Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2016 diperoleh dari rumusan atas opini yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2015 dengan opini WTP, capaian kinerja laporan keuangan dengan opini WTP sama dengan pencapaian pada tahun 2014, dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, 2012, dan 2011 terlihat mengalami peningkatan dimana capaian pada tiga tahun sebelumnya capaiannya masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan capaian ini disebabkan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan standar pemeriksaan

yang dijadikan pedoman oleh Auditor BPK. Predikat WTP dapat diberikan jika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang digambarkan melalui kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan telah memenuhi 4 (empat) persyaratan berikut :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, artinya bahwa laporan keuangan yang telah disusun telah mempedomani atau telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tersebut
- Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), bahwa semua informasi keuangan yang signifikan telah dijelaskan secara rinci, diberikan penjelasan yang cukup memadai untuk memudahkan pembaca laporan keuangan dalam informasi yang disajikan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan ketaatan seluruh insan pengelola kegiatan dan pengelola pemerintahan dengan peraturan yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BPK berdasarkan audit yang dilakukannya terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah disampaikan oleh SKPD Pemerintahan Kabupaten Muara Enim baik bukti keuangan dan maupun bukti non keuangan dan pemeriksaan lapangan, telah menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2015, dalam semua hal yang material telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk laporan keuangan Tahun 2016 capaian sasaran diharapkan opini WTP, namun pada saat penyusunan laporan kinerja Tahun 2016, opini BPK RI belum dapat diketahui karena laporan keuangan Tahun 2016 masih dalam proses audit BPK RI.

Sasaran 3.1.a : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

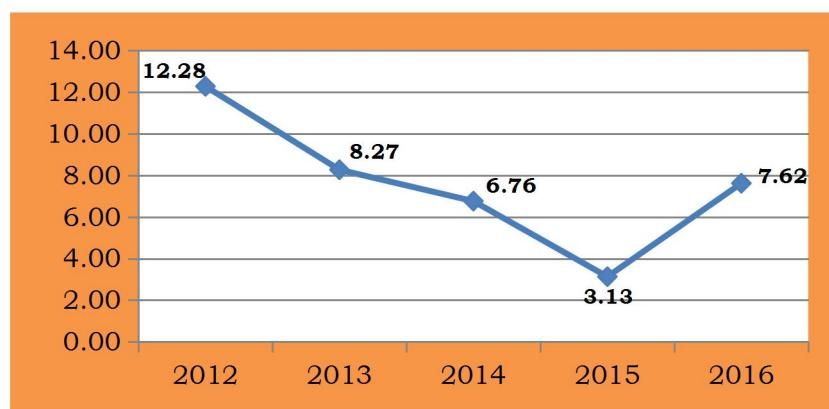
Prestasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu PDRB ADHK

dengan migas dengan target 11,7 persen dan PDRB ADHK tanpa migas dengan target 9,0 persen

Pencapaian indikator kinerja PDRB ADHK dengan migas tahun 2016 sebesar 7,62 persen atau 31.253.273.000,- dan PDRB ADHK tanpa migas sebesar 8,87 persen atau 27.483.159.000,- dibawah target yang ditetapkan dikarenakan penyusunan target tersebut menggunakan tahun dasar tahun 2000 sedangkan tahun dasar penyusunan saat ini menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Pada Tahun 2016 capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 tercatat sebesar 7,62 persen, sedangkan pertumbuhan rata - rata kabupaten/kota se-Sumatera Selatan hanya 4,50 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim di tahun 2016 disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 6 kategori, namun peningkatan yang terbesar berasal dari kategori pertambangan dan penggalian (9,41 persen) dan kategori industri pengolahan (8,18 persen). Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.1.a di bawah ini ;

**Grafik 3.1.a
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 – 2016**



Untuk mencapai target sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. SKPD

penanggung jawab adalah SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Koperasi dan UKM.

3.1.a.1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2016 di Kabupaten Muara Enim sebesar 4,34 persen. Sektor pertanian mencakup subkategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategori usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan subkategori perikanan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 pada kategori ini sedikit lebih baik dari tahun 2015, yaitu 4,18 persen di tahun 2015 menjadi 4,34 persen di tahun 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Stasistik (BPS) tahun 2016 konstribusi sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 4.480,572 juta pada tahun 2015, menjadi Rp. 4.554,207 juta.

Terdapat perubahan dalam menentukan penyusunan angka PDRB, perubahan tersebut meliputi:

- a. Bahan penyusunan PDRB menggunakan tahun dasar 2010, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000;
- b. Penyusunan ukuran aktivitas ekonomi menggunakan System of National Accounts (SNA) 2008, dimana sebelumnya menggunakan SNA 1993;
- c. Kategori dalam klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha menggunakan 17 kategori sektor ekonomi, dimana sebelumnya menggunakan 9 sektor ekonomi.

Terhadap perubahan penyusunan PDRB tersebut berdampak antara lain:

- a. Meningkatnya nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu wilayah dari rendah menjadi menengah atau tinggi;
- b. Akan mengubah indikator mikro seperti struktur dan pertumbuhan ekonomi;

- c. Akan menyebabkan perubahan input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

3.1.b.a Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016 adalah :

- a. Peningkatan produksi padi sebesar 10,71 persen melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 5,00 persen.

Produksi padi di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 149.928,984 ton Gabah Kering



Panen (GPK) atau 10,71 persen meningkat dari tahun 2015 sebesar 139.938,04 ton GPK. Pencapaian produksi padi pada tahun 2016 didukung oleh beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Muara Enim yaitu dengan menambah luas lahan tanaman pangan dimana pada tahun 2015 luas lahan seluas 34.282 ha, meningkat menjadi 36.006 ha di tahun 2016.

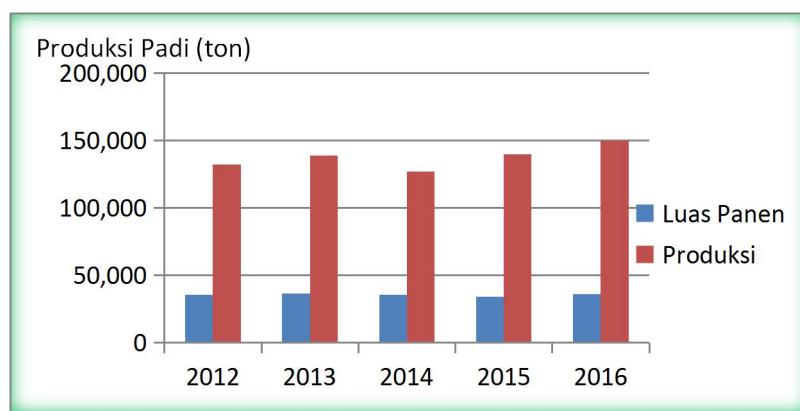
Dari hasil ubinan yang dilakukan pada beberapa lokasi areal persawahan pada kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim diperoleh angka produktivitas padi sebesar 41,64 kw/ha sehingga diperoleh produksi padi sebesar 149.928,984 ton GKP. Apabila produksi padi ini dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 139.973,04 ton GKP maka diperoleh persentase peningkatan produksi sebesar 10,71 persen.

Produksi padi di Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Capaian kinerja produksi padi di Kabupaten Muara Enim 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1.b.a di bawah ini:

No	Tahun	Produksi (Ton)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
1	2016	149.928,984*	5	10,71	214,2
2	2015	139.937	5	10,42	208,40
3	2014	126.735	5	(8,70)	(174,00)
4	2013	138.924	3	5,01	167,11
5	2012	132.292	3	0,91	30,33

Sejak tahun 2012 di produksi padi Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan produksi padi ini tentunya dapat diartikan bahwa ketersediaan beras untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim akan selalu tersedia. Berikut grafik ketersediaan produksi padi di Kabupaten Muara Enim kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.b.a. Grafik Ketersediaan Produksi Padi 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 – 2016



- b. Peningkatan produksi sayuran sebesar 10,95 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5,00 persen.

Produksi sayuran unggulan (kentang, cabai dan tomat) pada tahun 2016 sebesar 10,95 persen mengalami peningkatan dari yang ditargetkan sebesar 5.00 persen. Berdasarkan sumber data statistik pertanian produksi tanaman hortikultura Kabupaten

Muara Enim tahun 2016 diperoleh data produksi tanaman sayuran (kentang, cabai dan tomat) di Kabupaten Muara Enim



sebesar 6.519,6 ton meningkat 643,6 ton dari tahun sebelumnya sebesar 5.876 ton. Komoditi sayuran unggulan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 3 (tiga) komoditi utama yaitu komoditi kentang, komoditi cabai dan

komoditi tomat yang tersebar di beberapa kecamatan sentra komoditi hortikultura di Kabupaten Muara Enim.

Produksi Sayuran dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ditampilkan data komoditi dan produksi sayuran di Kabupaten Muara Enim 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan dalam Tabel 3.1.b.b. di bawah ini :

No	Tahun	Produksi (ton)			Total Produksi (ton)
		Kentang	Cabe	Tomat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)
1	2012	349	2.253	1.797	4.399
2	2013	565	1.541	2.320	4.426
3	2014	626	2.550	2.414	5.589
4	2015	173	2.917	2.786	5.876
5	2016	558	3.158,9	2.802,7	6.519,6

c. Peningkatan produksi buahan sebesar -71,70 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 4,75 persen.

Komoditi buah-buahan unggulan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 (empat) komoditi utama yaitu komoditi alpukat, durian, duku dan sawo. Realisasi produksi buah-buahan unggulan pada tahun 2016 sebesar 2.638,12 ton mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 9.313 ton.

Berdasarkan sumber data Statistik Pertanian Produksi Tanaman Hortikultura tahun 2016 diperoleh data produksi tanaman buah-buahan unggulan di Kabupaten Muara Enim sebesar 2.638,12 ton menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9.313 ton, atau terjadi penurunan sebesar -71,70 persen. Penurunan produksi buah-buahan tersebut karena rendahnya produksi komoditi durian dan komoditi duku terutama pada sentra tanaman buah-buahan. Komoditi dan produksi buah – buahan unggulan di Kabupaten Muara Enim 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1.b.c. di bawah ini :

No (1)	Tahun (2)	Produksi (ton)				Total Produksi (ton) (7)
		Alpukat (3)	Durian (4)	Duku (5)	Sawo (6)	
1	2012	410	8.380	3.039	1.534	13.353
2	2013	749	8.901	2.624	1.470	13.744
3	2014	566	2.804	1.606	319	5.298
4	2015	197	5.257	3.419	441	9.313
5	2016	242	955	151	1.290	2.638

3.1.b.2 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan program budidaya peternakan meliputi budidaya ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba) dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur), baik yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh perusahaan atau badan usaha. Peran pemerintah dalam pengembangan usaha budidaya peternakan meliputi: bantuan pengutang modal usaha dengan pemberian hibah baik berupa bibit, bakalan, maupun sarana budidaya. Disamping itu juga berperan memberikan bimbingan teknis melalui penyuluhan dan akses permodalan ke pemilik modal maupun

perbankan. Dengan berkembangnya usaha budidaya peternakan diharapkan produksi peternakan terus meningkat guna meningkatkan ketersediaan pangan asal hewani, diantaranya daging dan telur. Produksi daging meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam kampung dan itik, sedangkan produksi telur meliputi telur ayam ras petelur, ayam kampung dan itik.

Produksi daging tahun 2016 sebesar 9.242,78 ton atau 98,76 persen. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015, produksi daging tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 7,62 persen atau terjadi peningkatan 654,23 ton.

Produksi telur tahun 2016 sebesar 3.951,56 ton atau 162,91 persen, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015, produksi telur tahun 2016 mengalami penurunan 7,97 persen atau 342,36 ton.

Tingkat produktivitas peternakan di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.b.2 dibawah ini:

No.	Indikator	Capaian Tahun 2015	2015			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2016 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produksi Hasil Peternakan:						
	- Produksi Daging (ton)	8.588,55	9.358,57	9.242,78	98,76	9.832,54	94,00
	- Produksi Telur (ton)	4.293,92	2.425,64	3.951,56	162,91	6.353,29	62,20

Capaian produktivitas daging di Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1.b.2 dibawah ini:

Grafik 3.1.b.2
Capaian kinerja produksi daging di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 - 2016



3.1.b.3 Program pengembangan budidaya perikanan

Budidaya perikanan meliputi budidaya ikan di kolam, keramba dan sawah, dengan berbagai jenis ikan seperti patin, lele, nila. Peran pemerintah dalam pengembangan budidaya perikanan antara lain; penguatan modal usaha budidaya berupa benih, pakan dan sarana produksi. Disamping itu juga dengan bimbingan melalui penyuluhan maupun pelatihan serta akses permodalan ke pemilik modal/perbankan. Dengan berkembangnya usaha budidaya perikanan diharapkan produksi ikan terus meningkat guna mencukupi kebutuhan ikan bagi masyarakat.

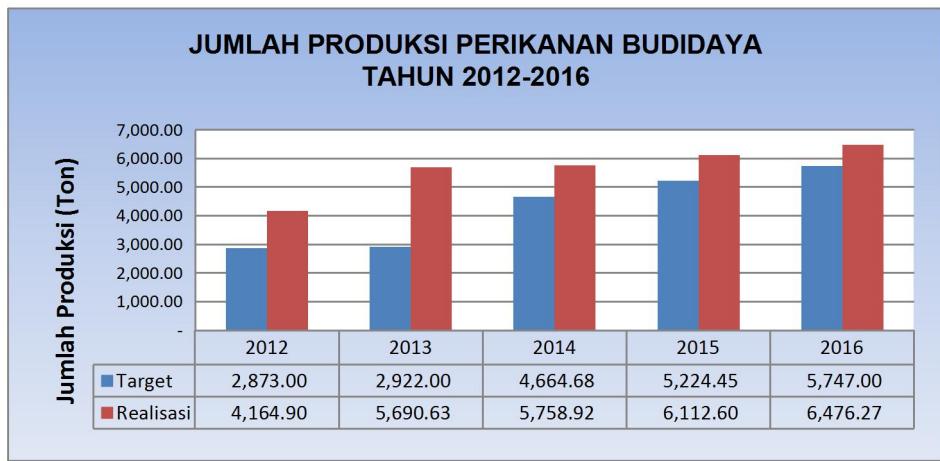
Capaian kinerja produksi perikanan budidaya tahun 2016 sebesar 112,69 persen, atau 6.476,27 ton dari target 5.224,45 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015, produksi perikanan budidaya tahun 2016 mengalami peningkatan 5,95 persen atau sebesar 363,67 ton. Produksi perikanan budidaya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,48 persen atau 577,84 ton.

Tingkat produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.1.b.3 dibawah ini:

Grafik 3.1.b.3
Capaian kinerja produksi perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 - 2016



Grafik 3.1.b.3
Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012-2016



3.1.a.2 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu dari sekian banyak faktor pendukung bergeraknya roda perekonomian bangsa Indonesia, untuk itu diharapkan setiap harinya pertumbuhan UMK akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan/kegagalan usaha ini, tanpa mengetahui manajemen didalam mengelola usaha tentu saja mengakibatkan usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik, stagnasi, jalan ditempat bahkan cenderung mengalami kegagalan usaha. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap UMKM tersebut agar kegiatannya dapat berjalan. Pada tahun 2015 jumlah UMKM aktif yang menjadi binaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebanyak 4.123 UMKM dan terjadi peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 4.546 UMKM.

Sasaran 3.1.c : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Pada tahun 2016 angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim sebesar 55,55 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 77,10 persen. Tidak tercapainya angka partisipasi angkatan kerja tahun 2016 dikarenakan masih terbatasnya kesempatan kerja dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi sehingga berpengaruh pada tingkat angka partisipasi angkatan kerja.

Pencapaian angka partisipasi angkatan kerja tahun 2016 didapat dari jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas sebesar 248.858 di bagi

dengan penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 492.272, sehingga total angka partisipasi angkatan kerja sebesar 50,55 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan Program peningkatan kesempatan kerja. SKPD penanggung jawab adalah SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.1.c.1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Muara Enim bertujuan agar terciptanya tenaga kerja yang



terampil dan mandiri, Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa pelatihan tenaga kerja baik yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun pelatihan kewirausahaan.

a. pelatihan berbasis kompetensi.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi berupa pelatihan sablon, tata rias, elektro, otomotif dan las listrik. Pelatihan tersebut di laksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, adapun peserta yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 296 tenaga kerja dari 394 tenaga kerja yang mendaftar atau 75,13 persen. Adapun tujuan dilaksanakannya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi tersebut agar dapat terciptanya usaha pemula atau wirausaha baru yang mandiri sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim.

Pencapaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel 3.1.c.a berikut:

Tabel 3.1.c.a
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Tahun 2014 - 2016

No	Uraian	Target			Realisasi		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Σ Tenaga Kerja yang dilatih	80	80	296	80	80	296
2	Σ Pendaftar pelatihan	200	123	394	145	123	394
	<i>Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</i>	40%	65%	75%	55%	65%	75%

b. Pelatihan berbasis masyarakat.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat berupa pelatihan menjahit. Pelatihan tersebut di laksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, adapun peserta yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 70 tenaga kerja dari 116 tenaga kerja yang mendaftar atau 60,34 persen. Adapun tujuan dilaksanakannya pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat tersebut agar dapat terciptanya usaha mandiri atau wirausaha yang mandiri sesuai dengan bidang usaha yang ada, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim.

Pencapaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel 3.1.c.b berikut:

Tabel 3.1.c.b
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Target			Realisasi		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Σ Tenaga Kerja yang dilatih	30	90	70	70	90	70

2	Σ Pendaftar pelatihan	85	257	117	175	257	116
	<i>Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</i>	35%	35%	60%	40%	35%	60.34%

c. Pelatihan berbasis kewirausahaan.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan berupa pelatihan tata rias. Pelatihan tersebut di laksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, adapun peserta yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 40 tenaga kerja dari 67 tenaga kerja yang mendaftar atau 59,70 persen. Adapun tujuan dilaksanakannya pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan tersebut agar dapat terciptanya wirausaha yang mandiri sesuai dengan keahlian usaha yang ada, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada table 3.1.c.c berikut:

Tabel 3.1.a.1c
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Target			Realisasi		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Σ Tenaga Kerja yang dilatih	40	45	40	20	45	40
2	Σ Pendaftar pelatihan	200	100	66	40	100	67
	<i>Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan</i>	40%	45%	60%	50%	45%	59,70%

3.1.a.2. Program peningkatan kesempatan kerja.

program peningkatan kesempatan kerja tahun 2016 diukur dengan besaran tenaga kerja yang terdaftar yang di tempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar.

Pada tahun 2016 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim berjumlah 1.621 pencari kerja, adapun tenaga kerja yang telah ditempatkan sebesar 1.137 pencari kerja atau sebesar 70 persen.

Guna membuka kesempatan penempatan tenaga kerja Indonesia pada umumnya dan tenaga kerja lokal pada khususnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 telah melakukan pendataan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di perusahaan – perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim, mengingat dengan banyaknya tenaga kerja asing di perusahaan – perusahaan dapat menyebabkan angka pertisipasi angkatan kerja menjadi rendah.

Pencapaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan, hal tersebut dari hal tersebut dapat dilihat pada table 3.1.a.2 dibawah ini:

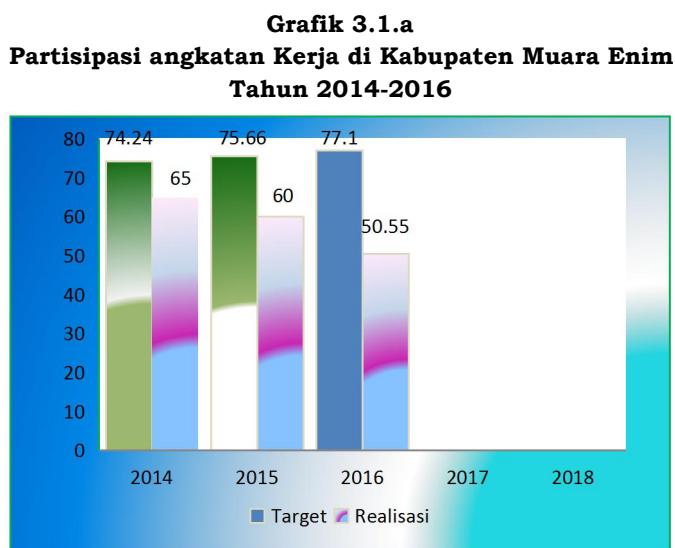
Tabel 3.1.a.2
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Tahun 2013 – 2016

No	Uraian	Target			Realisasi		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Σ Pencari kerja yang ditempatkan	30	600	1137	68	600	1137
2	Σ Pencari kerja yang terdaftar	85	1000	1621	113	1000	1621
	Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang di tempatkan	45%	60%	70%	60%	60%	70%

Meningkatnya program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja dapat dilihat dari tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Muara Enim Tahun 2016. Pada tahun 2016 angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim sebesar 50,55 persen. Pencapaian angka partisipasi angkatan kerja tersebut lebih rendah dari target yang

ditetapkan sebesar 77,10 persen ini disebabkan karena terbatasnya kesempatan kerja dan kebutuhan hidup semakin tinggi sehingga berpengaruh kepada tingkat angka partisipasi angkatan kerja.

Pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dari grafik 3.1.a berikut :



Sasaran 3.1.d : Meningkatnya penyediaaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian.

capaian sasaran meningkatnya penyediaaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian tahun 2016 dinilai jaringan jalan dalam kondisi baik dengan target 83,59 persen, jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target 75,43 persen, kepala keluarga teraliri listrik dengan target 68,86 persen, desa yang memiliki akses terhadap pasar yang memadai dengan target 92 persen, Bank Pengkreditan Rakyat aktif dengan target 1 unit, UKM non BPR/LKM aktif dengan target 4.479 unit, dan koperasi aktif dengan target 90 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu program pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program perencanaan pembangunan ekonomi, dan program penciptaan iklim

usaha kecil menengah yang kondusif, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. SKPD penanggung jawab adalah skpd dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan, dinas pertambangan dan energi, sekretariat daerah, dan dinas koperasi dan ukm.

3.1.d.1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Keberhasilan program pembangunan jalan dan jembatan tahun 2016 diukur dengan indikator Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik dengan target 68,31 persen.

Persentase kondisi jalan yang kualifikasi baik pada tahun 2016 mempunyai target sebesar 83,59 persen, dan terealisasi sebesar 68,31



persen atau 81,72. Berdasarkan sumber data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan tahun 2016 diperoleh data panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Muara Enim sepanjang 939.520 km meningkat dari tahun sebelumnya sepanjang 915.51 km sehingga terdapat peningkatan sebesar 24.01 km, Data Panjang Jalan Kabupaten tahun 2016 sepanjang 1.375,336 Km meningkat dari tahun sebelumnya dengan panjang jalan 1.358,13 km sehingga terdapat peningkatan sebesar 17.206 km, atau 68,31 persen. Selain pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Muara Enim membangun jembatan sebanyak 8 jembatan dengan panjang 531 meter

Permasalahan Capaian Kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Jaringan Jalan dengan Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Andal dengan Kondisi yang Berkualitas tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

1. Semakin bertambahnya jalan yang mengalami kerusakan
2. Banyaknya kegiatan pembukaan jalan baru yang kondisinya masih perlu ditingkatkan, hal ini belum dapat menunjukkan kondisi baik karena jalan tersebut berupa tanah/ lapis agregat.

Terhadap permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengambil langkah-langkah agar target kinerja akhir tahun RPJMD dapat tercapai, diantaranya:

1. Lebih memprioritaskan perbaikan jalan yang mengalami kondisi rusak parah untuk dimasukkan dalam program rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
2. Segera meningkatkan jalan baru yang telah dibuka agar menjadi kondisi jalan yang baik misalnya jalan kondisi dengan lapis agregat menjadi lapis perkerasan berupa aspal atau beton.

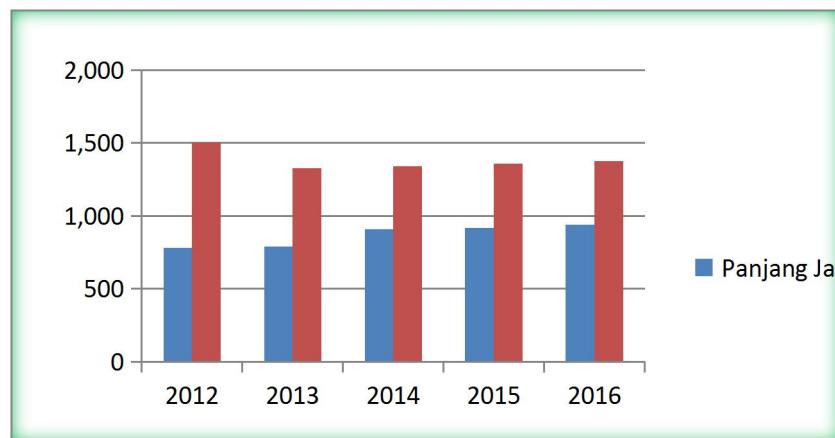
Panjang Jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2016, ini dapat dilihat dari table 3.1.d.1 berikut :

**Tabel 3.1.d.1.
Panjang jalan kondisi baik dan Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 - 2016**

Keterangan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan kondisi baik (Km)	779.59	790.77	910.012	915.51	939.520
Panjang jalan Kabupaten (Km)	1.505,9	1.328,82	1.341,014	1.358,13	1.375,336

Pencapaian indikator Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3.1.d.1 berikut:

**Grafik 3.1.b.1
jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 - 2016**



3.1.d.2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Keberhasilan program -program pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun 2016 diukur dengan indikator Jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target 79,77 persen.

Indikator ini merupakan perbandingan dalam bentuk persentase yang membandingkan luas irigasi Kabupaten Muara Enim dalam kondisi baik dan dinyatakan dalam Ha dengan luas irigasi seluruh Kabupaten Muara Enim yang dinyatakan dalam Ha. Target Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik pada tahun 2016 sebesar 79,77 persen, terealisasi sebesar 71,84 persen, atau 90 persen. Realisasi 71,84 persen didapat dari perbandingan luas irigasi di Kabupaten Muara Enim seluas 15.358,25 Ha dengan luas irigasi dalam kondisi baik seluas 11.034,00 Ha.

Berdasarkan sumber data Dinas PU Bina Marga dan Pengairan tahun 2016 diperoleh data Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha) di Kabupaten Muara Enim sepanjang 11.034,00 Ha meningkat dari tahun 2015 sepanjang 10.702,00 Ha sehingga terdapat peningkatan sebesar 332 Ha.

Capaian Kinerja pada Indikator Meningkatnya Jaringan Irigasi Guna Menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

1. Tingginya curah hujan yang menyebabkan terjadinya bencana longsor pada saluran irigasi sehingga kondisi baik pada saluran irigasi berkurang;
2. Kondisi geografis yang beragam dan area pertanian yang luas maka konstruksi dilakukan bertahap.

Terhadap permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengambil langkah-langkah agar target kinerja akhir tahun RPJMD dapat tercapai, diantaranya:

1. Memprioritaskan daerah irigasi yang mengalami longsor pada program rehabilitasi daerah irigasi;

- Memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi baru sesuai kebutuhan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

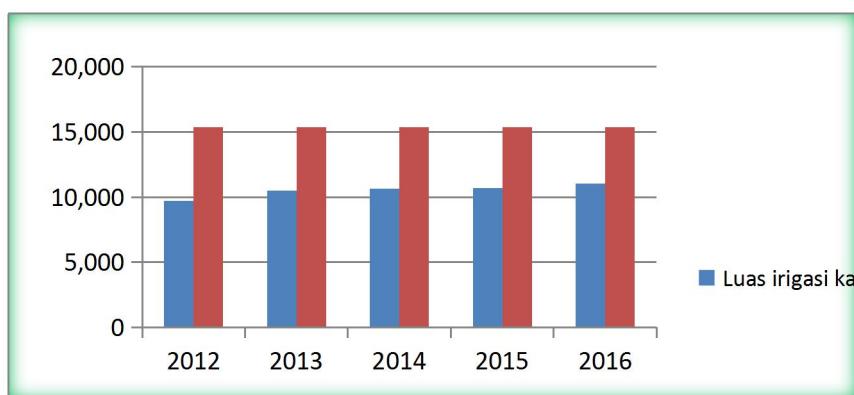
Peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari tabel 3.1.d.2 berikut :

Tabel 3.1.d.2
Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik
Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016	79,77%	71.84%	100,2%
2.	2015	75,43%	69.68%	92,37%
3.	2014	71,99%	69.20%	96,12%
4.	2013	68,22%	68.22%	100%
5.	2012	63,20%	63.10%	99,84%

Pencapaian indikator jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.1.d.2 berikut :

Grafik 3.1.d.2
Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 – 2016



3.1.d.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan tahun 2016 diukur dengan persentase KK teraliri listrik dengan target 68,86 persen, terealisasi 81,60 persen atau 100 persen.

Jumlah KK yang teraliri listrik di dukung dengan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan dicapai dengan kegiatan

koordinasi pengembangan ketenagalistrikan, pengadaan kwh meter gratis, penyediaan penerangan umum dan pembangunan jaringan listrik



perdesaan pada Periode sekarang sebesar 100 persen dengan jumlah desa dan kelurahan yang sudah berlistrik sebanyak 253 desa dan kelurahan. Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang ada pada tahun 2016 sebanyak 255

desa/kelurahan, dengan perbandingan diatas dapat dihitung persentase jumlah desa yang sudah berlistrik sebesar 99.22 persen. Sedangkan jumlah Desa /Kelurahan yang belum berlistrik sampai dengan Periode tahun 2016 berjumlah 2 (dua) Desa/Kelurahan. Apabila dihitung dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di Kabupaten Muara Enim sebanyak 157.025 KK yang telah teraliri listrik sebanyak 128.134 KK dengan persentase KK berlistrik (Rasio Elektifikasi) sebesar 81,60 persen. Data tambahan untuk tahun 2016 ada bantuan KWH Gratis sebanyak 3000 KWH untuk 20 Kecamatan.

Kegiatan Penunjang tercapainya sasaran tersebut tersebut diatas dapat dijelaskan pada tabel 3.1.d.3 berikut :

**Tabel 3.1.d.3
Data Rasio Elektifikasi Desa Berlistrik Dalam Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

NO	KABUPATEN / KOTA / DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	BERLISTRIK				SUMBER PEMBANGUNAN	KETERANGAN
			SUDAH (PLGN)	BELUM (KK)	RASIO ELETRIFIKASI PER DESA	RASIO ELETRIFI KASI PER KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6		8	9
SEMENDO DARAT LAUT								
1	1 Pulau Panggung	1000	660	603	66.00%	74.85%	PLN (APBN)	
	2 Babatan	539		539	0.00%		PLTMH (APBN)	
	3 Penindaian	217		217	0.00%		-	BLM BERLISTRIK
	4 Karyanyata	280	236	44	84.29%		Kabupaten (APBD)	
	5 Muara Dua	340	246	94	72.35%		PLN (APBN)	

	6	Muara Danau	273	255	18	93.41%		PLN (APBN)	
	7	Penyandingan	299	332	0	100%		PLN (APBN)	
	8	Tanah Abang	347	308	39	88.76%		PLN (APBN)	
	9	Pagar Agung	205	205	0	100.00%		PLN (APBN)	
	10	Perapau	153	197	-44	128.76%		PLN (APBN)	
	11	Sawah Lebar		169					
	12	Tebat Besar		151					
2	SEMENDO DARAT TENGAH								
	1	Tanjung Raya	301	242	54	82.06%	87.39%	PLN (APBN)	
	2	Gunung Agung	371	233	138	62.80%		PLN (APBN)	
	3	Rekimai Jaya	234	236	-2	100.85%		Provinsi (APBN)	
	4	Tenam Bungkuk	290	253	37	87.24%		PLN (APBN)	
	5	Kota Padang	270	191	79	70.74%		PLN (APBN)	
	6	Seri Tanjung	89	173	-75	194.38%		PLN (APBN)	
	7	Tebing Abang	176	153	23	86.93%		PLN (APBN)	
	8	Batu Surau	200	200	0	100.00%		PLN (APBN)	
	9	Muara Tenang	214					PLN (APBN)	
	10	Palak Tanah	269					PLN (APBN)	
	11	Kota Agung	240					PLN (APBN)	
	12	Swarna Dwipa	161	156	3	98.14%		Kabupaten (APBD)	APBD INDUK 2013
3	13	Tg Iman		161					
	SEMENDO DARAT ULU								
	1	Aremantai	730	422	308	57.81%	67.02%	PLN (APBN)	
	2	Tj. Tebat/Segamit	748	755	-7	100.00%		PLN (APBN)	
	3	Tanjung Tiga	357	128	229	35.85%		Provinsi (APBN)	
	4	Tanjung Agung	353	196	157	52.41%		Kabupaten (APBD)	
	5	Cahaya Alam	498	245	253	45.78%		Kabupaten (APBD)	
	6	Datar Lebar	238	238	0	100.00%		Kabupaten (APBD)	
	7	Siring Agung	151	186	-35	123.18%		PLN (APBN)	
	8	Pajar Bulan	704	162	242	65.63%		PLN (APBN)	
	9	Pelakat	178	148	30	83.15%		APBD+PTBA	PLTMH 32 Kva
	10	Danau Gerak	191		191	0.00%		-	BLM BERLISTRIK
4	BENAKAT								
	1	Padang Bindu	735	281	454	38.23%	78.60%	PLN (APBN)	
	2	Hidup Baru	342	314	28	91.81%		Kabupaten (APBD)	
	3	Betung	298	298	0	100.00%		PLN (APBN)	
	4	Pagar Dewa	468	313	155	68.88%		PLN (APBN)	

	5	Rami Pasai	216	193	23	89.35%		PLN (APBN)		
	6	Pagar Jati	376	457	-18	121.54%		PLN (APBN)		
	7	Benakat		8						
	8	Simpang Benakat		21						
	9	Bantaian		29						
5	GUNUNG MEGANG									
	1	Gunung Megang Dalam	1155	555	600	43.12%	68.63%	PLN (APBN)		
	2	Bangun Sari	717	531	186	74.06%		Kabupaten (APBD)		
	3	Sumaja Makmur	889	657	232	73.90%		PLN (APBN)		
	4	Kayu Ara Sakti	266	173	93	65.04%		Kabupaten (APBD)		
	5	Sidomulyo	322	204	118	63.35%		PLN (APBN)		
	6	Fajar Indah	408	308	100	75.49%		PLN (APBN)		
	7	Pananggiran	914	926	-12	101.31%		PLN (APBN)		
	8	Gunung Megang Luar	805	267	538	33.17%		PLN (APBN)		
	9	Lubuk Mumpo	628	311	317	49.52%		PLN (APBN)		
	10	Perjito	496	403	93	81.25%		PLN (APBN)		
	11	Tanjung Muning	402	242	160	60.20%		PLN (APBN)		
	12	Tanjung Terang	601	271	330	45.09%		PLN (APBN)		
	13	Panang Jaya	1279	785	494	61.38%		PLN (APBN)		
	14	Ds. Gunung Megang		463						
6	BELIMBING									
	1	Berugo	208	99	109	47.60%	73.50%	PLN (APBN)		
	2	Cinta kasih	1070	1,089	-19	101.78%		PLN (APBN)		
	3	Darmo Kasih	260	150	110	57.69%		PLN (APBN)		
	4	Bulang	557	328	229	58.89%		PLN (APBN)		
	5	Dalam	944	399	545	42.27%		PLN (APBN)		
	6	Tanjung	399	110	289	27.57%		PLN (APBN)		
	7	Teluk Lubuk	1236	944	292	76.38%		PLN (APBN)		
	8	Belimbing	534	713	78	90.14%		PLN (APBN)		
	9	Belimbing Jaya	257					PLN (APBN)		
7	10	Simpang Tanjung	549	389	160	70.86%	75.99%	PLN (APBN)		
	11	Jl. Negara		199						
	RAMBANG DANGKU									
	1	Tebat Agung	1,235	1,272	-42	103.40%		PLN (APBN)		
7	2	Suban Jeriji	1,021	580	441	56.81%	75.99%	Kabupaten (APBD)		
	3	Gunung Raja	782	550	402	57.77%		Kabupaten (APBD)		
	4	Pangkalan Babat	170					Kabupaten (APBD)		

	5	Air Limau	587	361	226	61.50%		Kabupaten (APBD)
	6	Air Talas	278	221	57	79.50%		PLN (APBN)
	7	Manunggal Makmur	476	96	380	20.17%		PLN (APBN)
	8	Aur Duri	609	150	459	24.63%		PLN (APBN)
	9	Gemawang	542	256	286	47.23%		PLN (APBN)
	10	Lubuk Raman	1,171	857	314	73.19%		PLN (APBN)
	11	Jemenang	951	591	360	62.15%		PLN (APBN)
	12	Tanjung Menang	316	503	-187	159.18%		PLN (APBN)
	13	Gerinam	194	100	94	48.45%		PLN (APBN)
	14	Muara Niru	374	190	184	50.80%		PLN (APBN)
	15	Banuayu	1,217	383	834	31.47%		PLN (APBN)
	16	Kuripan	479	337	142	70.35%		PLN (APBN)
	17	Batu Raja	445	325	120	73.03%		PLN (APBN)
	18	Dangku	525	369	156	70.29%		PLN (APBN)
	19	Siku	628	500	128	79.62%		PLN (APBN)
	20	Manunggal Jaya	627	389	238	62.04%		PLN (APBN)
	21	Muara Emburung	384	352	32	91.67%		PLN (APBN)
	22	Air Enau	396	262	134	66.16%		Kabupaten (APBD)
	23	Kasih Dewa	186	124	62	66.67%		PLN (APBN)
	24	Air Cekdam	363	158	205	43.53%		PLN (APBN)
	25	Kahuripan Baru	230	103	127	44.78%		Kabupaten (APBD)
	26	Kuripan Selatan	137	116	21	84.67%		PLN (APBN)
	27	Air Abang		105				
	28	Ladangan		77				
	29	Kemang Tanduk		309				
	30	Talang Padang		238				
	31	Air Rotan		120				
	32	Talang Bernai		228				
	33	KP Kelompok		131				
	34	Karya Mulya		251				
	35	Sinar Rambang		41				
	36	Talang Besar		54				
	37	Talang Kemis		180				
RAMBANG								
8	1	Sumber Rahayu	1,054	875	179	83.02%	82.22%	PLN (APBN)
	2	Marga Mulia	732	513	219	70.08%		Kabupaten (APBD)
	3	Kencana Mulia	454	408	51	88.77%		Kabupaten (APBD)

	4	Baru Rambang	303	219	84	72.28%		PLN (APBN)		
	5	Sugihan	679	645	34	94.99%		PLN (APBN)		
	6	Tanjung Raya	442	334	108	75.57%		PLN (APBN)		
	7	Tanjung Dalam	228	202	26	88.05%		PLN (APBN)		
	8	Sukarami	279	194	85	55.56%		PLN (APBN)		
	9	Pagar Agung	821	516	305	61.39%		PLN (APBN)		
	10	Sugih Waras	645	1,152	103	91.79%		PLN (APBN)		
	11	Sugih Waras Barat	610					PLN (APBN)		
	12	Negeri Agung	250	146	104	58.40%		PLN (APBN)		
	13	Air Keruh	98	109	4	96.46%		Kabupaten (APBD)		
	14	Sukananti		127						
	LUBAI									
	1	Beringin	1,036	771	265	74.42%	73.46%	PLN (APBN)		
	2	Aur	687	359	328	52.26%		PLN (APBN)		
	3	Kota Baru	561	415	146	73.98%		PLN (APBN)		
	4	Pagar Gunung	528	293	235	55.49%		PLN (APBN)		
	5	Gunung Raja	697	539	158	77.33%		PLN (APBN)		
	6	Tanjung Kemala	598	454	144	75.92%		PLN (APBN)		
	7	Suka Merindu	651	414	237	63.59%		PLN (APBN)		
	8	Jiwa Baru	766	558	208	72.85%		PLN (APBN)		
	9	Air Asam	393	331	62	84.22%		PLN (APBN)		
	10	Menanti	259	403	-144	155.60%		PLN (APBN)		
	LUBAI ULU									
	1	Sumber Mulya	1,700	747	953	43.94%	98.32%	PLN (APBN)		
	2	Karang Mulia	828	827	1	99.88%		PLN (APBN)		
	3	Mekarjaya	360	212	148	58.89%		Kabupaten (APBD)		
	4	Lubai Persada	350	343	7	98.00%		Kabupaten (APBD)		
	5	Lubai Makmur	165	113	52	68.48%		Kabupaten (APBD)		
	6	Lecah	386	204	182	52.85%		PLN (APBN)		
	7	Prabumenang	524	681	-157	129.96%		PLN (APBN)		
	8	Pagar Dewa	854	399	455	46.72%		PLN (APBN)		
	9	Karang Agung	1,646	1,101	545	66.89%		PLN (APBN)		
	10	Sumber Asri	440	378	62	85.91%		PLN (APBN)		
	11	Karang Sari	616	445	171	72.24%		PLN (APBN)		
	12	Jungai		120						
	13	Karang Bindu		161						
	14	Karangan		178						

	15	Karya Mulya		279				
	16	Rambang Seruling		80				
	17	Ds. Air Rambang		72				
	18	Ds. Karang Makmur		209				
	19	Ds. T. Miring		258				
	20	Ds. Tangai		90				
	21	Tj. Rambang		249				
	22	BSP		591				
GELUMBANG								
11	1	Kel. Gelumbang	1,949	1,811	138	92.92%	69.35%	PLN (APBN)
	2	Pinang Banjar	376	188	188	50.00%		PLN (APBN)
	3	Melilian	463	226	237	48.81%		Kabupaten (APBD)
	4	Gaung Telang	416	415	1	99.76%		PLN (APBN)
	5	Segayam	1,234	1,048	186	84.93%		PLN (APBN)
	6	Tambangan Kelekar	930	717	213	77.10%		PLN (APBN)
	7	Suka Menang	962	477	485	49.58%		PLN (APBN)
	8	Karang Endah	1,567	1,551	16	98.98%		PLN (APBN)
	9	Jambu	418	370	48	88.52%		PLN (APBN)
	10	Midar	489	326	163	66.67%		PLN (APBN)
	11	Pedataran	479	251	228	52.40%		PLN (APBN)
	12	Teluk Limau	482	318	164	65.98%		PLN (APBN)
	13	Karta Mulia	465	378	87	81.29%		PLN (APBN)
	14	Sebau	876	732	144	83.56%		PLN (APBN)
	15	Sigam	931	835	96	89.69%		PLN (APBN)
	16	Paya Bakal	471	408	63	86.62%		PLN (APBN)
	17	Bitis	476	296	180	62.18%		PLN (APBN)
	18	Gumai	779	405	374	51.99%		PLN (APBN)
	19	Putak	872	192	680	22.02%		PLN (APBN)
	20	Talang Taling	1,071	527	554	49.21%		PLN (APBN)
	21	Suka Jaya	274	192	82	70.07%		PLN (APBN)
	22	Karang Endah Selatan	958	25	933	2.61%		PLN (APBN)
	23	Betung	136	79	57	58.09%		PLN (APBN)
	24	GG. Perintis		74				
KELEKAR								
12	1	Menanti	720	807	-87	112.08%	85.25%	PLN (APBN)
	2	Embacang Kelekar	523	513	10	98.09%		PLN (APBN)
	3	Teluk Jaya	381	258	123	67.72%		PLN (APBN)

	4	Suban Baru	331	258	73	77.95%		Kabupaten (APBD)	
	5	Tanjung Medang	343	241	106	70.26%		PLN (APBN)	
	6	Pelempang	417	239	178	57.31%		PLN (APBN)	
	7	Menanti Selatan	106	89	17	83.96%		PLN (APBN)	
	MUARA BELIDA								
13	1	Gedung Buruk	254	256	-2	100.79%	97.59%	APBN & APBD	PLTS & PLN
	2	Arisan Musi	308	226	82	73.38%		APBN & APBD	
	3	Harapan Mulya	202	248	-46	93.07%		APBN & APBD	
	4	Arisan Musi Timur	234	292	-58	124.79%		APBN & APBD	
	5	Patra Tani	215	220	-5	102.33%		APBN & APBD	
	6	Tanjung Baru	390	290	100	74.36%		APBN & APBD	
	7	Kayu Ara Batu	274	292	-18	106.57%		APBN & APBD	
	8	Mulia Abadi	243	245	-2	100.82%		APBN & APBD	
	BELIDE DARAT								
14	1	Sialingan	423	418	5	98.82%	94.29%	PLN (APBN)	
	2	Talang Balai	462	349	113	75.54%		PLN (APBN)	
	3	Lubuk Sementung	237	292	-55	123.21%		PLN (APBN)	
	4	Lubuk Getam	290	272	18	93.79%		PLN (APBN)	
	5	Babat	351	358	-7	101.99%		PLN (APBN)	
	6	Tanjung Bunut	428	383	45	89.49%		PLN (APBN)	
	7	Ibul	300	296	4	98.67%		PLN (APBN)	
	8	Gaung Asam	595	461	134	77.48%		PLN (APBN)	
	9	Tanjung Tiga	179	211	-32	117.18%		Kabupaten (APBD)	
	10	Talang Beliung	133	164	-31	123.31%		PLN (APBN)	
	LEMBAK								
15	1	Petanang	548	392	156	71.53%	83.42%	PLN (APBN)	
	2	Talang Nangka	618	401	217	64.89%		PLN (APBN)	
	3	Kemang	679	597	82	87.92%		PLN (APBN)	
	4	Alai	787	864	-77	109.78%		PLN (APBN)	
	5	Lembak	1.277	1.071	206	83.87%		PLN (APBN)	
	6	Sungai Duren	231	187	44	80.95%		Kabupaten (APBD)	
	7	Tapus	453	429	24	94.70%		PLN (APBN)	
	8	Tanjung Baru	259	181	78	69.88%		PLN (APBN)	
	9	Alai Selatan	247	108	139	43.73%		PLN (APBN)	
	10	Lubuk Enau	228	214	14	93.89%		PLN (APBN)	
	SUNGAI ROTAN								
16	1	Modong	662	515	147	77.79%		PLN (APBN)	

	2	Sukamaju	227	134	83	59.03%	65.65%	PLN (APBN)	
	3	Tanjung Miring	319	214	105	64.26%		PLN (APBN)	
	4	Danau Tampang	305	188	117	67.08%		PLN (APBN)	
	5	Kasai	379	413	-34	108.97%		PLN (APBN)	
	6	Sungai Rotan	453	306	147	67.55%		PLN (APBN)	
	7	Suka Merindu	510	200	310	39.22%		Kabupaten (APBD)	
	8	Tanding Marga	377	179	198	47.48%		Kabupaten (APBD)	
	9	Muara Lematang	400	398	2	99.50%		Kabupaten (APBD)	
	10	Suka Dana	359	159	200	47.29%		PLN (APBN)	
	11	Suka Cinta	544	222	322	40.81%		PLN (APBN)	
	12	Penandingan	477	303	174	63.52%		PLN (APBN)	
	13	Danau Rata	672	537	135	79.91%		PLN (APBN)	
	14	Paya Angus	330	227	103	68.79%		PLN (APBN)	
	15	Sukarami	688	516	172	75.00%		PLN (APBN)	
	16	Petar Dalam	360	358	2	99.44%		PLN (APBN)	
	17	Suka Jadi	437	240	197	54.92%		PLN (APBN)	
	18	Danau Baru	133	20	133	15.04%		PLN (APBN)	
	19	Petar Luar	299	60	235	21.40%		PLN (APBN)	
TANJUNG AGUNG									
17	1	Tanjung Agung	1.575	1.382	193	87.75%	77.17%	PLN (APBN)	
	2	Padang Bindu	476	231	245	48.53%		PLN (APBN)	
	3	Bedegung	359	280	79	77.99%		PLN (APBN)	
	4	Indra Mayu	287	292	-5	101.74%		PLN (APBN)	
	5	Muara Meo	315	292	23	92.70%		PLN (APBN)	
	6	Lubuk Nipis	650	155	495	23.83%		PLN (APBN)	
	7	Pandan Dulang	120	120	0	100.00%		PLN (APBN)	
	8	Suka Raja	171	142	29	83.04%		PLN (APBN)	
	9	Tanjung Baru	256	251	5	98.05%		PLN (APBN)	
	10	Lambur	302	246	56	81.46%		PLN (APBN)	
	11	Lebak Budi	699	448	251	64.02%		PLN (APBN)	
	12	Embowang	353	243	110	68.84%		PLN (APBN)	
	13	Pagar Dewa	389	242	147	62.21%		PLN (APBN)	
	14	Tanjung Bulan	298	225	73	75.50%		PLN (APBN)	
	15	Lesung Batu	229	236	-7	103.06%		PLN (APBN)	
	16	Pandan Enim	611	274	337	44.84%		PLN (APBN)	
	17	Padu Raksa	537	393	144	73.08%		PLN (APBN)	
	18	Matas	361	311	50	86.15%		PLN (APBN)	

	19	Muara Emil	597	282	315	47.24%		PLN (APBN)	
	20	Tanjung Karangan	623	446	177	71.59%		PLN (APBN)	
	21	Seleman	749	674	75	89.99%		PLN (APBN)	
	22	Penyandingan	400	309	91	77.25%		PLN (APBN)	
	23	Tanjung Lalang	392	392	0	100.00%		PLN (APBN)	
	24	Pulau Panggung	697	621	76	89.10%		PLN (APBN)	
	25	Sugihwaras	155	250	-95	161.29%		PLN (APBN)	
	26	Pagar Jati	127	117	10	92.13%		PLN (APBN)	
	27	Desa Utun / SP/Ampek		197					
	MUARA ENIM								
18	1	Kel. Muara Enim	2,825	1,320	1,505	46.73%	96.49%	PLN (APBN)	
	2	Kel. Pasar II	1,931	1,685	246	87.26%		PLN (APBN)	
	3	Kel. Pasar III	1,904	1,612	292	84.66%		PLN (APBN)	
	4	Kel. Pasar I	1,515	2,134	-619	140.86%		PLN (APBN)	
	5	Kel. Tungkal	1,249	2,709	-1,460	216.89%		PLN (APBN)	
	6	Tanjung Raja	616	759	-143	123.21%		PLN (APBN)	
	7	Karang Raja	1,525	1,201	324	78.75%		PLN (APBN)	
	8	Muara Lawai	722	573	149	79.36%		PLN (APBN)	
	9	Tanjung Jati	442	474	-32	107.24%		PLN (APBN)	
	10	Lubuk Empelas	583	519	64	89.02%		PLN (APBN)	
	11	Kepur	809	389	420	48.08%		PLN (APBN)	
	12	Tanjung Serian	442	462	-20	104.52%		PLN (APBN)	
	13	Muara Harapan	520	406	114	78.08%		PLN (APBN)	
	14	Saka Jaya	398	408	-11	102.76%		PLN (APBN)	
	15	Harapan Jaya	469	407	60	87.21%		PLN (APBN)	
	16	Kel. Air Lintang	1,784	1,492	292	83.63%		PLN (APBN)	
	17	Karang endah		343					
	18	Ds. Transad Sosial		215					
	LAWANG KIDUL								
19	1	Kel. Tanjung Enim	3,719	5,418	-1,697	145.63%	95.94%	PLN (APBN)	
	2	Kel. Pasar Tanjung	3,131	2,376	755	75.89%		PLN (APBN)	
	3	Kel. Tanjung Enim Selatan	2,444	2,425	19	99.22%		PLN (APBN)	
	4	Tegal Rejo	3,908	2,500	1,408	63.97%		PLN (APBN)	
	5	Lingga	2,366	3,262	-896	137.87%		PLN (APBN)	
	6	Keban Agung	2,315	1,696	619	73.26%		PLN (APBN)	
	7	Darmo	1,108	545	563	49.19%		PLN (APBN)	
20	UJAN MAS								

	1	Ujan Mas Lama	1,966	674	1,292	34.28%		PLN (APBN)	
	2	Pinang Belarik	702	448	254	63.82%		PLN (APBN)	
	3	Ujan Mas Baru	1,755	1,194	561	68.03%		PLN (APBN)	
	4	Tanjung Raman	490	620	-130	126.53%		PLN (APBN)	
	5	Muara Gula Baru	281	467	-186	166.19%		PLN (APBN)	
	6	Muara Gula Lama	458	458	0	100.00%		PLN (APBN)	
	7	Guci	478	478	0	100.00%		PLN (APBN)	
	8	Ulak Bandung	813	385	428	47.36%		PLN (APBN)	
	9	Lubuk Bata							
	10	Ujan Mas Simpang 3		524					
	11	Lais Jaya		422					
	TOTAL		157,025	128,134					
*	Jumlah Kecamatan :						20		
*	Jumlah Desa :						245		
*	Jumlah Kelurahan:						10		
*	Jumlah Desa + Kelurahan :						255		
*	Jumlah Desa + Kelurahan Berlistrik						253		
*	Jumlah Desa + Kelurahan Belum Berlistrik						2		
*	Persentase Desa/Kelurahan berlistrik						99.22%		
*	Jumlah KK						157,025		
*	Jumlah KK Berlistrik						128,134		
*	Persentase KK berlistrik (Rasio Elektrifikasi)						81.60%		

Sumber Data:

- * Jumlah KK Desa + Kelurahan dari Dinas Capil Kabupaten Muara Enim (**2016**)
- * Jumlah Pelanggan untuk Rayon Muara Enim dari PT.PLN (Persero) Rayon Muara Enim (**2016**)
- * Jumlah Pelanggan untuk Rayon Pendopo dari PT.PLN (Persero) Rayon Pendopo (**2016**)
- * Jumlah Pelanggan untuk Rayon Prabumulih dari PT.PLN (Persero) Rayon Prabumulih (**2016**)

: Data tambahan dari PT. PLN (Persero) di setiap Rayon
* Jumlah KK berlistrik Belum termasuk pelanggan yang berada di wilayah kerja PT. PLN (persero) Rayon lahat

Sudah termasuk data Bantuan KWH Gratis 2016

3.1.d.4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dalam rangka meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian di Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyediakan pasar desa di setiap kecamatan.

Kabupaten Muara Enim memiliki 20 (dua puluh) kecamatan dan 245 desa, 19 kecamatan telah memiliki pasar desa atau 95 persen. 1 (satu) kecamatan yang belum memiliki pasar desa yaitu kecamatan Lawang Kidul.

Tahun 2016 pasar desa yang ada di Kabupaten Muara Enim berjumlah 113 pasar desa yang tersebar di 19 kecamatan yaitu Kecamatan Semende Darat Ulu memiliki 4 pasar desa, Kecamatan Semende Darat Tengah memiliki 4 pasar desa, Kecamatan Semende Darat Laut memiliki 5 pasar desa, Kecamatan Tanjung Agung memiliki 7 pasar desa, Kecamatan Muara Enim memiliki 3 pasar desa, Kecamatan Ujan Mas memiliki 4 pasar desa, Kecamatan Benakat memiliki 3 pasar desa, Kecamatan Gunung Megang memiliki 7 pasar desa, Kecamatan Belimbing memiliki 2 pasar desa, Kecamatan Rambang Dangku memiliki 9 pasar desa, Kecamatan Rambang memiliki 4 pasar desa, Kecamatan Lubai memiliki 7 pasar desa, Kecamatan Lubai Ulu memiliki 7 pasar desa, Kecamatan Lembak memiliki 8 pasar desa, Kecamatan Belide Darat memiliki 8 pasar desa, Kecamatan Kelekar memiliki 5 pasar desa, Kecamatan Sungai Rotan memiliki 7 pasar desa, Kecamatan Gelumbang memiliki 17 pasar desa, dan Kecamatan Muara Belida memiliki 2 pasar desa.

Daftar pasar desa di Kabupaten Muara Enim tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1.d.4 berikut :

Tabel 3.1.b.4
Daftar Pasar Desa di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2011 – 2016

No	Kecamatan / Desa	Status Pengelolaan			Sumber Dana Pembangunan				Kondisi Bangunan				Instansi Yang Membidangi											
		Pendes	Penda	Swasta	APBN	APBD	Prov / Kab / Kota	Swadaya	Swasta	PERMANEN	(Unit)	SEMI	PERMANEN	SEDERHANA	(UNIT)	DIVAS	PASAR	DIVAS	Perindustrian	Perdagangan	Dinas	Pemberdayaan	Perdagangan	LAIN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	Semende Darat Laut																							
	1. Tanah Abang		✓			✓				✓						✓		✓		✓				
	2. Karya Nyata	✓				✓								✓			✓		✓		✓			
	3. Pulau Panggung	✓						✓					✓				✓		✓		✓			
	4. Muara Dua	✓						✓										✓		✓				
	5. Babatan	✓				✓				✓							✓		✓		✓			

2	Semende Darat Ulu							
	1. Aremantai	✓				✓	✓	✓
	2. Pajar Bulan	✓				✓	✓	✓
	3. Cahaya Alam	✓				✓	✓	✓
	4. Tanjung Agung	✓						
3	Semende Darat Tengah							
	1. Kota Agung	✓					✓	✓
	2. Tenam Bungkuk	✓				✓	✓	✓
	3. Rekimai Jaya	✓				✓	✓	✓
	4. Palak Tanah	✓					✓	✓
4	Tanjung Agung							
	1. Lubuk Nipis	✓		✓		✓	✓	✓
	2. Tanjung Agung		✓	✓		✓	✓	✓
	3. Padu Raksa	✓			✓		✓	✓
	4. Sugih Waras	✓		✓		✓	✓	✓
	5. Sleman	✓			✓		✓	✓
	6. Lebak Budi	✓			✓		✓	✓
	7. Pagar Dewa	✓			✓		✓	✓
5	Lawang Kidul							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Muara Enim							
	1. Harapan Jaya	✓			✓		✓	✓
	2. Muara Harapan	✓			✓		✓	✓
	3. Saka Jaya	✓			✓		✓	✓
7	Ujan Mas							
	1. Muara Gula Baru	✓			✓		✓	✓
	2. Ujan Mas Baru	✓			✓		✓	✓
	3. Ujan Mas Lama	✓			✓		✓	✓
	4. Ulak Bandung	✓			✓		✓	✓
8	Gunung Megang							
	1. Gunung Megang Luar	✓		✓		✓	✓	✓
	2. Sumaja Makmur	✓		✓		✓	✓	✓
	3. Panang Jaya	✓		✓		✓	✓	✓
	4. Bangun Sari	✓		✓		✓	✓	✓
	5. Lubuk Mumpo	✓		✓		✓	✓	✓
	6. Kayu Ara Sakti	✓		✓		✓	✓	✓
	7. Fajar Indah	✓		✓		✓	✓	✓
9	Belimbing							
	1. Cinta Kasih	✓		✓			✓	✓
	2. Teluk Lubuk	✓		✓			✓	✓
10	Benakat							
	1. Pagar Dewa	✓		✓		✓	✓	✓
	2. Hidup Baru	✓		✓		✓	✓	✓
	3. Padang Bindu	✓		✓		✓	✓	✓

11	Rambah Dangku								
1.	Tebat Agung	✓		✓			✓		✓
2.	Aur Duri	✓			✓	✓		✓	✓
3.	Banu Ayu	✓		✓			✓		✓
4.	Gumawang	✓		✓		✓		✓	✓
5.	Baturaja	✓			✓		✓		✓
6.	Suban Jeriji	✓				✓		✓	✓
7.	Manunggal Jaya	✓		✓				✓	✓
8.	Air Cekdam	✓		✓				✓	✓
9.	Air Enau	✓		✓				✓	✓
12	Rambah								
1.	Sugih Waras	✓		✓		✓		✓	✓
2.	Sumber Rahayu	✓			✓		✓		✓
3.	Marga Mulia	✓			✓		✓		✓
4.	Pagar Agung	✓			✓		✓		✓
13	Lubai								
1.	Beringin	✓			✓		✓		✓
2.	Tanjung Kemala	✓			✓		✓		✓
3.	Suka Merindu	✓			✓		✓		✓
4.	Air Asam	✓		✓	✓		✓		✓
5.	Aur	✓		✓				✓	✓
6.	Gunung Raja	✓		✓				✓	✓
7.	Kota Baru	✓						✓	✓
14	Lubai Ulu								
1.	Sumber Mulya		✓		✓		✓		✓
2.	Karang Agung	✓			✓		✓		✓
3.	Pagar Dewa	✓			✓		✓		✓
4.	Prabumenang	✓			✓		✓		✓
5.	Lubai Makmur	✓			✓		✓		✓
6.	Mekar Jaya	✓		✓	✓		✓		✓
7.	Karang Mulia	✓			✓		✓		✓
15	Gelumbang								
1.	Teluk Limau			✓	✓	✓		✓	✓
2.	Karta Mulia	✓		✓		✓		✓	✓
3.	Putak	✓		✓		✓		✓	✓
4.	Sigam	✓			✓		✓		✓
5.	Tambang Kelekar	✓			✓		✓		✓
6.	Karang Endah	✓			✓		✓		✓
7.	Paya Bakal	✓			✓		✓		✓
8.	Sebau	✓			✓		✓		✓
9.	Pinang Banjar	✓			✓		✓		✓
10.	Pedataran	✓			✓		✓		✓
11.	Jambu	✓			✓		✓		✓
12.	Gumai	✓		✓				✓	✓
13.	Midar	✓		✓				✓	✓

	14. Talang Taling	✓			✓					✓	✓	
	15. Bitis	✓			✓						✓	
	16. Gaung Telang	✓			✓						✓	
	17. Karang Endah Selatan	✓			✓						✓	
16	Lembak											
	1. Alai	✓			✓		✓		✓	✓		
	2. Kemang	✓			✓		✓		✓	✓		
	3. Tanjung Baru	✓			✓		✓		✓	✓		
	4. Talang Nangka	✓	✓						✓	✓		
	5. Lembak	✓			✓					✓		
	6. Lubuk Enau	✓			✓					✓		
	7. Petanang	✓			✓					✓		
	8. Tapus	✓			✓					✓		
17	Belide Darat									✓	✓	
	1. Tanjung Bunut	✓			✓				✓	✓		
	2. Babat	✓			✓				✓	✓		
	3. Lubuk Semantung	✓			✓				✓	✓		
	4. Lubuk Getam	✓			✓				✓	✓		
	5. Ibul								✓	✓		
	6. Talang Balai	✓			✓			✓	✓	✓		
	7. Gaung Asam'	✓			✓				✓	✓		
	8. Sialingan	✓	✓		✓				✓	✓		
18	Sungai Rotan											
	1. Sukarami	✓			✓		✓		✓	✓		
	2. Muara Lematang	✓			✓		✓		✓	✓		
	3. Teluk Limau	✓			✓		✓		✓	✓		
	4. Kasai	✓			✓			✓	✓	✓		
	5. Danau Rata	✓			✓			✓	✓	✓		
	6. Petar Dalam	✓			✓			✓	✓	✓		
	7. Paya Angus	✓			✓			✓	✓	✓		
19	Muara Belida											
	1. Gedung Buruk	✓			✓			✓	✓	✓		
	2. Harapan Mulya	✓			✓				✓	✓		
20	Kelekar											
	1. Menanti	✓			✓			✓	✓	✓		
	2. Pelempang	✓			✓			✓	✓	✓		
	3. Suban Baru	✓			✓			✓	✓	✓		
	4. Teluk Jaya	✓			✓			✓	✓	✓		
	5. Tanjung Medang'	✓			✓			✓	✓	✓		
J U M L A H		113										

3.1.d.5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 telah memiliki Bank Perkereditan Rakyat yang diberi nama Perusahaan Daerah

BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, dengan berdirinya Perusahaan Daerah BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim maka target Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memiliki BPR aktif telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Muara Enim.

Pendirian BPR di Kabupaten Muara Enim juga terkait dengan dengan berbagai program pemberdayaan perekonomian rakyat yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim selama ini. Salah satu program unggulan adalah program gerbang serasan.

Persiapan pendirian BPR Kabupaten Muara Enim dimulai sejak tahun 2012 melalui penyusunan kajian kelayakan pendirian BPR di Kabupaten Muara Enim dilanjutkan tahun 2013 dengan melakukan kegiatan persiapan dokumen ijin pendirian BPR ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semula dip roses di Bank Indonesia.

Berdasarkan surat Kepala OJK Republik Indonesia tanggal 11 November 2016 telah dilakukan survey ke BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, dan berdasarkan hasil survey tersebut OJK mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-87/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang persetujuan permohonan izin usaha pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.

3.1.d.6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif tahun 2016 diukur dengan Jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan target 4.479 unit, terrealisasi 4.546 unit atau 101 persen.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia memiliki slogan “UKM Kuat Negara Sejahtera”. Tentu saja slogan ini bukan sekedar slogan kosong, melainkan suatu misi yang harus dicapai oleh pemerintah Indonesia guna mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan UKM. Bahwa di samping sektor pertanian, sektor perdagangan juga memiliki andil yang sangat besar terhadap kemajuan perekonomian bangsa.

UKM adalah salah satu dari sekian banyak faktor pendukung bergeraknya roda perekonomian bangsa Indonesia. Tentu saja setiap hari diharapkan pertumbuhan UKM akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan /kegagalan usaha ini. Tanpa mengetahui manajemen di dalam mengelola usaha, tentu saja mengakibatkan usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik, stagnasi, jalan di tempat bahkan cenderung mengalami kegagalan usaha. Untuk itu perlu adanya pemberian pengetahuan tentang mengelola usaha yang sesuai dengan kaidah manajemen.

Tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim melakukan pembinaan kepada 4.123 UKMK , dari jumlah tersebut ditargetkan 2.856 UMKM atau 69,28 persen yang telah menjalankan usaha sesuai dengan kaidah manajemen. Pada tahun 2016 dari hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap UKM yang mendapatkan bantuan dana, baik dari dana pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mengalami pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi dari target yang ditetapkan berjumlah 4.546 UMK atau 101 persen. Dari 4.546 UMKM aktif tersebut, sebanyak 3013 UMKM telah menjalankan usaha menggunakan manajemen yang rapi.

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang aktif di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel 3.1.d.6 berikut :

Tabel 3.1.b.6
Usaha Kecil dan Menengah yang aktif di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2013 – 2016

URAIAN	UMKM AKTIF			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah UKM	3.853	4.093	4.123	4.546

3.1.d.7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Pencapaian Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi tahun 2016 diukur dengan Indikator kinerja Persentase koperasi aktif dengan target 90 persen, realisasi 68,81 persen.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun



2010. Dimana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas yang ditandai dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang ditahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi dikabupaten muara enim dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2014-2016) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dengan adanya penambahan jumlah koperasi aktif sebanyak 22 (dua puluh dua) koperasi pada tahun 2015 dan 9 koperasi pada tahun 2016, sehingga total koperasi aktif sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 331 koperasi. Begitu juga bila dilihat dari jumlah anggota koperasi serta total peningkatan jumlah permodalan dan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh, semuanya menunjukan peningkatan. Data perkembangan koperasi di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada table 1.b.4 berikut:

**Tabel 1.b.4
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014-2016**

NO	Uraian	Satuan	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Total Koperasi	unit	462	481	490
2	Total Koperasi Aktif	unit	300	322	331
3	Total Koperasi Tidak Aktif	unit	162	159	159
4	Koperasi Baru	unit	5	10	9
5	Jumlah Anggota	orang	53.553	53.703	53.863
6	Jumlah Koperasi RAT Tepat waktu	unit	100	100	100

7	Koperasi Yang Telah Memiliki Manager	orang	14	16	16
8	Jumlah Karyawan	orang	241	246	246
9	Modal Sendiri	Rp. juta	43.347	43.351	43.471
10	Modal Luar	Rp. juta	19.425	19.430	19.440
11	Asset	Rp. juta	60.186	60.189	60.192
12	Omzet	Rp. juta	427.999	428.000	428.030
13	SHU	Rp. juta	8.382	8.389	8.392

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Muara Enim menargetkan terjadinya peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 79 persen atau sebanyak 365 koperasi, namun berdasarkan hasil monitoring dan pembinaan sepanjang tahun 2015 diperoleh data penambahan koperasi aktif hanya 22 koperasi, sehingga total koperasi aktif pada tahun 2015 sebanyak 322 koperasi atau 66,94 persen. Demikian juga realisasi capaian target ditahun 2014 yang menargetkan koperasi aktif sebesar 75 persen atau 346 koperasi, tetapi hanya terealisasi 65 persen atau 300 koperasi. Berpedoman dari hasil yang dicapai 2 (dua) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan revisi terhadap target koperasi aktif tahun 2016 – 2018 yang semula target peningkatan koperasi aktif 90 persen diturunkan menjadi 68,18 persen atau 328 koperasi, dan pada tahun 2016 koperasi aktif di kabupaten muara enim mencapai 331 koperasi atau 68,81 persen, berarti target tahun 2016 tercapai.

Penyebab utama sedikitnya koperasi aktif dikarenakan jumlah koperasi yang tidak aktif sejak tahun 2013 sampai 2016 tidak mengalami pengurangan secara signifikan. Adanya penambahan koperasi aktif dikarenakan banyaknya koperasi – koperasi yang baru berdiri bukan karena berkurangnya koperasi yang tidak aktif

Masih tingginya angka koperasi tidak aktif dikarenakan oleh beberapa faktor dominan yaitu:

- Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, hal ini disebabkan dalam pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota namun lebih

menekankan pada aspek bisnis sehingga kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya;

- Keberadaan koperasi tersebut tidak dapat ditelusuri lagi sehingga sulit untuk menemukan pengurus dan anggotanya;
- Pengurus koperasi tidak memiliki kemauan untuk mengaktifkan kembali koperasi mereka yang sudah mati;
- Tidak adanya regenerasi kepengurusan saat pengurus koperasi meninggal dunia atau pindah lokasi tempat tinggal tanpa diketahui alamat;
- Masih banyaknya pengurus koperasi yang berwawasan konvensional sehingga sulit untuk menerapkan sistem pembukuan pada pengelolaan keuangan koperasi karena pengurus berprinsip bahwa modal koperasi adalah modal mereka sendiri sehingga di dalam pengelolaannya tetap berdasarkan sesuai dengan pola mereka.

Secara teori pengurangan koperasi tidak aktif dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi koperasi, artinya bagi koperasi yang sudah tidak aktif lagi dapat diusulkan untuk dibubarkan. Hal ini menjadi tidak efektif karena kondisi dilapangan, kepengurusan koperasi yang tidak aktif tidak dapat ditelusuri lagi keberadaannya. Dengan tidak diketahuinya keberadaan kepengurusan koperasi tersebut secara otomatis pelaksanaan revitalisasi gagal karena Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak dapat membubarkan koperasi tersebut, hal tersebut disebabkan karena masih adanya tunggakan hutang yang masih belum dilunasi oleh koperasi tersebut. Inilah yang menyebabkan jumlah koperasi tidak aktif tidak berkurang selama kurun waktu 3 (tahun) terakhir.

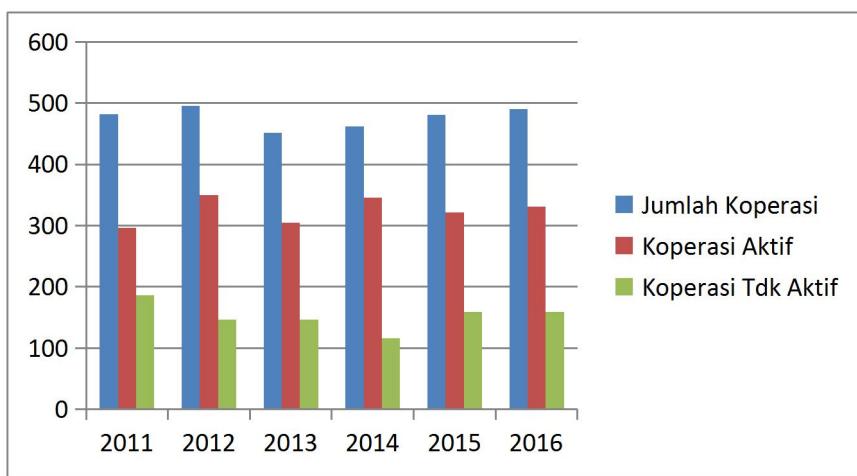
Untuk mengatasi permasalahan di atas, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- b. Melakukan revitalisasi koperasi bagi koperasi tidak aktif yang masih diketahui keberadaan pengurusnya;
- c. Penguatan kelembagaan koperasi;

- d. Melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.

Perkembangan koperasi aktif di Kabupaten Muara Enim dalam 6 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 1.b.4 berikut ini :

Grafik 1.b.4
Indikator persentase koperasi aktif
Tahun 2011 - 2016



Sasaran 4.1.a : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Prestasi capaian meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa tahun 2016 dinilai dari persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes dengan target 67 persen.

Pencapaian target kinerja Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes tahun 2016 terrealisasi 72,1 persen, atau tercapai 107 persen. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut telah mencapai 72,1 persen dari target akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 mengalami peningkatan 19,1 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan

program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. skpd penanggung jawab adalah badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

4.1.a. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Keberhasilan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa tahun 2016 diukur dengan persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes dengan target 67 persen, terealisasi 72,1 persen atau 107 persen.

Capaian indikator persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBdes tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,1 persen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Kepala Desa yang akan memulai masa jabatannya diharuskan menyampaikan RPJMDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan. Semua desa telah menyampaikan RPJMDes dan APBDesnya, karena menjadi persyaratan dalam pencairan dana desa (DD).

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDes dan RKP Desa. Dalam menyusun RPJMDes dan RKP Desa Pemerintah Desa Wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh BPBD dan unsur masyarakat desa. Rancangan RPJMDes dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Rancangan RPJMDes paling sedikit memuat penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJMDes memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar desa yang menyampaikan RPJMDes dan APBDes di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.1.a berikut :

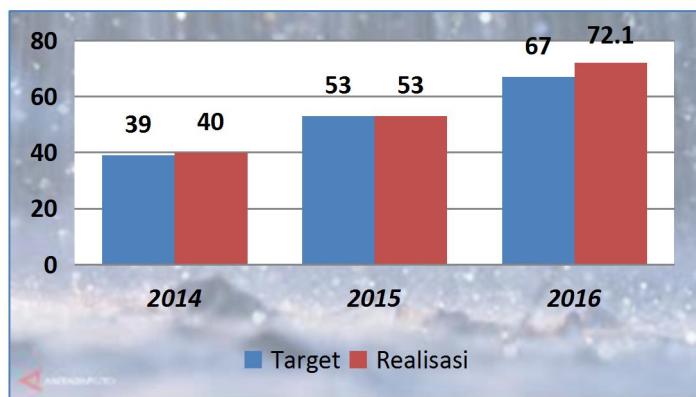
Tabel 4.1.a
Desa yang telah menyampaikan RPJMDes dan APBDes
Tahun 2016

NO	DESA	KECAMATAN
1.	SIRING AGUNG	SEMENDE DARAT ULU
2.	KARYA NYATA	SEMENDE DARAT LAUT
3.	LAMBUR	TANJUNG AGUNG
4.	EMBAWANG	TANJUNG AGUNG
5.	LESUNG BATU	TANJUNG AGUNG
6.	PAGAR JATI	TANJUNG AGUNG
7.	SAKA JAYA	MUARA ENIM
8.	HARAPAN JAYA	MUARA ENIM
9.	TANJUNG RAJA	MUARA ENIM
10.	TANJUNG RAMAN	UJAN MAS
11.	PINANG BELARIK	UJAN MAS
12.	PENANGGIRAN	GUNUNG MEGANG
13.	TANJUNG TERANG	GUNUNG MEGANG
14.	BANGUN SARI	GUNUNG MEGANG
15.	KAYU ARA SAKTI	GUNUNG MEGANG
16.	TELUK LUBUK	BELIMBING
17.	DARMO KASIH	BELIMBING
18.	HIDUP BARU	BENAKAT
19.	RAMI PASAI	BENAKAT
20.	TEBAT AGUNG	RAMBANG DANGKU
21.	LUBUK RAMAN	RAMBANG DANGKU
22.	KURIPAN	RAMBANG DANGKU
23.	BATU RAJA	RAMBANG DANGKU
24.	GUNUNG RAJA	RAMBANG DANGKU
25.	MANUNGGLAL MAKMUR	RAMBANG DANGKU
26.	JEMENANG	RAMBANG DANGKU
27.	GEMAWANG	RAMBANG DANGKU
28.	DANGKU	RAMBANG DANGKU
29.	MUARA EMBURUNG	RAMBANG DANGKU
30.	AIR TALAS	RAMBANG DANGKU
31.	AUR DURI	RAMBANG DANGKU
32.	AIR CEKDAM	RAMBANG DANGKU
33.	KASIH DEWA	RAMBANG DANGKU
34.	KAHURIPAN BARU	RAMBANG DANGKU
35.	KURIPAN SELATAN	RAMBANG DANGKU
36.	GERINAM	RAMBANG DANGKU
37.	SUKARAMI	RAMBANG
38.	SUGIH WARAS	RAMBANG
39.	TANJUNG DALAM	RAMBANG
40.	AIR KERUH	RAMBANG

41.	PAGAR AGUNG	LUBAI
42.	AUR	LUBAI
43.	KOTA BARU	LUBAI
44.	SUKAMERINDU	LUBAI
45.	AIR ASAM	LUBAI
46.	KARANG SARI	LUBAI ULU
47.	KARANG AGUNG	LUBAI ULU
48.	PAGAR DEWA	LUBAI ULU
49.	SUMBER MULIA	LUBAI ULU
50.	LUBAI PERSADA	LUBAI ULU
51.	LEMBAK	LEMBAK
52.	ALAI SELATAN	LEMBAK
53.	LUBUK ENAU	LEMBAK
54.	TALANG BALAI	BELIDA DARAT
55.	TALANG BELIUNG	BELIDA DARAT
56.	GAUNG ASAM	BELIDA DARAT
57.	IBUL	BELIDA DARAT
58.	BABAT	BELIDA DARAT
59.	TANJUNG TIGA	BELIDA DARAT
60.	PINANG BANJAR	GELUMBANG
61.	SEGAYAM	GELUMBANG
62.	GAUNG TELANG	GELUMBANG

Pencapaian indikator Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes di Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1.a berikut :

Grafik 4.1.a
Persentase Desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



Sasaran 4.1.b : Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa.

Prestasi capaian sasaran meningkatnya kapasitas pemerintahan desa tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utamayaitu Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa dengan target 67 persen.

Pencapaian target kinerja Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa tahun 2016 terrealisasi 100 persen atau tercapai 149 persen. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut telah mencapai 100 persen dari target akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 mengalami peningkatan 33 persen persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. SKPD penanggung jawab adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4.1.b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Keberhasilan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa tahun 2016 diukur dengan Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa dengan target 67 persen, terrealisasi 100 persen atau 149 persen.

Dokumen RPJMDes dan APBDes yang telah disusun oleh perangkat desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan pada tahun 2016 semua desa di Kabupaten Muara Enim telah menyusun RPJM Desa dan APBDes dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa karena APBDes merupakan syarat dalam pencairan Dana Desa (DD).

245 desa di Kabupaten Muara Enim yang mampu menyusun Peraturan Desa tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.1.b berikut :

Tabel 4.1.b
Desa yang mampu menyusun Peraturan Desa
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
1.	SEMENDE DARAT ULU	Aremantai
		Siring Agung
		Tanjung Tebat
		Pajar Bulan
		Tanjung Agung
		Datar Lebar
		Cahaya Alam
		Tanjung Tiga

		Danau Gerak
		Pelakat
2.	SEMENDE DARAT TENGAH	Tanjung Raya
		Sri Tanjung
		Tebing Abang
		Batu Surau
		Tenam Bungkuk
		Kota Padang
		Gunung Agung
		Rekimai Jaya
		Muara Tenang
		Palak Tanah
		Kota Agung
		Swarna Dwipa
3.	SEMENDE DARAT LAUT	Pulau Panggung
		Muara Dua
		Muara Danau
		Penyandingan
		Tanah Abang
		Pagar Agung
		Babatan
		Penindaian
		Karya Nyata
		Perapau
4.	TANJUNG AGUNG	Lubuk Nipis.
		Padang Bindu
		Bedegung
		Muara Meo
		Pandan Dulang
		Indera Mayu
		Sukaraja
		Tanjung Baru
		Lambur
		Lebak Budi
		Pandan Enim
		Paduraksa

		Embawang
		Lesung Batu
		Tanjung Bulan
		Pagar Dewa
		Matas
		Tanjung Agung
		Muara Emil
		Tanjung Karangan
		Seleman
		Penyandingan
		Tanjung Lalang
		Pulau Panggung
		Sugihwaras
		Pagar Jati
5.	LAWANG KIDUL	Tegal Rejo
		Darmo
		Lingga
		Keban Agung
6.	MUARA ENIM	Kepur
		Tanjung Serian
		Karang Raja
		Tanjung Raja
		Lubuk Emplas
		Tanjung Jati
		Muara Lawai
		Muara Harapan
		Saka Jaya
		Harapan Jaya
7.	U J A N M A S	Tanjung Raman
		Muara Gula Baru
		Muara Gula Lama
		Pinang Belarik
		Ujan Mas Lama
		Ujan Mas Baru
		Ulak Bandung
		Guci

		Gunung Megang Dalam
		Gunung Megang Luar
		Penanggiran
		Tanjung Terang
		Tanjung Muning
		Lubuk Mumpo
		Bangun Sari
		Sumaja Makmur
		Kara Ayu Sakti
		Sidomulyo
		Pajar Indah
		Panang Jaya
8.	GUNUNG MEGANG	Tanjung
		Cinta Kasih
		Dalam
		Teluk Lubuk
		Darmo Kasih
		Berugo
		Belimbing
		Bulang
		Belimbing Jaya
		Simpang Tanjung
9.	BELIMBING	Padang Bindu
		Pagar Dewa
		Betung
		Pagar Jati
		Hidup Baru
		Ramai Pasai
10.	BENAKAT	Tebat Agung
		Gerinam
		Tanjung Menang
		Jemenang
		Lubuk Raman
		Suban Jeriji
		Gemawang
		Dangku
11.	RAMBANG DANGKU	

		Siku
		Kuripan
		Batu Raja
		Banuayu
		Gunung Raja
		Muara Emburung
		Manunggal Jaya
		Air Talas
		Air Enau
		Manunggal Makmur
		Aur Duri
		Air Cekdam
		Kasih Dewa
		Kahuripan Baru
		Pangkalan Babat
		Kuripan Selatan
12.	RAMBANG	Sumber Rahayu
		Sugihwaras
		Baru Rambang..
		Negeri Agung
		Sugihan
		Sukarami
		Tanjung Dalam
		Tanjung Raya
		Pagar Agung
		Marga Mulya
		Kencana Mulya
		Sugihwaras Barat
		Air Keruh
13.	L U B A I	Beringin
		Aur
		Jiwa Baru
		Kota Baru
		Pagar Gunung
		Gunung Raja
		Tanjung Kemala

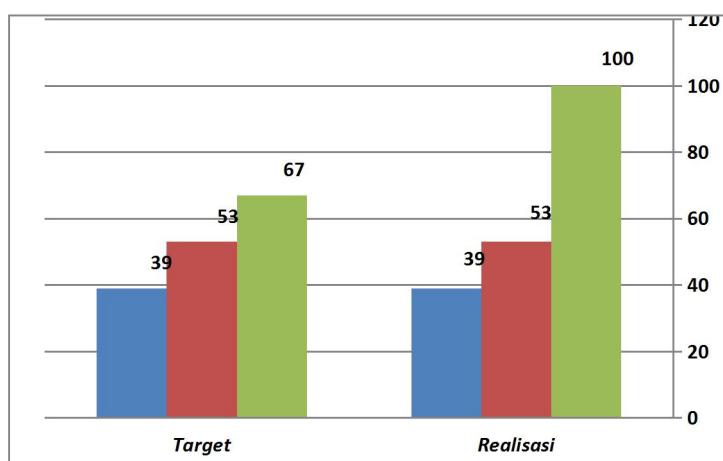
		Sukamerindu
		Air Asam
		Menanti
14.	L U B A I U L U	Karang Agung
		Pagar Dewa
		Prabumenang
		Lecah
		Sumber Rahayu
		Karang Mulya
		Mekar Jaya
		Lubai Persada
		Lubai Makmur
		Sumber Sari
15.	L E M B A K	Karang Sari
		Alai
		Sungai Duren
		Talang Nangka
		Tapus
		Lembak
		Kemang
		Tanjung Baru
		Alai Selatan
16.	B E L I D E D A R A T	Lubuk Enau
		Gaung Asam
		Ibul
		Tanjung Bunut
		Babat
		Sialingan
		Talang Balai
		Lubuk Semantung
		Lubuk Getam
		Tanjung Tiga
17.	G E L U M B A N G	Talang Beliung
		Sukamenang
		Talang Taling
		Putak

		Gumai
		Bitis
		Payabakal
		Sigam
		Karang Endah
		Tambangan Kelekar
		Sebau
		Pinang Banjar
		Segayam
		Karta Mulya
		Jambu
		Midar
		Gaung Telang
		Melilian
		Pedataran
		Teluk Limau
		Suka Jaya
		Karang Endah Selatan
		Betung
18.	SUNGAI ROTAN	Modong
		Tanjung Miring
		Sukacita
		Penandingan
		Danau Rata
		Sukarami
		Sukadana
		Petar Dalam
		Paya Angus
		Danau Tampang
		Kasai
		Sungai Rotan
		Tanding Marga
		Sukamerindu
		Muara Lematang
		Sukajadi
		Sukamaju

		Danau Baru
		Petar Luar
19.	KELEKAR	Menanti
		Suban Baru
		Teluk Jaya
		Pelempang
		Embacang Kelekar
		Tanjung Medang
		Menanti Selatan
20.	MUARA BELIDA	Gedung Buruk
		Arisan Musi
		Harapan Mulya
		Arisan Musi Timur
		Tanjung Baru
		Kayu Ara Batu
		Mulia Abadi
		Patra Tani
	JUMLAH	245 DESA/KELURAHAN

Pencapaian indikator Persentase desa yang mampu menyusun Peraturan Desa di Kabupaten muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1.a berikut :

Grafik 4.1.b
Persentase Desa yang mampu menyusun Peraturan Desa
Tahun 2014-2016



Sasaran 4.1.c : Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Prestasi capaian sasaran meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif dengan target 90 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. SKPD penanggung jawab adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4.1.c. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Keberhasilan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan tahun 2016 diukur dengan persentase LPM aktif dengan target 90 persen, terrealisasi 93,72 persen atau 103 persen.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu organisasi yang berfungsi untuk menggerakkan potensi yang di masyarakat dalam rangka menggerakkan pembangunan di desa. Pada tahun 2016 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kabupaten Muara Enim berjumlah 255 LPM. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan pada tahun 2016 telah melakukan pelatihan kepada 510 orang kader LPM. Dari 255 LPM yang ada hanya 239 LPM yang aktif atau 93,72 persen. Jumlah LPM aktif di Kabupaten Muara Enim terus meningkat dari tahun 2015 berjumlah 217 LPM aktif menjadi 239 LPM aktif pada tahun 2016 atau bertambah 22 LPM aktif.

239 LPM yang aktif di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.1.c berikut :

Tabel 4.1.c
LPM aktif di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Aktif	Tdk Aktif
1.	SEMENDE DARAT ULU	Aremantai	Aktif	
		Siring Agung		Tidak aktif
		Segamit		Tidak aktif

		Pajar Bulan	Aktif	
		Tanjung Agung	Aktif	
		Datar Lebar	Aktif	
		Cahaya Alam	Aktif	
		Tanjung Tiga	Aktif	
		Danau Gerak	Aktif	
		Pelakat	Aktif	
2.	SEMENDE DARAT TENGAH	Tanjung Raya	Aktif	
		Sri Tanjung	Aktif	
		Tebing Abang		Tidak aktif
		Batu Surau	Aktif	
		Tenam Bungkuk	Aktif	
		Kota Padang	Aktif	
		Gunung Agung	Aktif	
		Rekimai Jaya	Aktif	
		Muara Tenang	Aktif	
		Palak Tanah	Aktif	
		Kota Agung	Aktif	
		Swarna Dwipa		Tidak aktif
		Pulau Panggung	Aktif	
		Muara Dua	Aktif	
3.	SEMENDE DARAT LAUT	Muara Danau	Aktif	
		Penyandingan	Aktif	
		Tanah Abang	Aktif	
		Pagar Agung	Aktif	
		Babatan	Aktif	
		Penindaian	Aktif	
		Karya Nyata	Aktif	
		Perapau	Aktif	
		Lubuk Nipis.	Aktif	
		Padang Bindu	Aktif	
4.	TANJUNG AGUNG	Bedegung	Aktif	
		Muara Meo		Tidak aktif
		Pandan Dulang	Aktif	
		Indramayu		Tidak aktif
		Sukaraja	Aktif	
		Tanjung Baru	Aktif	
		Lambur	Aktif	
		Lebak Budi	Aktif	
		Pandan Enim	Aktif	
		Paduraksa	Aktif	
		Embowang	Aktif	
		Lesung Batu	Aktif	
		Tanjung Bulan	Aktif	
		Pagar Dewa	Aktif	

		Matas	Aktif	
		Tanjung Agung	Aktif	
		Muara Emil	Aktif	
		Tanjung Karang	Aktif	
		Seleman	Aktif	
		Penyandingan	Aktif	
		Tanjung Agung	Aktif	
		Pulau Panggung	Aktif	
		Sugihwaras	Aktif	
		Pagar jati	Aktif	
5.	LAWANG KIDUL	Tanjung Enim	Aktif	
		Pasar Tanjung Enim	Aktif	
		Tanjung Enim Selatan	Aktif	
		Tegal Rejo	Aktif	
		Darmo	Aktif	
		Lingga	Aktif	
		Keban Agung	Aktif	
6.	MUARA ENIM	Pasar I Muara Enim	Aktif	
		Pasar II Muara Enim	Aktif	
		Pasar III Muara Enim	Aktif	
		Muara Enim	Aktif	
		Air Lintang	Aktif	
		Tungkal	Aktif	
		K e p u r	Aktif	
		Tanjung Serian	Aktif	
		Karang Raja	Aktif	
		Tanjung Raja	Aktif	
		Lubuk Emplas	Aktif	
		Tanjung Jati	Aktif	
		Muara Lawai	Aktif	
		Muara Harapan	Aktif	
		Saka Jaya	Aktif	
		Harapan Jaya.	Aktif	
7.	U J A N M A S	Tanjung Raman	Aktif	
		Muara Gula Baru	Aktif	
		Muara Gula Lama	Aktif	
		Pinang Belarik	Aktif	
		Ujan Mas lama	Aktif	
		Ujan Mas Baru	Aktif	
		Ulak Bandung	Aktif	
		Guci		Tidak aktif
8.	GUNUNG MEGANG	Gunung Megang Dalam	Aktif	
		Gunung Megang Luar	Aktif	
		Penanggiran	Aktif	

		Perjito	Aktif	
		Tanjung Terang	Aktif	
		Tanjung Muning	Aktif	
		Lubuk Mumpo	Aktif	
		Bangun Sari	Aktif	
		Suka Makmur	Aktif	
		Kayu Ara Sakti	Aktif	
		Sidomulyo	Aktif	
		Pajar Indah	Aktif	
		Panang Jaya	Aktif	
9.	BELIMBING	Tanjung	Aktif	
		Simpang Tanjung	Aktif	
		Cinta Kasih	Aktif	
		Teluk Lubuk	Aktif	
		B e r u g o	Aktif	
		Belimbing	Aktif	
		B u l a n g	Aktif	
		Belimbing Jaya	Aktif	
		Darmo Kasih	Aktif	
		Dalam	Aktif	
10.	RAMBANG DANGKU	Tebat Agung	Aktif	
		Gerinam	Aktif	
		Tanjung Menang		Tidak aktif
		Jemenang	Aktif	
		Lubuk Raman	Aktif	
		Suban Jeriji		Tidak aktif
		Gemawang	Aktif	
		Da n g k u	Aktif	
		S i k u	Aktif	
		Kuripan	Aktif	
		Batu Raja	Aktif	
		Banuayu	Aktif	
		Gunung Raja	Aktif	
		Muara Niru	Aktif	
		Air Limau	Aktif	
		Muara Emburung		Tidak aktif
		Manunggal Jaya	Aktif	
		Air Talas	Aktif	
		Air Enau	Aktif	
		Manunggal Makmur	Aktif	
		Aur Duri	Aktif	
		Air Cekdam	Aktif	
		Kasih Dewa	Aktif	
		Kahuripan Baru	Aktif	
		Pangkalan Babat	Aktif	

		Kuripan Selatan	Aktif	
11.	L U B A I	Beringin	Aktif	
		A u r	Aktif	
		Jiwa Baru	Aktif	
		Kota Baru	Aktif	
		Pagar Gunung	Aktif	
		Gunung Raja	Aktif	
		Tanjung Kemala	Aktif	
		Sukamerindu	Aktif	
		Air Asam	Aktif	
		Menanti	Aktif	
12.	L U B A I U L U	Karang Agung		Tidak aktif
		Karang Sari	Aktif	
		Karang Mulya	Aktif	
		Sumber Mulya	Aktif	
		Sumber Asri	Aktif	
		Pagar Dewa	Aktif	
		Prabumenang	Aktif	
		Lecah	Aktif	
		Mekar Jaya	Aktif	
		Lubai Persada	Aktif	
13.	L E M B A K	Lubai Makmur	Aktif	
		A l a i	Aktif	
		Sungai Duren	Aktif	
		Talang Nangka	Aktif	
		Petanang	Aktif	
		Ta p u s	Aktif	
		L e m b a k	Aktif	
		Kemang	Aktif	
		Tanjung Baru	Aktif	
		Alai Selatan	Aktif	
14.	B E L I D E D A R A T	Lubuk Enau	Aktif	
		Tanjung Bunut	Aktif	
		B a b a t	Aktif	
		Lubuk Semantung	Aktif	
		Lubuk Getam	Aktif	
		Talang Balai	Aktif	
		Talang Beliung	Aktif	
		Sialingan	Aktif	
		Tanjung Tiga	Aktif	
		Ibul	Aktif	
15.	G E L U M B A N G	Gaung Asam	Aktif	
		Gelumbang	Aktif	
		Sukamenang	Aktif	
		Talang Taling	Aktif	

		P u t a k	Aktif	
		G u m a i	Aktif	
		B i t i s	Aktif	
		Payabaka	Aktif	
		Sigam	Aktif	
		Karang Endah	Aktif	
		Tambangan Kelekar	Aktif	
		Sebau		Tidak aktif
		Pinang Banjar	Aktif	
		Segayam	Aktif	
		Karta Mulya	Aktif	
		J a m b u	Aktif	
		M i d a r	Aktif	
		Gaung Telang	Aktif	
		Melilian	Aktif	
		Pedataran	Aktif	
		Teluk Limau	Aktif	
		Suka Jaya	Aktif	
		Karang Endah Selatan	Aktif	
		Betung	Aktif	
16.	SUNGAI ROTAN	M o d o n g	Aktif	
		Tanjung Miring	Aktif	
		Sukacinta	Aktif	
		Penandingan	Aktif	
		Danau Rata	Aktif	
		Sukarami	Aktif	
		Sukadana	Aktif	
		Petar Dalam	Aktif	
		Paya Angus	Aktif	
		Danau Tampang	Aktif	
		K a s a i	Aktif	
		Sungai Rotan	Aktif	
		Tanding Marga	Aktif	
		Sukamerindu	Aktif	
		Muara Lematang	Aktif	
		Sukajadi	Aktif	
		Sukamaju	Aktif	
		Danau Baru	Aktif	
		Petar Luar	Aktif	
17.	B E N A K A T	Padang Bindu	Aktif	
		Pagar Dewa.	Aktif	
		Betung		Tidak aktif
		Pagar Jati	Aktif	
		Hidup Baru	Aktif	
		Ramai Pasai	Aktif	

18.	RAMBANG	Sumber Rahayu.	Aktif	
		Sugihwaras.	Aktif	
		Baru Rambang.	Aktif	
		Negeri Agung	Aktif	
		Sugihan	Aktif	
		Sukarami.	Aktif	
		Tanjung Dalam.	Aktif	
		Tanjung Raya.	Aktif	
		Pagar Agung.	Aktif	
		Marga Mulya.	Aktif	
		Kencana Mulya	Aktif	
		Sugihwaras Barat	Aktif	
		Air Keruh		Tidak aktif
19.	KELEKAR	Menanti	Aktif	
		Suban Baru		Tidak aktif
		Teluk jaya	Aktif	
		Pelempang	Aktif	
		Embacang Kelekar	Aktif	
		Tanjung Medang	Aktif	
		Menanti Selatan	Aktif	
20.	MUARA BELIDA	Gedung Buruk	Aktif	
		Arisan Musi	Aktif	
		Harapan Mulya		Tidak aktif
		Arisan Musi Timur	Aktif	
		Tanjung Baru	Aktif	
		Kayu Ara Batu	Aktif	
		Mulia Abadi	Aktif	
		Patra Tani	Aktif	
	JUMLAH	255 DESA/KELURAHAN	239	16

Pencapaian persentase LPM yang aktif di Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1.c berikut :

Grafik 4.1.c
Persentase LPM aktif di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



Sasaran 4.1.d : Menurunnya Jumlah Desa Tertinggal.

Prestasi capaian sasaran menurunnya jumlah desa tertinggal tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu jumlah desa tertinggal dengan target 0 desa.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan. SKPD penanggung jawab adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.

4.1.d. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Keberhasilan program pembangunan infrastruktur perdesaan tahun 2016 diukur dengan jumlah desa tertinggal dengan target 0 desa, terrealisasi 1 desa atau 96,87 persen.

Dalam jangka panjang pengentasan kemiskinan pada desa tertinggal hanya dapat efektif apabila kondisi fisik yang menyebabkan suatu desa menjadi tertinggal dapat diatasi. Hal ini menyangkut pembangunan prasarana perdesaan, yang ketiadaan atau kondisinya menyebabkan suatu desa terisolasi atau rendah potensi sosial ekonominya. Prasarana perdesaan itu meliputi prasarana perhubungan seperti jalan dan jembatan atau tempat sandar perahu, di samping prasarana dasar lainnya seperti sekolah, puskesmas atau air bersih. Kebutuhan prasarana dasar perdesaan tersebut akan dipenuhi dengan berbagai program sektoral maupun regional yang sudah berjalan Namun mengingat keterbatasan dana Pemerintah, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan prasarana dasar hanya dengan cara tersebut diperlukan waktu yang lama. Oleh karena itu bersama dengan program akan diupayakan pula pembangunan prasarana perdesaan di desa-desa tertinggal sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. Untuk tidak tumpang tindih dengan program lainnya, titik berat pembangunan prasarana perdesaan yang berkaitan dengan desa tertinggal adalah prasarana perhubungan dan prasarana serta sarana air bersih.

Berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 756/KPTS/BPMPD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang penetapan desa tertinggal di Kabupaten Muara Enim ada 32 desa yang termasuk

kategori desa tertinggal. Pada tahun 2015 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 desa dari 245 desa yang ada yaitu Desa Harapan Mulia, Desa Kayuara Batu, Desa Mulya Abadi dan Desa Tanjung Baru. Pada tahun 2016 dari 4 desa tertinggal tersebut, setelah memperhatikan berbagai indikator desa tertinggal maka desa yang masuk kategori tertinggal di Kabupaten Muara Enim hanya tinggal 1 (satu) Desa yaitu Desa Tanjung Baru di Kecamatan Muara Belida.

1 desa yang tidak masuk kategori tertinggal dapat dilihat pada tabel 4.1.d berikut :

Tabel 4.1.d
Desa yang masuk kategori tertinggal
Tahun 2016

NO	DESA	KECAMATAN
1.	Tanjung Baru	Muara Belida

Sasaran 5.1.a : Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup

Prestasi capaian sasaran meningkatnya pelestarian lingkungan hidup tahun 2016 dinilai dari indikator kinerja utama yaitu Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dengan target 72 persen, dan Persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan target 58,80 persen.

Untuk mencapai target indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan beberapa program pembangunan daerah yaitu Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. SKPD penanggung jawab adalah Badan Lingkungan Hidup.

5.1.a.1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Keberhasilan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tahun 2016 diukur dengan Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dengan target 72 persen, terealisasi 44,44 persen.

Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dihitung atas perbandingan antara jumlah

perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL yang telah operasional.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL di Kabupaten Muara Enim yang sudah beroperasi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Perusahaan. Pada tahun 2016 telah dilakukan



pengawasan terhadap AMDAL dan UKL – UPL sebanyak 32 perusahaan atau 44,44 persen. Pelaksanaan pengawasan AMDAL dan UKL – UPL dilakukan melalui peninjauan langsung kelapangan / pengawasan aktif. Dari 72

perusahaan yang beroperasi tersebut terdapat 40 perusahaan yang tidak dapat dilakukan pengawasan secara aktif terhadap dokumen lingkungan dikarenakan ke 40 perusahaan tersebut telah masuk dalam kategori baik dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana hasil penilaian Program Penilaian Kinerja Perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap Perusahaan yang tidak dilakukan pengawasan secara aktif, maka perusahaan tersebut akan dilakukan pengawasan secara tidak aktif dimana mereka wajib melaporkan hasil pengawasan mandiri ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus meningkatkan pengawasan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan – kegiatan di Kabupaten Muara Enim.

Perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL – UPL di Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 5.1.a.1 berikut:

Tabel 5.1.a.1
Perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL – UPL di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
1	PERTAMINA UNIT EP SUMBAGSEL	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
2	PT PERKEBUNAN X SUNI	Pengolahan dan perkebunan inti rakyat khusus kelapa sawit	
3	PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LEGNI (DPLH)	Peningkatan Kapasitas Produksi dari 30 Ton menjadi 60 Ton TBS/Jam Pabrik pengolahan Kelapa Sawit Unit Sungai Lengi	
4	PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) UEP SUMBAGSEL LAPANGAN PRABUMULIH	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	
		Penambangan Minyak dan Gas Bumi	
		Kegiatan POP Sumur Lavatera (LVT)-1 di Blok Pagardewa	
		Kegiatan POP Sumur Pagardewa (PDW)-06 di Blok Pagardewa	
		Kegiatan POP Sumur Piretrium (PRT)-1 di Blok Pagardewa	
		Kegiatan POP Sumur Pemaat (PMT)-1 di Blok Pagardewa	
5	PT. VISTA AGUNG KENCANA	Penangkaran buaya	
		Pembibitan ayam bibit induk dn penetasan	
		Pembibitan ayam bibit induk dan penetasan	
6	PT MUSI HUTAN PERSADA	Hutan Tanaman Industri seluas 300.000 ha	
		Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas 6.000 m3	
		Jalan Khusus Angkutan Kayu	
		Jalan dan Jembatan Khusus Angkutan Kayu	
7	PT CIPTA FUTURA	Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet	
8	PT. SURYABUMI AGROLANGGENG	Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	
9	PT. LINGGA DJAJA	Industri Crub Rubber	
10	PT MULTIBREEDER ADERAMA INDONESIA, TBK (PT JAPFA COMFEED, TBK)	Penetasan Anak Ayam	
		Peternakan Bibit Ayam Induk untuk Menghasilkan Telur Ayam Niaga	
		Peternakan Bibit Ayam Induk untuk Menghasilkan Telur Tetas Ayam Niaga	

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
11	PT. BUMI SAWIT PERMAI	Perkebunan Kelapa Sawit	
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HM. RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM	Rumah Sakit Umum	
13	PT. PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA	Penambangan Batubara 4.999,69 Ha.	
14	PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK	Pembangunan Stasiun Kompresor Gas	
15	PT. DANA KOPKAR ABADI	SPBU Batu Gerigis, Bengkel Service, Cucian Mobil dan Warung Siap Saji seluas 3.200 m2	
16	PT. HASAN KARSONO DIKARA	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seluas 7.235 m2	
17	PT. SRIWIJAYA SETIA SEJATI	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),Desa Cinta Kasih seluas 5.411 m2	
18	SPBU FARAH RITA	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),Pulau Panggung. seluas 5.168 m2	
19	PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER	Industri Bubur Kertas Pengoperasian rel kereta api	
20	PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN	Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 12,679,59 Ha.	
21	PT. KIRANA PERMATA	Pabrik Pengolahan Karet Remah (Crumb Rubber) Desa AUR	
22	PT. MEDCO E&P INDONESIA	Pemasangan dan Pengoperasian Pipa Gas 16 Stasiuan rambutan Plri Gunung Megang di Blok SSE Pengembangan Lapangan Singa di Blok Lematang	
23	PT. ULIMA SUPPLINDO	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	
24	PT. MITRA ANUGRAH NUSANTARA	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tebat Agung	
25	PT. KARYA JAYA SEJAHTERA	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tipe C di Desa Suka Menang	
26	PT. KARYA BUDI UTAMA	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
		(SPBU) Tipe C di Desa Dalam	
27	PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN BUKIT ASAM	Pengoperasian Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bulat Asam 4 X 65 mw	
28	CV. MEGA MAS	Industri Kayu Olahan (Veneer) dan Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6000 m3/tahun di Gunung Megang	
29	PT. CAHAYA VIDI ABADI	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kebun Inti . 3.600 Ha,Kebun Plasma : 2.400 Ha,Kapasitas Pabrik 30 Ton TBS/Jam (Extensifikasi 45 Ton TBS/Jam)	
		Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas hektar dengan Kapasitas 45 TON TBS/JAM	
30	PT. BANIAH RAHMAT UTAMA	Pembangunan Unit Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) di Ujanmas Lama	
		Unit Alat Pencampuran Aspal (Asphat Mixing Plant) di Desa Suka Menang	
31	PT. MAWAR PERSADA BAKTI 2	Aspalt Mixing Plant di Ujanmas	
33	PT. SELE RAYA BELIDA	Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Lapangan Sungai Anggur	
34	PT. MANUNGgal MULTI ENERGI (PT MANAMBANG MUARA ENIM)	Penambangan Batubara seluas ± 1.587 Hektar	
35	TAC PERTAMINA EP - GOLDWATER TMT LED (TAC PERTAMINA EP - RETCO PRIMA ENERGI)	Pengembangan Lapangan Migas Terbatas 19 Sumur Lapangan Tanjung Miring Timur	
36	PT. KASIH KARYA MAKMUR	Asplaht Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher di Desa Talang Taling	
37	PT. ROEMPOEN ENAM SAUDARA	Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Luas 10.000 Ha 60 Ton TBS/Jam	
38	SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III, DIREKTORAT BINA MARGA, DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	Asplaht Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher di Desa Sukamenang	

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
39	PT. MUSI PRIMA COAL	Pertambangan Batubara seluas 4.443 Ha di Desa Gunung Raja	
40	PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	Pengembangan Area Geothermal Lumut Balai dan Pembangunan PLTP dengan Kapasitas 440 mw dan Luas 102 Ha di SDL	
41	PT. LUBAI SAWIT NUSANTARA	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit 16.000 Ha Kapasitas 60 Ton TBS/Jam	
42	PT. BARA ANUGERAH SEJAHTERA	Pertambangan Batubara	
43	CV. BUMI KHATULISTIWA	Pengumpul ACCU bekas, FILTER bekas dan OLIE bekas/ OIL Sludge	
44	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM	Rumah Potong Hewan / Unggas Tanjung Enim	
45	PT. MAHKOTA ANDALAN SAWIT	Pengembangan Pabrik PKS 2 x 45 Ton TBS/Jam dan Pembangunan Pabrik PKO 4 Ton PK/Jam seluas 57 Hektar	
46	PT.MEPPO-GEN	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 230 mw	
47	PT. SERVO LINTAS RAYA	Pembangunan Jalan khusus Batubara 228 KM di Kabupaten Lahat, Muara Enim dan Banyuasin Pembangunan Stockpile Batubara	
48	PT. LINUD INDONESIA (PT PELITA SRIWIJAYA SEJAHTERA)	Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Muara Lawai 10.366 m2	
49	PT. E1-PERTAGAS	Pembangunan Kilang Natural Gas Liquid (NGL) dan Pemasangan Pipa Natural Gas Liquid (NGL)	
50	PT. DIZAMATRA POWERINDO	Pelabuhan/Terminal Khusus Batubara seluas 150 ha	
51	PT. GH-EMM INDONESIA	Pembangkitan Listrik Tenaga Uap dengan Kapasitas 2 x 150 MW	
52	PT. BUMI SAWINDO PERMAI	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas 8.380,5 Hektar dengan	

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
		Kapasitas 45 Ton TBS/Jam	
53	PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA/ PT PERTAMINA EP	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Pengembangan Lapangan Migas Terbatas PMT EOR Talang Jimar dan Tanjung Tiga Barat	
54	PT. KERETA API INDONESIA (Persero) DIVRE III Sumsel	Pembangunan Jalur Ganda Niru-Muara Enim dan Muara Enim-Tanjung Enim Baru Pembangunan Jalur Ganda Tanjung Enim Baru sampai Trans Loading Station	
55	PT. GRAHA SERASAN PROPERINDO	Pembangunan Ruko dan Perumahan	
56	PT. INDRALAYA AGRO LESTARI	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 8.900 Hektar dengan Kapasitas 60 Ton TBS/Jam	
57	PT TRUBA BARA BANYU ENIM	Pertambangan Batubara Seluas 8.265 hektar	
58	PT SATRIA ARTHA NIAGA	Grand Zuri Hotel	
59	KSO PT Pertamina EP - Prisma Kapung Minyak, Ltd	KSO PT Pertamina EP - Prisma Kapung Minyak, Ltd	
60	RUMAH BERSALIN AZZAHRA	Rumah bersalin	
61	PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK	Pengembangan Tambang Batubara beserta sarana dan Fasilitas penunjangnya	
62	PT PUNCAK MUSTIKA BERSAMA	Jasa Penginapan	
63	PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)	Pembangunan Pabrik Karet LG SIR 20 Kapasitas 80 Ton KK/hari	
64	PT PERTAMINA ASSET 2 LIMAU FIELD	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Limau di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih	
65	PT. MUSIRAWAS LESTARI MAKMUR	Industri Pengolahan Kayu (Veneer)	
66	PDAM LEMATANG ENIM	Pengelolaan Air Bersih	
67	PT. TIGA PUTRI MITRA SEJAHTERA	Pembangunan Perumahan	

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
68	PT MALINDO FEEDMILL, TBK	Pembangunan Kandang Peternakan Bibit Ayam Induk	
69	PT SERASAN SEKUNDANG SAWITMAS	Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton TBS/jam seluas 25 hektar	
70	CV. KARUNIA INDAH MEDIKA	Pembangunan RSIA dan Ruko	
71	PT. UNITED TRACTORS, TBK SITE TANJUNG ENIM (DPLH)	Industri jaya perawatan dan perbaikan alat berat serta penjualan suku cadang alat berat	
72	PT WESTERN ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP INDONESIA	Operasional Perusahaan (Jasa Sewa Submersible electric dan Pump Maintenance)	

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 telah melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap dokumen AMDAL dan UKL-UPL di 32 perusahaan yang telah beroperasi, hasil pengawasan tersebut telah di tindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Pengawasan. Daftar perusahaan yang telah dilakukan pengawasan aktif terhadap dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat dilihat pada daftar di bawah ini :

NO	NAMA PERUSAHAAN	WAKTU (TANGGAL/BULAN/TAHUN)	HASIL PENGAWASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT MALINDO FEEDMILL, TBK (DESA MENANTI)	19 Januari 2016	01.BA/ BLH-I/ 2016
2	KSO PERTAMINA EP - ENERGI TANJUNG TIGA	26 Januari 2016	02.BA/ BLH-I/ 2016
3	PT KIRANA PERMATA	15 Februari 2016	03.BA/ BLH-I/ 2016
4	PT MAHKOTA ANDALAN SAWIT	07 Maret 2016	04.BA/ BLH-I/ 2016
5	PT INDRALAYA AGRO LESTARI	04 Maret 2016	05.BA/ BLH-I/ 2016
6	PT BARA ANUGARAH SEJAHTERA	23 Maret 2016	06.BA/ BLH-I/ 2016
7	PT SUPREME ENERGY	12 April 2016	07.BA/ BLH-I/ 2016
8	PT DIZAMATRA POWERINDO	12 Mei 2016	08.BA/ BLH-I/ 2016
9	PT CIPTA FUTURA	24 Mei 2016	09.BA/ BLH-I/ 2016
10	PT MUSIRAWAS LESTARI MAKMUR	25 Mei 2016	10.BA/ BLH-I/ 2016
11	PT DIZAMATRA POWERINDO	26 Mei 2016	11.BA/ BLH-I/ 2016
12	CV MEGA MAS	02 Juni 2016	12.BA/ BLH-I/ 2016

13	PT ANEKA BUMI PRATAMA	03 Juni 2016	13.BA/ BLH-I/ 2016
14	PT MEPPO - GEN	09 Juni 2016	14.BA/ BLH-I/ 2016
15	PT MANAMBANG MUARA ENIM	17 Juni 2016	15.BA/ BLH-I/ 2016
16	PT SRIWIJAYA SETIA SEJATI	20 Juni 2016	16.BA/ BLH-I/ 2016
17	PT BARA ANUGARH SEJAHTERA	21 Juni 2016	17.BA/ BLH-I/ 2016
18	PT PLN (PERSERO) PEMBANGKIT SEKTOR BUKIT ASAM	22 Juni 2016	18.BA/ BLH-I/ 2016
19	PT ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA	23 - 24 Juni 2016	19.BA/ BLH-I/ 2016
20	PT UNITED TRACTORS, TBK SITE TANJUNG ENIM	08 Agustus 2016	20.BA/ BLH-I/ 2016
21	PT SERASAN SEKUNDANG SAWITMAS	22 Agustus 2016	21.BA/ BLH-I/ 2016
22	PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII(PERSERO) UNIT USAHA BERINGIN	23 Agustus 2016	22.BA/ BLH-I/ 2016
23	PT PACIFIC GLOBAL UTAMA	26 Agustus 2016	23.BA/ BLH-I/ 2016
24	PT HUTAN PERSADA	30 Agustus 2016	24.BA/ BLH-I/ 2016
25	PT. Prima Mulia sarana Sejahtera	16 September 2016	25.BA/ BLH-I/ 2016
26	PT. Mahkota Andalan Sawit	02 Oktober 2016	26.BA/ BLH-I/ 2016
27	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	14 November 2016	27.BA/ BLH-I/ 2016
28	PT. Servo Lintas Raya Kegiatan Stockpile Batubara	10 November 2016	28.BA/ BLH-I/ 2016
29	PT. Western Electric Submersible Pump Indonesia	29 November 2016	29.BA/ BLH-I/ 2016
30	Rumah Makan Tahu Sumedang Renyah	25 November 2016	30.BA/ BLH-I/ 2016
31	CV. Khatulistiwa		
32	PT. Bumi Sawindo Permai	07 Desember 2016	31.BA/ BLH-I/ 2016

Terhadap perusahaan yang tidak dilakukan pengawasan secara aktif, maka akan dilakukan pengawasan secara pasif, berikut daftar perusahaan yang dilakukan pengawasan secara pasif :

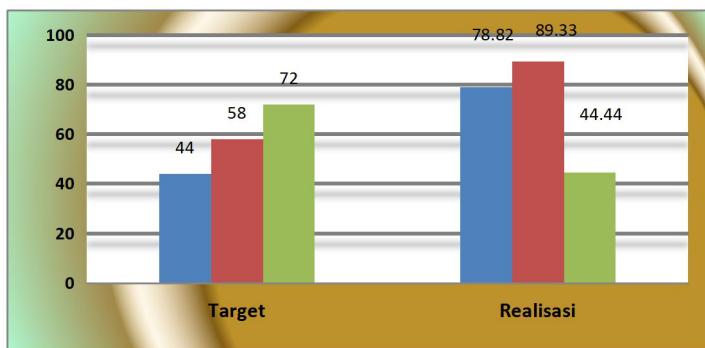
NO	NAMA PERUSAHAAN
AMDAL	
1	PT. Bara Anugrah Sejahtera
2	PT. Bumi Sawit Permai
3	PT. Bumi Sawindo Permai
4	PT. Bumi Sekundang Enim Energy
5	PT. Cipta Futura
6	PT. GHEMM Indonesia

7	PT. Mahkota Andalan Sawit
8	PT. Manambang Muara Enim
9	PT. Meppo-Gen
10	PT. Medco E & P Blok SSE
11	PT. Medco E & P Blok Lematang
12	PT. Musi Hutan Persada
13	PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field
14	PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau
15	PT. Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo
16	PT. Perta-samtan Gas
17	PT. Pertamina Gas
19	PT. Perusahaan Gas Negara Kegiatan Jaringan Transmisi Gas Bumi Jalur Gressik – Pagar Dewa
20	PT. Perusahaan Gas Negara Kegiatan Jaringan Transmisi Gas Bumi Jalur Pagar Dewa – Bojonegoro
21	PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Niru
22	PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi
23	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IV
24	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bukit Asam
25	PT. Supreme Energy Rantau Dedap
26	PT. Tanjung Enim Lestari <i>Pulp & Paper</i>
27	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Kegiatan IUP Air Laya
28	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Kegiatan IUP Banko Barat
29	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Kegiatan IUP Banko Tengah
UKL - UPL	
30	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kegiatan Penetasan Anak Ayam Desa Segayam Kecamatan Gelumbang
31	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kegiatan Peternakan Ayam Bibit Induk Untuk Menghasilkan Telur Tetas Ayam Niaga Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang
32	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kegiatan Peternakan Ayam Bibit Induk Untuk Menghasilkan Telur Tetas Ayam Niaga Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang
33	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kegiatan Pembangunan Farm PS Induk Ayam Niaga Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar
34	PT. Kirana Permata

35	PT. Lingga Djaja
36	PT. Musi Hutan Persada Kegiatan Jalan Khusus Angkutan Kayu
37	PT. Musirawas Lestari Makmur
38	PT. Malindo Feedmill
39	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Kegiatan Stasiun Kompresor Gas Desa Pagar Dewa
40	PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Beringin
41	PT. Servo Lintas Raya Kegiatan Stockpile Batubara
42	TAC PT. Pertamina EP Gold Water TMT PTE LTD
43	TAC PT. Pertamina EP Pilona Petro Tanjung Lontar
44	KSO PT. Pertamina EP - Prisma Kampung Minyak
45	JOB Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd
46	PT. Pertamina EP - Pakugajah Developmnet Sumur PMN - 10

Pencapaian persentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik 5.1.a.1 berikut :

Grafik 5.1.a.1
Percentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 - 2016



5.1.a.2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Keberhasilan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam tahun 2016 diukur dengan Persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan target 58,80 persen, terrealisasi 0,025 persen.

Pencapaian Target kinerja Persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air didapat dari luas wilayah rawan longsor Kabupaten Muara Enim 696.585,60 Ha dikurangi dengan luas rawan

longsor dan sumber mata air yang telah dilakukan penghijauan seluas 17.460 Ha atau 0,025 persen.

Kabupaten Muara Enim memiliki kondisi topografi yang cukup beragam, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Daerah dataran tinggi dibagian Barat Daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan bukit barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada dibagian tengah. Ke Utara – Timur Laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Lembak, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan.

Daerah lahan kritis dan rawan longsor di Kabupaten Muara Enim terletak di 4(empat) kecamatan yaitu Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Tanjung Agung. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan penanaman bibit tanaman berupa bibit pohon dan bibit buah-buahan sebanyak 300 batang untuk ditanam dilahan kritis seluas 10.600 m², serta dilakukan juga penanaman di kawasan hulu catchment area pada kawasan desa bedegung kecamatan tanjung agung sebanyak 585 bibit pohon penghijauan di lahan seluas 9.750 m².

Pelaksanaan penghijauan pada lahan kritis dan rawan longsor, selain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga dilakukan oleh kelompok masyarakat binaan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi.

Kelompok Masyarakat binaan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi dapat dilihat pada tabel 5.1.a.2 berikut :

Tabel 5.1.a.2

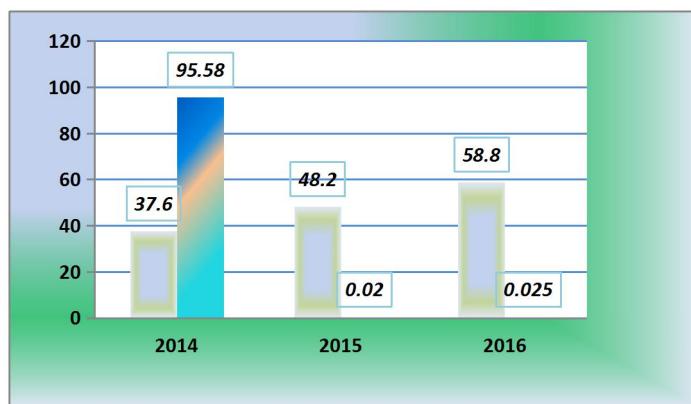
**Kelompok Masyarakat binaan rehabilitasi lahan kritis dan kawasan berfungsi di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016**

No.	Nama Kelompok	Kecamatan	Luasan (Ha)
1.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau	Semende Darat Laut	250

2.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Penindaian	Semende Darat Laut	65
3.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Danau Gerak	Semende Darat Ulu	100
4.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Tanjung Tiga	Semende Darat Ulu	735
5.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Datar Lebar	Semende Darat Ulu	700
6.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Emil	Tanjung Agung	100
7.	Lembaga Pengelola Hutan Desa Padang Bindu	Tanjung Agung	100

Pencapaian kinerja penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air di Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

grafik 5.1.a.2
Pesentase Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air
di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 – 2016



B. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016

Pada tahun 2016 anggaran pendapatan yang dialokasikan untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.177.891.479.945,19 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.049.003.317.199,57,- atau mencapai 94,08 persen, capaian pendapatan

tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan di tahun 2015 yang realisasinya sebesar 86,71 persen. Untuk anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp. 2.474.937.091.730,96 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer Bagi Hasil. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.114.999.307.352,01 atau mencapai 85,46 persen. capaian belanja tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 2015 yang realisasinya sebesar 86,10 persen. Pencapaian realisasi anggaran (pendapatan dan belanja) Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik c.1 berikut :

Grafik C.1
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 - 2016



Jika dilihat pagu anggaran terakhir selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2013, 2014 sampai 2015 realisasi kinerja keuangan mengalami penurunan rata – rata per tahun sekitar 0,97 persen, dan selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi keuangan rata – rata 87,58 persen. Tabel pagu anggaran dan realisasi anggaran serta rasio antara realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada table c.1 di bawah ini :

Tabel C.1a
Rasio antara realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir
Tahun 2012 - 2016

URAIAN	PAGU ANGGARAN PADA TAHUN KE				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	1,549,678,473,971,19	1,854,796,502,141,45	1.803.457.002.643,19	2.283.476.954.665,00	2.177.891.479.945,19
Belanja	1,653,569,538,571,19	2,183,808,984,664,34	1.926.054.866.293,97	2.453.375.336.040,57	2.474.937.091.730,96
Pembiayaan	103,891,064,600,00	329,012,482,522,89	216.866.912.834,88	214.474.981.172,02	297.045.611.785,77

URAIAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	1,132,732,304,697,50	1,845,100,169,543,54	1.797.921.268.373,16	1.980.003.841.733,83	2.049.003.317.799,57
Belanja	939,434,390,018,92	1,974,657,459,760,54	1.783.781.707.407,73	2.112.376.745.513,38	2.114.999.307.352,01
Pembangunan	339,229,242,622,63	327,629,902,918,15	216.952.795.666,88	214.896.437.281,02	90.040.467.983,66

URAIAN	Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	73,09	99,48	99,69	86,71	94,08
Belanja	56,81	90,42	92,61	86,10	85,46
Pembangunan	326,52	99,58	100	100,20	30,31

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara rinci penerimaan daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2016	%	Realisasi TA 2015
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pajak Daerah	51.767.967.010,00	52.948.650.682,50	102,28	70.755.225.873,05
4.1.2	Retribusi Daerah	15.071.732.372,00	15.085.443.456,66	100,09	12.821.992.393,20
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.891.363.203,05	7.891.363.203,05	100,00	7.283.017.311,16
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.505.062.104,00	76.166.499.704,51	84,16	87.384.853.233,46
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	165.236.124.689,05	152.091.957.046,06	92,05	178.245.088.810,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	427.710.125.652,00	485.885.084.049,00	113,60	466.675.328.642,00
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	352.734.489.489,00	297.619.865.692,00	84,38	409.393.551.630,00

4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	673.162.366.000,00	673.162.366.000,00	100,00	610.384.296.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	128.589.159.000,00	101.823.367.740,00	79,19	43.693.744.000,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
4.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	191.461.476.000,00	108.023.563.000,00	56,42	166.434.000.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	1.773.357.616.141,00	1.666.514.246.481,00	93,96	1.696.580.920.272,,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dr Provinsi	17.490.860.517,50	22.876.756.967,63	130,79	8.432.882.772,81
4.2.3.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	44.234.503.597,64	26.543.890.597,64	60,01	5.842.200.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	61.725.364.115,14	49.420.647.365,27	80,07	14.275.082.772,81
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.835.382.980.256,14	1.715.934.894.046,27	93,49	1.710.856.003.044,81
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.250.000.000,00	4.313.471.700,00	345,08	678.055.000,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	0,00	-	-	-
4.3.3	Dalam Negeri	19.782.500.000,00	19.565.804.607,00	98,90	20.308.937.740,00
	Dana Desa	151.239.875.000,00	151.239.875.000,00	100,00	67.422.614.000,00
4.3.3.02	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-
4.3.3.03	Pendapatan Lainnya	-	857.314.800,24	133,82	2.493.143.138,15
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	177.272.375.000,00	180.976.466.107,24	102,09	90.902.749.878,15
	JUMLAH PENDAPATAN	2.177.891.479.945,19	2.049.003.317.199,57	94,08	1.980.003.841.733,83
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai	799.600.498.725,52	727.573.570,34	91,33	746.895.573.742,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	657.744.078.369,00	527.875.099.895,50	80,26	521.748.834.973,13
5.1.3	Belanja Bunga	5.900.000.000,00	5.833.236.887,11	98,87	5.355.133.902,24
5.1.4	Belanja Subsidi	4.382.858.245,00	4.382.858.245,00	100,00	2.701.950.095,00
5.1.5	Belanja Hibah	25.230.137.500,00	21.634.202.687,00	85,75	28.763.220.250,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	80.000.000,00

	Jumlah Belanja Operasi	1.489.857.572.839,52	1.287.299.368.284,95	86,40	1.306.530.400.185,50
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.620.000.000,00	608.600.000,00	37,57	8.676.072.416,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.880.690.628,44	54.428.312.122,34	70,50	44.291.566.805,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.833.249.290,00	169.828.064.301,80	82,51	153.548.483.262,15
5.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan jaringan	370.915.232.575,00	318.832.648.922,92	85,96	387.905.729.653,49
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.618.804.520,00	3.308.730.300,00	49,99	2.542.870.000,00
5.2.6	Belanja Modal BLUD	15.888.051.150,00	15.865.140.292,00	99,86	3.777.326.256,19
	Jumlah Belanja Modal	683.756.028.163,44	566.871.495.939,06	82,91	600.742.048.392,83
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	2.184.179.400,00	31,20	4.071.388.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	2.184.179.400,00	31,20	4.071.388.000,00
6	TRANSFER				
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pndapatan Lainnya	-	-	-	-
6.1	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
6.2	Transfer Bantuan Keuangan				
6.2.1	Transfer Bantuan keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	293.265.737.000,00	257.586.510.000,00	87,83	201.032.908.935,05
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya – Partai Politik	1.057.753.728,00	1.057.753.728,00	100,00	985.385.088,00
	JUMLAH TRANSFER	294.323.490.728,00	258.644.263.728,00	87,88	202.018.294.023,05
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.474.937.091.730,96	2.114.999.307.352,01	85,46	2.112.376.745.513,38
	Surplus/ (Defisit)	(297.045.611.785,77)	(65.995.990.152,44)	22,22	(132.372.903.779,55)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				

7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	41.377.049.925,75	41.377.049.925,75	100,00	137.406.239.415,94
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	38.000.000.000,00	-	-	-
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
7.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	256.219.509.181,02	82.214.365.378,91	34,04	77.490.197.865,08
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		335.596.559.106,77	128.591.415.304,66	38,32	214.896.437.281,02
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	3.260.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	100,00	21.931.510.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang (Pinjaman Bank Dunia)	5.500.000.000,00	-	-	-
7.2.4	Pembayaran Utang kepada pihak ketiga	13.050.947.321,00	13.050.947.321,00	100,00	15.954.973.575,72
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		38.550.947.321,00	38.550.947.321	100,00	41.146.483.575,72
PEMBIAYAAN NETTO		297.045.611.785,77	90.040.467.983,66	30,31	173.749.953.705,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		0,00	24.044.477.831,22	-	41.375.049.925,75

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun 2016

Dari Tabel c.1a di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp.2.049.003.317.199,57,- atau mencapai 94,08 persen dari target yang telah direncanakan.

Untuk Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan akhir Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.2.114.999.307.352,00 atau 85,46 persen, dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.474.937.091.730,96. Realisasi belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.287.299.368.284,95 atau 86,40 persen, Belanja Modal sebesar Rp.

566.871.495.939,06 atau 82,91 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.184.179.400,00,- atau 31,20 persen. Realisasi belanja selama tahun 2016 ada efisiensi sebesar 22,22 persen dari perencanaan awal. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat defisit anggaran sebesar (Rp.297.045.611.785,77).

Realisasi pemberian sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2016) sebesar Rp. 90.040.467.983,66 merupakan selisih antara penerimaan pemberian sebesar Rp. 128.591.415.304,66 dengan pengeluaran pemberian sebesar Rp. 38.550.947.321,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pemberian Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 24.044.477.831,22.

Laporan perkembangan aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim 2 (tahun) terakhir dapat dilihat dari neraca pada tabel c.1b berikut :

**Tabel c.1b
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
NERACA
Per 31 Desember 2016 dan 2015**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
ASET		
ASSET LANCAR		
KAS	198.104.162.020,15	137.434.376.445,94
Kas di Kas Daerah	4.566.523.086,80	116.780.270.350,12
Kas di Bendahara Pengeluaran	272.144.800,00	89.057.400,00
Kas di Bendahara Penerimaan	28.603.176,00	28.192.030,00
Kas di Bendahara BLUD	31.100.287.015,95	18.770.488.282,82
Kas di Rekening JKN	5.438.095.023,00	1.766.423.383,00
Kas di bendahara Dana Bos	18.651.141.412,00	-
INVESTASI JANGKA PENDEK		
PIUTANG	29.380.273.624,83	167.811.978.797,90
Piutang Pendapatan	21.038.500.852,18	18.624.243.886,00
Piutang Lainnya	143.528.746.958,21	146.187.734.911,90
BEBAN DIBAYA DIMUKA	844.059.647,21	-
PERSEDIAAN	77.044.321.780,86	41.701.368.171,01

Jumlah Aset Lancar	302.521.423.702,21	343.947.778.414,85
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen	804.425.000,00	905.450.000,00
Investasi Permanen	334.255.229.826,44	208.543.205.423,47
Jumlah Investasi Jangka Panjang	335.059.654.826,44	209.448.655.423,47
ASET TETAP		
Tanah	203.769.929.283,52	190.405.039.604,52
Peralatan dan Mesin	468.807.535.867,84	451.739.578.973,75
Gedung dan Bangunan	1.379.103.668.776,94	1.206.916.171.302,73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.601.106.863.465,26	2.275.187.401.025,57
Aset Tetap Lainnya	32.690.746.568,08	32.605.770.162,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	29.341.652.127,30	9.366.200.900,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.228.674.953.472,35)	0,00
Jumlah Aset Tetap	3.486.253.099.352,59	4.166.220.161.968,57
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	39.575.845.679,15	36.315.845.679,15
Jumlah Dana Cadangan	39.575.845.679,15	36.315.845.679,15
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	-	353.600.000,00
Aset Tak Berwujud	15.008.218.800,00	43.694.420.100,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.860.137.580,00)	-
Aset Lain-Lain	212.395.517.773,86	325.484.917.402,73
Jumlah Aset Lainnya	216.543.598.993,86	369.532.937. 502,73
JUMLAH ASET	4.381.953.622.572,24	5.125.465.378.988,77
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		

Utang PFK	-	-
Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya	-	-
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan diterima dimuka	268.437.128,08	-
Utang Belanja/utang kepada pihak ketiga	50.876.685.497,83	-
Utang Pengadaan Aset Tetap/pada Pihak Ketiga	84.808.8662.640,44	7.126.740.437,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.050.947.321,00	10.979.016.144,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	149.004.732.587,35	18.105.756.581,00
 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	97.148.652.820,00	97.148.652.820,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	97.148.652.820,00	97.148.652.820,00
JUMLAH KEWAJIBAN	246.153.385.407,35	115.254.409.401,00
 EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	137.406.239.415,94
Pendapatan yang ditangguhkan	-	89.057.400,00
Cadangan Piutang	-	164.811.978.797,90
Cadangan Persediaan	-	41.701.368.171,00
Cadangan belanja yang ditangguhkan	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran	-	-
Utang Jangka Pendek	-	(18.105.756.581,00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	325.841.921.833,84
 EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	209.448.655.423,47
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	4.166.220.161.968,57
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	369.532.937.502,73

Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	(97.148.652.820,00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	4.648.053.102.074,77
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	36.315.845.679,15
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-
Ekuitas	4.135.800.237.164,89	-
JUMLAH EKUITAS DANA	4.135.800.237.164,89	5.010.210.969.587,69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.381.953.622.572,24	5.125.465.378.988,69

Sumber :Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun 2016 - 2015

Perkembangan arus kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 dapat dilihat pada tabel c.1c berikut :

Tabel c.1c
Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Untuk tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pajak Daerah	70.755.225.873,05	47.806.860.511,00
Retribusi Daerah	12.821.992.393,20	13.680.194.871,00
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.283.017.311,16	3.844.129.301,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.384.853.233,46	72.905.221.570,49
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	466.675.328.642,00	380.940.213.353,00
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	409.393.551.630,00	441.511.007.285,00
Dana Alokasi Umum	610.384.296.000,00	593.564.398.000,00
Dana Alokasi Khusus	43.693.744.000,00	59.604.080.000,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru	163.982.250.000,00	106.743.478.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.451.750.000,00	2.742.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	5.551.420.266,44	27.906.433.791,01
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	678.055.000,00	1.500.000.000,00

Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.842.200.000,00	26.478.542.510,00
Pendapatan Lainnya	88.912.543.978,15	18.224.824.180,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.975.810.228.327,464	1.797.451.383.373,16
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	746.895.573.742,13	646.342.108.543,50
Belanja Barang dan Jasa	521.749.137.108,13	381.712.494.746,23
Belanja Bunga	5.355.133.902,24	3.518.134.134,00
Belanja Subsidi	2.701.950.095,00	3.825.632.161,00
Belanja Hibah	28.763.220.250,00	30.971.206.000,00
Belanja Bantuan Sosial	80.000.000,00	5.550.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	4.071.388.000,00	149.483.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	201.032.908.935,00	77.433.767.883,00
Bantuan Keuangan Lainnya-Partai Politik	985.385.088,00	0,00
Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.511.634.697.120,50	1.149.502.826.467,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	464.175.531.206,96	647.948.161.895,43
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	1.190.520.900,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	121.630.000,00	469.885.000,00
Penjualan atas Gedung	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya.	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisah	0,00	0,00

Penerimaan penjualan Investasi Non Permanen	0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.312.150.900,00	469.885.000,00
 ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	3.260.000.000,00	34.859.500.000,00
Perolehan Tanah	8.676.072.416,00	1.758.778.520,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	44.291.566.805,00	68.738.044.200,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	153.548.483.262,15	210.368.794.006,00
Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan	387.905.729.653,49	349.175.635.490,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.542.870.000,00	2.275.400.869,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.777.326.256,19	1.962.227.855,00
Pengeluaran Pemberian Investasi Non Pemerintah	21.931.510.000,00	48.651.070.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	625.933.558.392,83	717.789.450.940,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(624.621.407.492,83)	(717.319.565.940,00)
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjaman dalam negeri	0,00	0,00
Penerimaan kembali Piutang	75.374.312.217,73	20.440.491.899,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisah	0,00	0,00
{engeluaran penjualan investasi non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	75.374.312.217,73	20.440.491.899,00
 ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	10.957.625.422,00	10.175.547.216,37
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	10.957.625.422,00	10.175.547.216,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	64.416.686.795,73	10.264.944.682,6

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	44.418.205.646,00	41.623.233.814,00
Penerimaan PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	44.418.205.646,00	41.623.233.814,00
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	44.418.205.646,00	41.623.233.814,00
Pengeluaran PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	44.418.205.646,00	41.623.233.814,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
KENAIKAN / PENURUNANKAS		
Saldo Awal Kas di BUD	137.434.431.445,94	196.512.698.777,60
Saldo Akhir Kas di BUD	4.566.523.086,80	116.780.270.350,12
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	272.144.800,00	89.057.400,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	28.603.176,00	222.030,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN	41.402.627,00	115.882.524,00
Saldo Akhir Kas di Rekening JKN	5.396.692.396,00	1.650.540.859,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	31.100.287.015,95	18.770.488.282,82
Saldo Akhir Kas di Rek Penampungan PBB P2 BRI	0,00	27.970.000,00
Saldo Akhir Kas	41.405.653.101,75	137.434.431.445,94

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun 2016

Dari Tabel c.1c di atas terlihat bahwa sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2016) arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.464.175.531.206,96 sedangkan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan minus sebesar Rp(624.621.407.491,83), arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 64.416.686.795,73 dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp.-, sedangkan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim per Tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 41.405.653.101,75.

Terlihat pada arus kas dari aktivitas operasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki arus kas masuk yang lebih besar dari arus kas pengeluaran sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu sebesar Rp.464.175.531.206,96 Hal ini mencerminkan Pemerintah Kabupaten memiliki kemampuan untuk mendanai kebutuhan operasionalnya sedangkan sisa lebih dari aktivitas operasi dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran kas dari aktivitas investasi maupun aktivitas pembiayaan.

Pada arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak memiliki sumber penerimaan dari aktivitas investasi tetapi justru melakukan investasi berupa Belanja modal yang sebagian besar digunakan dalam rangka perolehan aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi , aset tetap lainnya dan aset lainnya, sehingga didapat arus kas netto yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten sedang membangun /meningkatkan sarana dan prasarana. Kondisi ini sangat relevan dengan visi dan misi Kabupaten Muara Enim di bidang pembangunan, penataan, peningkatan maupun perbaikan diberbagai bidang kewenangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang.

Dilihat dari arus kas aktivitas pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga tidak memiliki sumber penerimaan dari aktivitas pembiayaan. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp. 48.651.070.000,00 pembayaran pokok hutang (pinjaman bank dunia) sebesar Rp. 0,00 dan pembayaran hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 10.975.625.422,00 sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 64.416.686.795,73.

Pada arus kas dari aktivitas non anggaran, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten menerima arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp.44.418.205.646,00 Penerimaan PFK pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dan melakukan arus kas keluar untuk pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp.

44.418.205.646,00 Pengeluaran PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp. 0,- sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp. -.

Dari arus kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran, saldo akhir kas di BUD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, saldo akhir kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 41.405.653.101,75

C. ANALISIS ANGGARAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Pencapaian realisasi kinerja sasaran dan realisasi anggaran per sasaran, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1.1.a : Meningkatnya IPM.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 90,28 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran tercapai 62,87 persen.

Sasaran 1.b : Menurunnya Angka Kemiskinan.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 76,75 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran tercapai 82,84 persen.

Sasaran 1.c : Meningkatnya ketahanan pangan.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 131 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 90,70 persen.

Sasaran 1.d : Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 87,82 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 86,79 persen.

Sasaran 1.e : Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 104 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 99,74 persen.

Sasaran 2.a : Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 100 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 89,00 persen.

Sasaran 2.b : Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 70 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 88,12 persen.

Sasaran 2.c : Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 100 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 88,52 persen.

Sasaran 2.1.a : Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 100 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 92,50 persen.

Sasaran 2.1.b : Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 100 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 91,33 persen.

Sasaran 3.1.a : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 81,75 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 65,61 persen.

Sasaran 3.1.c : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 65,56 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 95,54 persen.

Sasaran 3.1.d : Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 95,73 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 78,91 persen.

Sasaran 4.1.a : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 107 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 55,70 persen.

Sasaran 4.1.b : Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 149 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 55,70 persen.

Sasaran 4.1.c : Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 106 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 76,79 persen.

Sasaran 4.1.d : Menurunnya jumlah desa tertinggal.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 99 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 95.51 persen.

Sasaran 5.1.a : Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup.

Pencapaian kinerja sasaran tercapai 37,51 persen, sedangkan realisasi anggaran sasaran 95.20 persen.

Pencapaian kinerja sasaran dan pencapaian kinerja anggaran per program sasaran strategijk dapat dilihat pada tabel C.1 dibawah ini :

Tabel. C.1
Realisasi Anggaran Per Program Sasaran Strategijk Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.1.a	Meningkatnya IPM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,90	65,82	90,28	323.194.871.746	203.197.146.791	62,87
1.b	Menurunnya Angka Kemiskinan	Percentase masyarakat miskin	11,16	14,54	76,75	16.546.306.000	13.708.313.071	82,84
1.c	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama : Beras Daging Telur Ikan	112,39 kg/kapita/tahun 12,54 kg/kapita/tahun 8,24 kg/kapita/tahun 33,54 kg/kapita/tahun	104,77 kg/kapita/tahun 16,89 kg/kapita/tahun 14,54 kg/kapita/tahun 41,54 kg/kapita/tahun	93,22 134 176 123	3.909.341.900 3.545.867.065		90,70
		Jumlah kelompok tani kelas utama	76 Klp	76 Klp	100	8.322.582.800	7.113.168.123	85,46
1.d	Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR	Jumlah Rumah tidak layak huni	13.886 Unit	15.811 unit	87,82	750.000.000	650.986.000	86,79
.e	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	Percentase rumah tangga pengguna air bersih	71,82	73,57	102	4.817.818.000	4.546.918.000	92,50

		Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,60	76,80	107	1.112.430.000	1.041.107.000	99,74
2.a	Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan	Persentase lembaga – lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	99	100	100	642.607.500	580.209.000	89,00
2.b	Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikat baca Al - Quran	3.960 orang	35.109 orang	100	5.499.889.500	4.846.609.605	88,12
		Produk makanan dan minuman berlabel halal	30 produk	12 produk	40			
2.c	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	Jumlah konflik bernuansa SARA	0 kejadian	0 kejadian	100	1.131.932.800	1.002.080.700	88,52
2.1.a	Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100	378.799.000	350.401.800	92,50
1.b	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	LAKIP	B	B	100	136.300.000	124.485.746	91,33
		Opini BPK	WTP	WTP	100	370.037.000	336.794.500	91,00
3.1.a	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK dengan migas PDRB ADHK tanpa migas	11,7 9,0	7,62 8,87	64,95 98,55	24.327.513.950	15.962.201.950	65,61

3.1.b	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	77,10	50,55	79,30	2.237.354.000	2.137.589.890	95,54
3.1.c	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	83,59	68,31	81,72	246.286.725.000	223.341.595.150	85,23
		Jaringan irigasi dalam kondisi baik	79,77	90	112	7.535.400.000	6.778.321.000	90,02
		Persentase KK teraliri listrik	68,86	81,60	118	34.635.803.000	5.838.642.000	44,63
		Persentase desa yang memiliki akses terhadap pasar yang memadai	92	95	103	2.629.785.000	1.247.612.210	47,43
		Jumlah BPR aktif	1	1	100	133.371.000	125.891.803	94,39
		Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	4.479	4.546	101	688.499.500	678.622.350	98,57
		Persentase koperasi aktif	90	68,81	76,45	366.264.500	336.983.850	92,10
4.1.a	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes	67	72,10	107	2.212.108.600	1.202.458.950	55,70
1.b	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa	67	100	149	2.212.108.600	1.202.458.950	55,70

1.c	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase LPM aktif	88	93,72	106	2.903.390.450	2.326.880.776	76,79
1.d	Menurunnya jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	0 desa	1 desa	99	3.449.354.750	5.083.082.000	97,16
5.1.a	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	72	44,44	61,72	1.031.348.900	983.982.345	95,41
		Persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	58,80	0,025	0,002	702.000.200	668.270.476	95,20

D. ASPEK PENDUKUNG KINERJA

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim didukung oleh sarana dan prasarana serta dukungan Sumber Daya aparatur. Jumlah pegawai di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, LTD dan seluruh dinas berjumlah 8.174 orang. (Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah).

E. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

TAHUN 2016

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/118/AA.05/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 65,58 atau dengan predikat “B”. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja	23,28
b. Pengukuran Kinerja	13,23
c. Pelaporan Kinerja	11,06
d. Evaluasi Kinerja	6,35
e. Capaian Kinerja	11,66
Nilai hasil evaluasi	65,58

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pembangunan manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja. Namun dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran

2. (cascade down) kinerja dari level kabupaten sampai ke individu pegawai;
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada butir 1 di atas. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
4. Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat kinerja;
5. Memerintahkan kepada inspektorat untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar SKPD, serta kepada Bappeda dan para penanggungjawab program untuk meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan efisiensi;
6. Kepada Inspektorat agar meningkatkan kompetensi APIP dalam upaya memberikan rekomendasi perbaikan penerapan manajemen kinerja masa yang akan datang dan mendorong terwujudnya unit kerja yang berbudaya kerja;
7. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, menginformasikan keterkaitan anggaran yang terserap dengan outcome yang berhasil dicapai.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2016

Terhadap rekomendasi hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2016, Pemerintah

Kabupaten Muara Enim telah melakukan melakukan langkah - langkah :

1. Melakukan Reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dilakukan secara berkala untuk melengkapi indikator tujuan, revisi RPJMD dan Renstra tersebut akan dilakukan pada tahun 2016;
2. Pemantauan kinerja dilakukan secara menyeluruh terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Perjanjian Kinerja telah disusun secara bertingkat (*cascading kinerja*) mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon IV;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program dan kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja program kepada seluruh SKPD;
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja secara berkala setiap tahun untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

BAB IV

PENUTUP

1. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013.
2. Pengukuran kinerja dalam LKj dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik
3. Pengukuran Kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi Pemerintah Kabupaten yang meliputi 18 sasaran strategis.
4. Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 18 sasaran yang mencakup 29 indikator kinerja sasaran setingkat *outcome*. Hasil pengukuran dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu *sangat baik* dengan tingkat capaian $\geq 91\%$ persen, *baik* dengan tingkat capaian 81 persen - 90 persen, *cukup* dengan tingkat capaian 71 persen - 80 persen dan *kurang* dengan tingkat capaian $\leq 70\%$ persen:
 - a. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 12 sasaran atau sebesar 63,15 persen dari total sasaran.
 - b. Pencapaian sasaran baik (81 % - 90 %) terdiri atas 4 sasaran atau sebesar 21,05 persen dari total sasaran.

- c. Pencapaian sasaran cukup (71 % - 80 %) terdiri atas 2 sasaran atau 10,52 persen dari total sasaran.
 - d. Pencapaian sasaran kurang (\leq 70 %) terdiri atas 1 sasaran atau 5,26 persen dari total sasaran.
5. Terdapat 12 (dua belas) sasaran yang realisasi tingkat capaiannya masuk katagori sangat baik, 4 (empat) sasaran tingkat capaiannya masuk dalam katagori baik, 2 (dua) sasaran masuk kedalam katagori cukup dan 1 (satu) sasaran masuk kedalam karegori kurang.
6. Upaya pemecahan masalah untuk mengatasi hambatan / kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengambil langkah-langkah, antara lain
- a. Pemenuhan jumlah sarana dan profesionalisme sumber daya aparatur tetap akan menjadi prioritas;
 - b. Memantapkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. Meningkatkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah Kabupaten Muara Enim.
 - d. Melakukan revisi terhadap target – target yang ada di RPJMD.
7. Akuntabilitas Kinerja Keuangan tahun 2016, sebagai berikut :
- a. Jumlah pendapatan sampai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 2.049.003.317.199,57.- atau mencapai 94,08 persen dari target yang telah direncanakan sebesar Rp. 2.177.891.479.945,19.-
 - b. Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2016) terealisasi sebesar Rp. 2.114.999.307.352,01.- atau 85,46 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.474.937.091.730,96.- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.287.299.368.284,95.- Belanja Modal sebesar Rp. 566.871.495.939,06.- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.184.179.400,00.-. Realisasi belanja selama tahun 2016 ada efisiensi sebesar 14,54 persen dari perencanaan awal.

- c. Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2016), terdapat surplus anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp.65.995.990.152,44.-
 - d. Realisasi jumlah pемbiayaan sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2016) adalah sebesar Rp. 90.040.467.983,66.- merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 128.591.415.304,66.- dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 38.550.947.321,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 24.044.477.831,22.-
8. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
 9. Keberhasilan pencapaian sasaran yang tercantum dalam RPJMD ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 10. Untuk pengumpulan data kinerja secara memadai, Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 telah membangun system pengumpulan data, dan sistem evaluasi kinerja.

Lampiran

LAMPIRAN 1 FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

LAMPIRAN 2 FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)